



MAL
PELAYANAN PUBLIK
KOTA BALIKPAPAN

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP) 2024

DPMPTSP Kota Balikpapan
Jalan Ruhui Rahayu I No.09 RT.08
Balikpapan 76115

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmatNya sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Balikpapan Tahun 2024 dapat terselesaikan.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Balikpapan Tahun 2024 disusun berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2024. LKjIP Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Balikpapan Tahun 2024 merupakan bentuk akuntabilitas publik dari pelaksanaan tugas dan fungsi dan penggunaan anggaran yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah. Laporan ini sebagai media informasi publik atas capaian kinerja yang terukur. Capaian kinerja disajikan melalui pengukuran dan evaluasi kinerja serta pengungkapan (disclosure) secara memadai atas hasil analisis pengukuran kinerja.

Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian instansi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis berdasarkan indikator-indikator yang ditetapkan. Diharapkan penyajian LKjIP ini dapat menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan kinerja agar lebih berorientasi pada hasil, relevan, efektif, efisien dan berkelanjutan di masa mendatang.

KEPALA DPMP TSP KOTA BALIKPAPAN



HASBULLAH HELMI

RINGKASAN EKSEKUTIF

Pelaporan kinerja pemerintah melalui penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini menjadi salah satu upaya yang dilakukan pemerintah untuk mendorong tata kelola pemerintahan yang baik. Proses penilaian yang terukur ini menjadi bagian dari skema pembelajaran bagi organisasi pemerintah untuk terus meningkatkan kapasitas kelembagaan sehingga kinerjanya bisa terus ditingkatkan. LKjIP Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Balikpapan Tahun 2024 ini merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi. Penyusunan LKjIP dilakukan dengan mendasarkan pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dimana pelaporan capaian kinerja organisasi secara transparan dan akuntabel merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Balikpapan.

Analisa dan bukti-bukti pendukung pencapaian kinerja menjadi bagian dalam penyusunan LKjIP ini, untuk menjawab pertanyaan sejauh mana sasaran pembangunan yang ditunjukkan dengan keberhasilan pencapaian indikator kinerja utama (IKU) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Balikpapan yang telah dicanangkan pada tahun 2021 yang telah berhasil dicapai. Dari tiga indikator kinerja utama Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Balikpapan Tahun 2024. Pencapaian IKU untuk tahun ketiga dalam pelaksanaan Renstra 2021-2026 dengan kategori "sangat berhasil" yaitu pada sasaran strategis Meningkatnya Capaian Nilai Realisasi Investasi dengan indikator sasaran Presentase Pencapaian Nilai Realisasi Investasi tingkat capaian kinerjanya sebesar 128,02%, untuk Sasaran strategis Meningkatnya Kualitas Layanan Perizinan indikator sasaran Presentase peningkatan Indeks Kepuasan Masyarakat untuk tahun 2024 tingkat capaian kinerjanya adalah 354,55%. Untuk sasaran strategis Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dengan indikator sasaran Nilai SAKIP DPMPSTP Kota Balikpapan tingkat capaian kinerjanya sebesar 99,76%.

Evaluasi atas data-data pendukung dan permasalahan atas setiap sasaran menunjukkan beberapa tantangan yang perlu menjadi perhatian bagi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Balikpapan ke depan. Dalam meningkatkan kinerja maka terdapat hal-hal yang perlu ditingkatkan antara lain :

1. Perlu adanya kerjasama seluruh pihak yang terkait dalam proses perencanaan program dan kegiatan yang akan diusulkan pada tahun yang akan datang;
2. Penetapan program dan kegiatan yang tepat sasaran sehingga sasaran serta tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai memenuhi target yang direncanakan;
3. Memprioritaskan anggaran tepat guna dan tepat sasaran sehingga anggaran dapat terealisasi secara maksimal;
4. Perlu ditetapkan adanya Formulasi dari target indikator kinerja dalam perjanjian kinerja;
5. Peningkatan Sumber daya Manusia (SDM) Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kota Balikpapan, baik secara kualitas dan kuantitas yang memiliki relevansi kuat dengan penyelenggaraan tugas dan tanggung jawab melalui bimbingan teknis;
6. Pemutakhiran dan penyusunan Standar Pelayanan dan Standar Operasional Prosedur (SP/SOP) terkait dengan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kota Balikpapan.
7. Peningkatan Inovasi Pelayanan dengan memanfaatkan teknologi sehingga mendukung Kota Balikpapan sebagai SMART CITY

Hasil evaluasi yang disampaikan dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini penting dipergunakan sebagai pijakan bagi Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Balikpapan dalam perbaikan kinerja di tahun yang akan datang.

DAFTAR ISI

Kata Pengantar		i
Ringkasan Eksekutif		ii
Daftar Isi		iv
Daftar Tabel		vi
Daftar Gambar		viii
Daftar Grafik		x
I PENDAHULUAN		1
1.1 Latar Belakang		1
1.2 Landasan Hukum		4
1.3 Maksud dan Tujuan		5
1.4 Gambaran Umum Perangkat Daerah		6
1.4.1 Tugas Pokok dan Fungsi		6
1.4.2 Struktur Organisasi		12
1.4.3 Potensi Sumber Daya Manusia		
Dinas Penanaman Modal dan		
Pelayanan Terpadu Satu Pintu		13
1.5 Aspek Strategis dan Permasalahan Utama		15
1.5.1 Sarana Prasarana Penunjang		
Pelayanan		15
1.5.2 Gambaran Pelayanan Dinas		
Penanaman Modal dan Pelayanan		
Terpadu Satu Pintu Kota		
Balikpapan		21
1.6 Sistematika Penulisan		28
II PERENCANAAN KINERJA		30
2.1 Perencanaan Strategis		30
2.2 Indikator Kinerja Utama		35
2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2024		38
III AKUNTABILITAS KINERJA		45
3.1 Laporan Hasil Evaluasi atas Implementasi		
Sistem AKIP Tahun Sebelumnya		45
3.2 Capaian Kinerja Organisasi		49

3.2.1	Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Balikpapan	50
3.2.2	Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir	51
3.2.3	Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Tahun 2024 dengan Target Jangka Menengah pada Rencana Strategis	54
3.2.4	Perbandingan Realisasi Kinerja tahun ini dengan Mengacu pada SPM/Standar Nasional/Internasional (Benchmark Kinerja)	55
3.2.5	Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang telah dilakukan	56
3.2.6	Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan/Kegagalan	67
3.2.7	Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	90
3.3	Realisasi Anggaran Tahun 2024	100
IV	PENUTUP	104
LAMPIRAN		

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Kota Balikpapan Tahun 2021-2026	3
Tabel 1.2	Jumlah PNS dan Non PNS Berdasarkan Tingkat Pendidikan	14
Tabel 1.3	Sarana dan Prasarana DPMPTSP Kota Balikpapan	15
Tabel 1.4	Jenis Pelayanan Perizinan Berusaha serta Perangkat Daerah Teknis Terkait pada DPMPTSP Kota Balikpapan	24
Tabel 1.5	Jenis Pelayanan Publik Non Perizinan Berusaha serta Perangkat Daerah Teknis Terkait pada DPMPTSP Kota Balikpapan	25
Tabel 2.1.3	Tujuan, Sasaran dan Target Renstra DPMPTSP Perubahan Tahun 2021-2026	31
Tabel 2.1.4	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	32
Tabel 2.2	Indikator Kinerja Utama (IKU) Perubahan Tahun 2021-2026	37
Tabel 2.3	Perjanjian Kinerja Tahun 2024/Perubahan	38
Tabel 2.3.1	Rencana Anggaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2024	40
Tabel 3.1.1	Rincian Hasil Evaluasi atas Implementasi Sistem AKIP Tahun Sebelumnya	45
Tabel 3.1.2	Matriks Tindak Lanjut Implementasi Akuntabilitas Kinerja DPMPTSP Tahun 2023 atas Penilaian Tahun 2024	46
Tabel 3.2	Predikat Capaian Kinerja	49
Tabel 3.2.1	Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024	50
Tabel 3.2.2	Realisasi Kinerja Tahun 2022-2026	51
Tabel 3.2.3	Realisasi Kinerja yang Mengacu pada Target Jangka Menengah Renstra	54

Tabel 3.2.4	Realiasi Kinerja yang Mengacu pada Standar Nasional	55
Tabel 3.2.5	Ikhtisar Capaian Kinerja pada Tahun 2024	56
Tabel 3.2.6	Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Kinerja (Perjanjian Kinerja)	68
Tabel 3.2.7	Kegiatan Promosi Penanaman Modal DPMPTSP Tahun 2024	72
Tabel 3.2.8	Kegiatan Sosialisasi Bimbingan Teknis LKPM Online DPMPTSP Tahun 2024	77
Tabel 3.2.9	Jumlah Aparatur Sipil Negara (PNS) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Balikpapan Menurut Jabatan dan Jenis Kelamin	91
Tabel 3.2.10	Jumlah Aset yang Dimiliki dan Tidak Dipakai (Rp) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Balikpapan	92
Tabel 3.2.11	Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya (Anggaran)	98
Tabel 3.3	Realisasi Anggaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Balikpapan Tahun 2024	101

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Bagan Struktur Organisasi DPMPTSP Kota Balikpapan	13
Gambar 1.2	Ruang Pelayanan DPMPTSP Kota Balikpapan	17
Gambar 1.3	Front Office DPMPTSP Kota Balikpapan	17
Gambar 1.4	Prasarana Layanan Pendukung Perizinan	18
Gambar 1.5	Pojok Baca Digital DPMPTSP Kota Balikpapan	19
Gambar 1.6	Fasilitas Difabel DPMPTSP Kota Balikpapan	19
Gambar 1.7	Fasilitas Ruang Laktasi dan Ruang Bermain Anak	20
Gambar 1.8	Virtual MPP, Meeting Room dan Consult Room	20
Gambar 1.9	Denah MPP, Mesin Antrian Online dan Layanan Mandiri	21
Gambar 3.1	Data Realisasi Investasi (PMA & PMDN) Kota Balikpapan Tahun 2024	57
Gambar 3.2	Data Realisasi Investasi PMA berdasarkan Sektor Usaha	58
Gambar 3.3	Data Realisasi Investasi PMDN berdasarkan Sektor Usaha	59
Gambar 3.4	Data Perbandingan Kontribusi PSN dan Non PSN dalam Capaian Nilai Realisasi Investasi Kota Balikpapan periode 2020-2024	59
Gambar 3.5	Capaian Nilai SKM berdasarkan Jenis Responden (Umur, Jenis Kelamin dan Pendidikan)	64
Gambar 3.6	Aplikasi Pelayanan Mal Pelayanan Publik (MPP) Kota Balikpapan	65
Gambar 3.7	Aplikasi Pelayanan Mal Pelayanan Publik (MPP) Kota Balikpapan	66

Gambar 3.8	Flyer Pelayanan Chatbot Mal Pelayanan Publik (MPP) Kota Balikpapan	66
Gambar 3.9	Forum Konsultasi Publik DPMPTSP Tahun 2024	67
Gambar 3.10	Kegiatan SiJempol (Sistem Jemput Bola Langsung) pada Atrium Mal Balikpapan Baru	67
Gambar 3.11	Kegiatan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (PBBR) melalui Sistem OSS pada Tahun 2024	79
Gambar 3.12	Kegiatan Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam Merealisasikan Kegiatan Usahanya pada Tahun 2024	80
Gambar 3.13	Manajemen Pengaduan DPMPTSP Kota Balikpapan	88
Gambar 3.14	Tampilan Website DPMPTSP Kota Balikpapan	88
Gambar 3.15	Email Terkait Keluhan/Saran/Kritik DPMPTSP Kota Balikpapan	89

DAFTAR GRAFIK

Grafik 3.1	Capaian Nilai SAKIP DPMPTSP Kota Balikpapan Tahun 2021-2024	62
Grafik 3.2	Capaian Skor SKM DPMPTSP Kota Balikpapan Tahun 2021-2024	64
Grafik 3.3	Komposisi/Perbandingan Aparatur Sipil Negara (PNS) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Balikpapan Menurut Tingkat Pendidikan	91

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Balikpapan sesuai Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah sebagai perangkat daerah yang membantu dan bertanggung jawab kepada kepala daerah dalam urusan pemerintahan Kota Balikpapan. Berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 54 Tahun 2016, Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan sub urusan pemerintahan bidang pelayanan satu pintu yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah, meliputi sub urusan pengembangan, promosi, pelayanan, pengendalian, data dan sistem informasi penanaman modal serta pelayanan perizinan dan non perizinan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah dan tugas pembantuan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah dan secara teknis diatur dalam Peraturan Menteri PAN dan reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu sebagai instansi pemerintah diwajibkan menetapkan target kinerja yang telah dicapai serta menyampaikan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).

Penyusunan LKjIP Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Tahun 2024 dimaksudkan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas LKjIP DPMPSTSP 2024 pelaksanaan mandat, visi dan misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan di dalam Rencana Kinerja Tahun 2024, serta sebagai umpan balik untuk perbaikan kinerja Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu pada tahun mendatang. Pelaporan kinerja juga dimaksudkan sebagai media

untuk mengkomunikasikan pencapaian kinerja Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu dalam satu tahun anggaran kepada masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya. Target kinerja yang harus dicapai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Balikpapan Tahun 2024, merupakan penjabaran dari visi, misi dan tujuan yang telah dituangkan dalam Rencana Strategis Tahun 2016 – 2021 dan Rencana Kerja Tahun 2024. Pengukuran pencapaian kinerja bertujuan untuk mendorong instansi pemerintah dalam meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efektifitas dari kebijakan dan program serta dapat menjadi masukan dan umpan balik bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam rangka peningkatan kinerja instansi pemerintah. Oleh karena itu, substansi penyusunan LKJIP didasarkan pada hasil-hasil capaian indikator kinerja pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Balikpapan.

Berdasarkan RPJMD Kota Balikpapan Tahun 2021-2026 ditetapkan Rencana strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Balikpapan Tahun 2021-2026 sebagai panduan pelaksanaan tugas dan fungsi untuk 5 (lima) tahun kedepan, tahun 2024 merupakan tahun keempat pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Balikpapan Selanjutnya rencana kinerja kegiatan ditetapkan melalui perencanaan kinerja tahunan yang memuat program dan kegiatan dengan indikator kinerja, kebijakan dan strategi yang telah ditetapkan dalam rencana strategis.

Secara garis besar program dan kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Balikpapan diarahkan kepada :

1. Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi
2. Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi
3. Peningkatan Pengawasan, Pengendalian Investasi dan Perizinan
4. Peningkatan Kemudahan Pelayanan dan Percepatan Proses Perizinan
5. Pengembangan Sistem Informasi Penanaman Modal dan Perizinan
6. Peningkatan Penunjang Urusan pada DPMPTSP Kota Balikpapan

Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Balikpapan Tahun 2021-2026 diharapkan memberikan

kontribusi yang signifikan bagi keberhasilan pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran Pemerintah Kota Balikpapan. Adapun misi, tujuan dan sasaran dalam RPJMD Kota Balikpapan Tahun 2021-2026 yang selaras dengan tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu adalah sebagai berikut :

Tabel 1.1
Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Kota Balikpapan
Tahun 2021-2026

VISI	MISI	TUJUAN	SASARAN
Terwujudnya Balikpapan Sebagai Kota Terkemuka Yang Nyaman Dihuni, Modern, dan Sejahtera dalam Bingkai Madinatul Iman	<u>MISI KE-1 :</u> Mewujudkan penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik	<u>TUJUAN KE-1 :</u> Meningkatkan profesionalitas dan Transparansi Birokrasi	<u>Sasaran ke-2 :</u> Meningkatnya kepuasan masyarakat atas layanan pemerintah
	<u>MISI KE-5 :</u> Mengembangkan ekonomi kerakyatan yang kreatif.	<u>TUJUAN KE-5 :</u> Meningkatkan pertumbuhan ekonomi	<u>Sasaran ke-8</u> Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi

Sumber : Renstra DPMPTSP Kota Balikpapan Tahun 2021-2026

Untuk mewujudkan visi dan misi tersebut, maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Balikpapan menetapkan strategi-strategi peningkatan antara lain:

- a. membangun dan mengembangkan inovasi-inovasi pelayanan untuk menciptakan pelayanan yang tepat, cepat, sederhana, dan murah untuk semua penyelenggaraan pelayanan perizinan yang dilaksanakan oleh DPMPTSP;
- b. melakukan pembinaan dan pengawasan secara berkelanjutan terhadap pelaksana pelayanan mengenai kepatuhan terhadap standar pelayanan, etika pelayanan, dan budaya pelayanan prima;
- c. melakukan pembinaan untuk peningkatan kompetensi petugas pelayanan;

- d. melakukan penguatan komitmen antipungli, antigratifikasi, dan anti suap;
- e. melakukan pengelolaan pengaduan yang lebih responsif dan tertata kelola dengan baik;
- f. menjaga kebersihan dan kenyamanan fasilitas pengguna layanan seperti toilet, parkir, dan ruang pelayanan.

Sebagai wujud pertanggungjawaban dan informasi publik dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Balikpapan dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal pelayanan perizinan dan non perizinan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah di Kota Balikpapan tersebut maka disusunlah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Balikpapan Tahun Anggaran 2024.

1.2 Landasan Hukum

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 tahun 2008;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025, khususnya Bab IV Arah, Tahapan dan Prioritas Pembangunan Jangka Panjang, yang terkait dengan reformasi birokrasi disebutkan bahwa "Pembangunan aparatur Negara dilakukan melalui reformasi birokrasi untuk meningkatkan profesionalisme aparatur negara dan untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik, di pusat maupun di daerah, agar mampu mendukung keberhasilan pembangunan di bidang-bidang lainnya";
4. Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 Grand

Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;

6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tanggal 8 Januari 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2022;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Balikpapan Tahun 2016-2026;
10. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
11. Peraturan Wali Kota Balikpapan Nomor 11 tahun 2022 tentang Penetapan Rencana Strategis 2021-2026;
12. Peraturan Wali Kota Balikpapan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah;
13. Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Balikpapan Nomor 188.4-106/2023 tanggal 29 Desember 2023 tentang Perubahan Indikator Kinerja Utama Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Balikpapan Kota Balikpapan Tahun 2021-2026.

1.3 Maksud dan Tujuan

Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah menyebutkan bahwa setiap instansi pemerintah wajib menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).

Penyusunan laporan kinerja ini bermaksud sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Balikpapan dalam pencapaian sasaran strategis yang telah ditetapkan selama kurun waktu 1 (satu) tahun di tahun 2024 yang diukur berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU) dalam Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Balikpapan Tahun 2021-2026.

Tujuan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah adalah untuk memberikan informasi keberhasilan dan kegagalan kinerja serta sebagai umpan balik untuk memperbaiki kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Balikpapan di masa yang akan datang.

1.4 Gambaran Umum Perangkat Daerah

1.4.1 Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Wali Kota Balikpapan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah disebutkan bahwa Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Balikpapan mempunyai tugas perencanaan, pengaturan, pembinaan, pengendalian dan kebijakan di bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan aparatur Pemerintah Kota Balikpapan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Balikpapan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. penyusunan program dan kegiatan pengembangan penanaman modal dan pelayanan perizinan terpadu;
- b. perumusan kebijakan teknis dibidang penanaman modal dan peningkatan pelayanan perizinan terpadu;
- c. perumusan kebijakan sistem pelayanan perizinan terpadu;
- d. perumusan kebijakan dan pengelolaan sistem pengaduan masyarakat;
- e. penyelenggaraan pembinaan, fasilitasi, pengawasan dan pengendalian penanaman modal;

- f. pengembangan sistem informasi penanaman modal dan pelayanan perizinan terpadu;
- g. penyelenggaraan pengembangan dan promosi potensi daerah;
- h. pengolahan data dan informasi serta evaluasi kegiatan penanaman modal;
- i. pelaksanaan sistem pelayanan perizinan terpadu sesuai kewenangan yang didelegasikan;
- j. penyelenggaraan koordinasi dan fasilitasi pemrosesan berkas perizinan yang didelegasikan secara terpadu;
- k. penandatanganan perizinan sesuai kewenangan yang diberikan;
- l. pengelolaan data secara manual dan elektronik sesuai kewenangan;
- m. penyelenggaraan koordinasi dengan Perangkat Daerah teknis terkait dalam proses pengawasan dan pengendalian perizinan/non perizinan yang diterbitkan;
- n. pengoordinasian dan penyampaian dokumen salinan perizinan kepada perangkat Daerah terkait dalam rangka pelaksanaan pengawasan dan pengendalian teknis;
- o. penyediaan informasi pelayanan perizinan kepada masyarakat;
- p. pelaksanaan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi; dan
- q. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan/atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Adapun struktur Organisasi DPMPSTSP Kota Balikpapan yaitu :

1. Sekretariat

Sekretariat menyelenggarakan tugas:

- a. penyusunan program;
- b. pengelolaan urusan keuangan;
- c. kepegawaian;
- d. rumah tangga kantor;
- e. perlengkapan;
- f. protokol;

- g. hubungan masyarakat;
- h. layanan informasi dan pengaduan;
- i. pembinaan pelayanan publik;
- j. kearsipan;
- k. surat menyurat; dan
- l. evaluasi dan pelaporan.

Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. pengoordinasian penyusunan program dan kegiatan;
- b. pengoordinasian penyusunan dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah;
- c. pengoordinasian penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja anggaran dan dokumen pelaksanaan anggaran;
- d. pelaksanaan dan pembinaan ketatausahaan, ketatalaksanaan dan kearsipan;
- e. pengelolaan urusan kehumasan, keprotokolan dan kepastakaan;
- f. pelaksanaan administrasi kantor dan pembinaan kepegawaian;
- g. pengelolaan anggaran Dinas dan penerimaan retribusi;
- h. pelaksanaan administrasi keuangan;
- i. pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan;
- j. pengelolaan informasi, dokumentasi dan pelaksanaan fungsi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu;
- k. pengoordinasian bidang dan UPT;
- l. pelaksanaan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi; dan
- m. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan/atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Bidang Penanaman Modal

Bidang Penanaman Modal mempunyai tugas merencanakan, mengoordinasikan, melaksanakan dan mengendalikan kegiatan Bidang Penanaman Modal. Bidang Penanaman Modal mempunyai fungsi:

- a. penyusunan program dan kegiatan bidang penanaman modal;
- b. perumusan kebijakan teknis dan perencanaan pengembangan penanaman modal;
- c. penyelenggaraan promosi potensi daerah;
- d. pelaksanaan fasilitasi kegiatan penanaman modal;
- e. pelaksanaan inventarisasi kegiatan penanaman modal;
- f. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian kegiatan penanaman modal;
- g. pelaksanaan pelayanan informasi dan promosi penanaman modal;
- h. penyusunan peta dan informasi penanaman modal;
- i. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi; dan
- j. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan/atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. Bidang Perizinan Pemanfaatan Ruang

mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian pelayanan perizinan dan non perizinan ruang lingkup pemanfaatan ruang dan merencanakan, mengoordinasikan, melaksanakan dan mengendalikan kegiatan Bidang Perizinan Pemanfaatan Ruang. Dengan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan program dan kegiatan di bidang perizinan pemanfaatan ruang;
- b. penyusunan usulan konsep rencana strategis di bidang perizinan lingkup penataan ruang;
- c. pelaksanaan pengawasan, pengendalian, pembinaan, serta evaluasi pelaksanaan teknis dan administrasi perizinan;
- d. penyusunan perencanaan target retribusi bidang perizinan yang menjadi kewenangannya;
- e. pelaksanaan pengelolaan penetapan dan pemungutan retribusi bidang perizinan yang menjadi kewenangannya;

- f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan realisasi penerimaan retribusi maupun pelaksanaan pemungutan retribusi bidang perizinan yang menjadi kewenangannya;
- g. pengoordinasian pelaksanaan tugas bidang perizinan dengan instansi pemerintah dan/atau unit kerja terkait;
- h. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi; dan
- i. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan/atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4. Bidang Perizinan Usaha

Bidang Perizinan Usaha mempunyai tugas menyelenggarakan pelayanan perizinan dan non perizinan ruang lingkup perizinan usaha dan merencanakan, mengoordinasikan, melaksanakan dan mengendalikan kegiatan Bidang Perizinan Usaha. Bidang Perizinan Usaha menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan program dan kegiatan bidang perizinan usaha;
- b. penyusunan usulan konsep rencana strategis di bidang perizinan usaha;
- c. pelaksanaan pengawasan, pengendalian, pembinaan, serta evaluasi pelaksanaan teknis dan administrasi perizinan;
- d. penyusunan perencanaan target retribusi bidang perizinan yang menjadi kewenangannya;
- e. pelaksanaan pengelolaan penetapan dan pemungutan retribusi bidang perizinan dan yang menjadi kewenangannya;
- f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan realisasi penerimaan retribusi maupun pelaksanaan pemungutan retribusi bidang perizinan yang menjadi kewenangannya;
- g. pengoordinasian pelaksanaan tugas bidang perizinan dengan instansi pemerintah dan/atau unit kerja terkait;

- h. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi;
- i. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan/atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

5. Bidang Pengaduan, Layanan Informasi dan Kebijakan

Bidang Pengaduan, Layanan Informasi dan Kebijakan mempunyai tugas menyelenggarakan layanan pengaduan, pengelolaan data, pelaporan, perencanaan dan harmonisasi kebijakan perizinan dan non perizinan dan merencanakan, mengoordinasikan, melaksanakan dan mengendalikan kegiatan Bidang Pengaduan, Layanan Informasi dan Kebijakan. Bidang Pengaduan, Layanan Informasi dan Kebijakan menyelenggarakan fungsi :

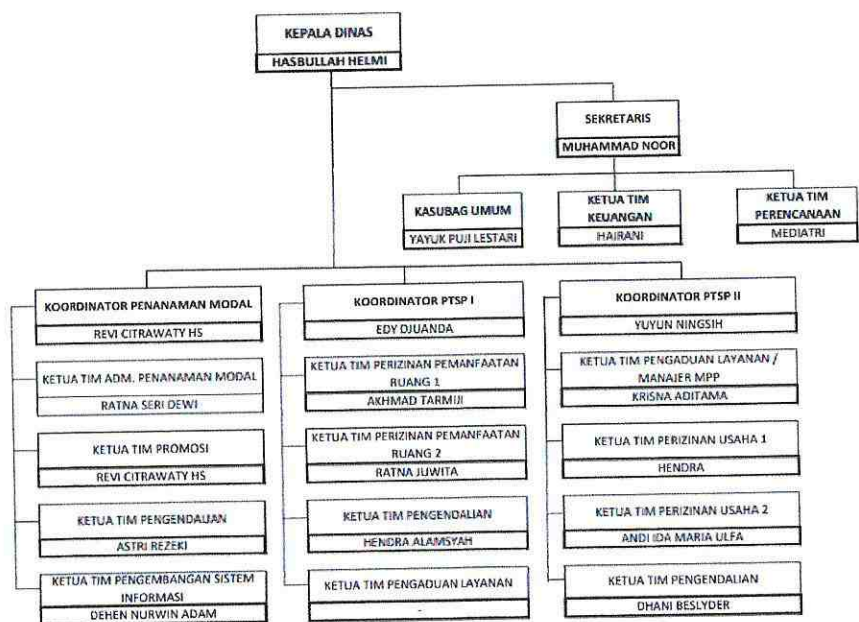
- a. penyusunan program dan kegiatan bidang Pengaduan, Layanan Informasi dan Kebijakan;
- b. penyusunan usulan konsep rencana strategis di bidang Pengaduan, Layanan Informasi dan Kebijakan;
- c. pelaksanaan pengawasan, pengendalian, pembinaan, serta evaluasi pelaksanaan Pengaduan, Layanan Informasi dan Kebijakan;
- d. pengoordinasian pelaksanaan tugas bidang Pengaduan, Layanan Informasi dan Kebijakan dengan instansi pemerintah dan/atau unit kerja terkait;
- e. pengendalian pelaksanaan perencanaan, pengembangan dan pemeliharaan website, aplikasi perizinan dan database;
- f. pembinaan dan fasilitasi penyusunan Standar Pelayanan Publik;
- g. pelaksanaan penyusunan standar pelayanan dan standar operasional prosedur;
- h. pengoordinasian pengelolaan, pengembangan sistem teknologi informasi;
- i. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi dalam penyelesaian permasalahan/hambatan pelaksanaan kegiatan perizinan;
- j. pelaksanaan publikasi melalui media sosial, cetak dan elektronik atas kebijakan, himbauan, slogan pemerintah dibidang pelayanan perizinan;

- k. pengendalian dan fasilitasi pengaduan masyarakat baik secara langsung maupun *online*;
- l. pelaksanaan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi; dan
- m. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan/atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1.4.2. Struktur Organisasi

Secara Tugas Pokok dan Fungsi Pelaksanaan Penyelenggaraan DPMPTSP mengacu pada Peraturan Wali Kota Balikpapan Nomor 1 tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta tata Kerja Perangkat Daerah namun sehubungan dengan penyederhanaan jabatan sesuai dengan Peraturan Dalam Negeri Nomor 25 tahun 2021 tentang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu, maka susunan organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Balikpapan terdiri atas:

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretariat, yang membawahkan:
 - 1. Jafung analis Perencana;
 - 2. Jafung Analis Kebijakan Ahli Muda; dan
 - 3. Subbagian Umum;
- c. Kelompok Jabatan Fungsional.



Gambar 1.1
Bagan Struktur Organisasi DPMPTSP Kota Balikpapan
Sumber : Data Struktur Organisasi pada balikpapan.investasi.go.id

1.4.3 Potensi Sumber Daya Manusia Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Keberhasilan dalam melaksanakan program dan kegiatan untuk dapat mewujudkan visi dan misi tidak terlepas dari peran aktif dari Sumber Daya Manusia (SDM) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Balikpapan yang merupakan satu kesatuan individu yang melakukan kerjasama dalam melaksanakan kegiatan untuk secara bersama-sama mencapai tujuan yang ditetapkan. Salah satu prasyarat utama untuk mendukung keberhasilan dalam pencapaian tujuan tersebut yaitu dengan tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) yang terampil, mampu, kompeten dan berdayaguna.

Adapun Dukungan Sumber Daya Manusia (SDM) aparatur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Balikpapan berdasarkan keadaan Desember 2024 sebanyak **71 orang**, dengan klasifikasi berdasarkan jenjang pendidikan sebagaimana dapat di lihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 1.2
Jumlah PNS dan Non PNS
Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Uraian	Jumlah Pegawai	S.2	S.1	D.3	SMA/SMK	SMP
1	Kepala Dinas	1	1				
2	Sekretaris	1		1			
3	Kasubag Umum	1		1			
4	Jafung	13	3	7	3		
5	Staf Pelaksana	23		6	4	12	1
6	Naban	28		7	2	19	
7	THL	4			2	2	
Jumlah Keseluruhan		71	4	22	11	33	1

Sumber : Pengolahan data dari bidang sekretariat DPMPTSP

Dari tabel datas tersebut diketahui bahwa secara umum kondisi PNS Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Balikpapan rata-rata memiliki kemampuan dan pengetahuan yang cukup baik, hal ini dapat dilihat dari tingkat pendidikan yaitu sebagian besar pegawai Pegawai Negeri Sipil (PNS) berpendidikan **Sarjana (S1)**. Pendidikan merupakan salah satu faktor yang menentukan keberhasilan kinerja seseorang dimana diharapkan kualifikasi pendidikan sesuai dengan syarat jabatan. Sehingga pengetahuan, kemampuan dan kompetensi yang dimiliki PNS menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, namun peningkatan kompetensi baik melalui tugas belajar/izin belajar maupun pendidikan dan pelatihan untuk pegawai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Balikpapan sangat diperlukan untuk meningkatkan kualitas aparatur dan pelayanan perizinan.

1.5 Aspek Strategis dan Permasalahan Utama

Dalam mendukung pencapaian tujuan organisasi dan peningkatan kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Balikpapan maka terdapat beberapa aspek strategis sebagai berikut :

1.5.1 Sarana Prasarana Penunjang Pelayanan

Sarana dan prasarana merupakan segala sesuatu yang digunakan, dipakai, ditempati dalam hubungan langsung dengan pelayanan penanaman modal dan perizinan yang dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Balikpapan, baik itu perlengkapan, peralatan, kendaraan operasional pelayanan, jaringan komunikasi, tempat duduk tamu, dan sarana pendukung pelayanan lainnya harus memadai dan sesuai standar pelayanan agar dapat meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat pengguna jasa pelayanan kepegawaian.

Adapun sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Balikpapan dalam penyelenggaraan pelayanan publik bidang penanaman modal dan perizinan dapat dijelaskan pada tabel dibawah :

Tabel 1.3
Sarana dan Prasarana DPMPTSP Kota Balikpapan

No.	Uraian	Banyaknya	Satuan
1	2	3	4
1	Tanah	2855.3	m ²
2	Gedung	4	Lantai
		3984.5	m ²
3	Listrik	237	Jaringan
4	Air	53	Jaringan
5	Telepon	1	Line (1 Fax)
6	Area parkir	2	Area

No.	Uraian	Banyaknya	Satuan
7	Ruang Rapat	3	Ruang
8	Ruang Arsip	1	Ruang
9	Koperasi	-	Buah
10	Taman Dalam	-	Area

Sumber : Pengolahan data dari bidang sekretariat

Sarana dan Prasarana (Sarpras) kerja yang tersedia di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu saat ini secara kuantitatif sudah sebanding dengan beban pekerjaan. Namun secara kualitas ada beberapa sarpras yang masih butuh diperbaiki dan peremajaan seperti: perkembangan teknologi informasi dan tuntutan pelayanan prima. Adapun Sarana prasarana kerja yang tersedia di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Balikpapan untuk menunjang kelancaran tugas adalah sebagai berikut:

1. Ruang Pelayanan

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Balikpapan didesain dengan ruang pelayanan yang digunakan untuk Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan. Ruang pelayanan berada di ruangan yang cukup luas di lantai satu dimana bergabung dengan seluruh pelayanan dari stakeholder yang bergabung dalam Mall Pelayanan Publik (MPP) Kota Balikpapan, yang didukung dengan fasilitas lengkap yang memadai, proses Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan yang adil, transparan dan akuntabel.



Gambar 1.2
Ruang Pelayanan DPMPTSP Kota Balikpapan
Sumber : Dokumentasi Internal DPMPTSP Kota Balikpapan

2. *Front Office*

Di loket *Front Office*, petugas siap memberikan berbagai informasi dan pelayanan yang diinginkan oleh pemohon terkait permohonan perizinan dan non perizinan serta berbagai pelayanan lain yang tersedia di Mal Pelayanan Publik dengan penuh keramahan.



Gambar 1.3
Front Office DPMPTSP Kota Balikpapan
Sumber : Dokumentasi Internal DPMPTSP Kota Balikpapan

3. Prasarana Layanan Pendukung perizinan

Di Mall Pelayanan Publik tersedia beberapa prasarana layanan pendukung perizinan yang diharapkan mampu membantu para masyarakat (pemohon) dalam mengurus perizinan dan nonperizinan dengan 26 Unit Pelayanan Publik dan 142 jenis layanan yang tersedia. Yang terbagi menjadi dua tingkat bangunan dengan detail layanan serta jumlah SDM Pelayanan sebagai berikut :

Lantai 1

NAMA GERAJ	JUMLAH PETUGAS
DPMPTSP	8
DLH	1
DISHUB	1
DPU	1
DPPR	1
BPD KALTIMTARA	3
PENGADILAN AGAMA	2
HELPDESK / PENDAMPINGAN OSS	2
BPPDRD	2
DJP KALTIM	2
TASPEN	1
DISDUKCAPIL	3
SAMSAT	1
DISNAKER	1

Lantai 2

NAMA GERAJ	JUMLAH PETUGAS
BPJS KETENAGAKERJAAN	1
BPOM	1
KEJARI	2
PLN	1
PDAM	1
BPJS KESEHATAN	1
DPMPTSP PROVINSI KALTIM	1
PEGADAIAN	1
ATR/BPN	1
BNN	1
IMIGRASI	2
KEMENAG	2
POLRESTA	1



Gambar 1.4
Prasarana Layanan Pendukung perizinan
Sumber : Dokumentasi Internal DPMPTSP Kota Balikpapan

4. Perpustakaan

Terdapat area perpustakaan diruang Front Office yaitu berupa Pojok Baca Digital dan perpustakaan mini.



Gambar 1.5
Pojok Baca Digital DPMPTSP Kota Balikpapan
Sumber : Dokumentasi Internal DPMPTSP Kota Balikpapan

5. Pengutamaan kepada pemohon Difabel

Terdapat area parkir khusus Difabel, Terdapat tangga khusus dari ruang parkir kedalam ruang Front Office, terdapat kursi tunggu prioritas, toilet khusus, Kursi roda bagi pemohon berkebutuhan khusus/Difabel.



Gambar 1.6
Fasilitas Difabel DPMPTSP Kota Balikpapan
Sumber : Dokumentasi Internal DPMPTSP Kota Balikpapan

6. Ruang Laktasi dan Ruang Bermain Anak

Untuk mewujudkan pelayanan publik yang ramah anak dan layanan berbasis gender maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Balikpapan, maka terdapat ruang bermain anak dan ruang laktasi yang disediakan untuk pegawai maupun pemohon yang ingin memberikan ASI pada bayinya



Gambar 1.7
 Fasilitas Ruang Laktasi dan Ruang Bermain Anak
 Sumber : Dokumentasi Internal DPMPTSP Kota Balikpapan

7. Virtual MPP, *Meeting Room* dan *Consult Room*

Ruangan tersebut memiliki beberapa fungsi sekaligus yaitu sebagai ruang rapat virtual MPP untuk pelayanan terkait konsultasi MPP secara online, ruang rapat sekaligus ruang konsultasi dan pengaduan bagi pemohon.

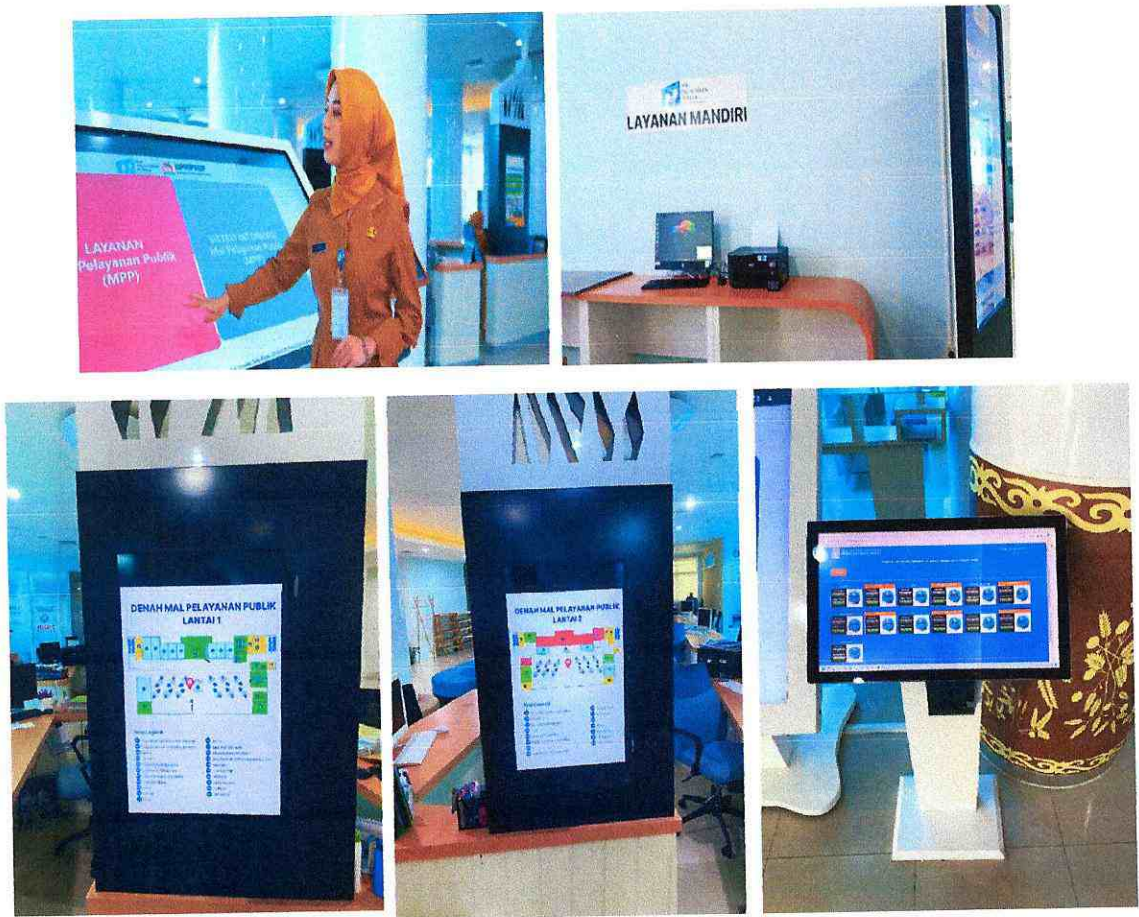


Gambar 1.8
 Virtual MPP, *Meeting Room* dan *Consult Room*
 Sumber : Dokumentasi Internal DPMPTSP Kota Balikpapan

8. Denah Mal Pelayanan Publik, Mesin Antrian Online dan Pojok Layanan Mandiri

Denah Mal Pelayanan Publik disediakan untuk mempermudah pemohon untuk dapat mengetahui letak gerai layanan yang hendak dituju oleh

pemohon, Mesin antrian online terletak pada pintu masuk untuk memberikan informasi bagi pemohon untuk mengambil nomor antrian sedangkan pojok layanan mandiri merupakan fasilitas yang disediakan oleh DPMPTSP untuk membantu pemohon dalam memproses dan mencetak dokumen secara mandiri.



Gambar 1.9
Denah MPP, Mesin Antrian Online dan Layanan Mandiri
Sumber : Dokumentasi Internal DPMPTSP Kota Balikpapan

1.5.2. Gambaran Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Balikpapan

Sesuai tugas dan fungsinya secara garis besar pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Balikpapan, antara lain:

1. penyelenggaraan pengembangan dan promosi potensi daerah;

2. penyelenggaraan pembinaan, fasilitasi, pengawasan dan pengendalian penanaman modal
3. pengembangan sistem informasi penanaman modal dan pelayanan perizinan terpadu
4. pelaksanaan sistem pelayanan perizinan terpadu sesuai kewenangan yang didelegasikan
5. penyelenggaraan koordinasi dan fasilitasi pemrosesan berkas perizinan yang didelegasikan secara terpadu
6. penandatanganan perizinan sesuai kewenangan yang diberikan
7. pengelolaan data secara manual dan elektronik sesuai kewenangan
8. penyelenggaraan koordinasi dengan Perangkat Daerah teknis terkait dalam proses pengawasan dan pengendalian perizinan/non perizinan yang diterbitkan
9. pengoordinasian dan penyampaian dokumen salinan perizinan kepada perangkat Daerah terkait dalam rangka pelaksanaan pengawasan dan pengendalian teknis
10. penyediaan informasi pelayanan perizinan kepada masyarakat;
11. Pelayanan konsultasi, penyuluhan dan sosialisasi peraturan perundang-undangan di bidang Perizinan dan non perizinan serta pelayanan administrasi lainnya sesuai peraturan perundang-undangan.

Seiring dengan diberlakukannya berbagai peraturan tentang pelayanan publik sebagaimana diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2009) maka untuk memenuhi keinginan dan kebutuhan masyarakat (pelanggan). Maka Undang-undang dan turunannya digunakan sebagai dasar pelaksanaan pemberian pelayanan perizinan baik di bidang Penanaman Modal maupun bidang Perizinan. Prinsip-prinsip pemberian pelayanan sebagai berikut :

1. **Kesederhanaan**, dalam arti bahwa prosedur/tata cara pelayanan diselenggarakan secara mudah, lancar, cepat dan tidak berbelit-belit serta mudah dipahami dan dilaksanakan.
2. **Kejelasan dan kepastian**, menyangkut :

- Prosedur/tata cara kepengurusan perizinan.
 - Persyaratan perizinan, baik teknis maupun administratif.
 - Pegawai atau pejabat yang bertanggung jawab dalam memberikan pelayanan.
 - Rincian biaya/tarif dan tata cara pembayarannya.
 - Jadwal waktu penyelesaian.
 - Hak dan kewajiban baik dari pemberi maupun penerima pelayanan berdasarkan bukti-bukti penerimaan permohonan/ kelengkapannya, sebagai alat untuk memastikan pemrosesan izin.
 - Pejabat yang menerima keluhan pelanggan (masyarakat).
3. **Keamanan**, dalam arti bahwa proses serta hasil pelayanan perizinan dapat memberikan keamanan dan kenyamanan serta dapat memberikan kepastian hukum dalam berusaha.
4. **Keterbukaan**, dalam arti bahwa prosedur/tata cara, persyaratan, satuan kerja/pejabat penanggung jawab pemberi pelayanan, waktu penyelesaian dan rincian biaya/tarif serta hal-hal lain yang berkaitan dengan proses penerbitan izin wajib diinformasikan secara terbuka agar mudah diketahui dan dipahami oleh masyarakat, baik diminta maupun tidak diminta.
5. **Efisien**, meliputi :
- Di dalam pemberian pelayanan seminimal mungkin didalam penggunaan biaya biaya operasional.
 - Persyaratan pelayanan publik hanya dibatasi pada hal-hal yang berkaitan langsung dengan pelayanan perizinan yang diberikan.
 - Mencegah adanya pengulangan pemenuhan kelengkapan persyaratan, dalam proses pelayanan perizinan serta kelengkapan persyaratan dari satuan kerja/instansi lain yang terkait
6. **Ekonomis**, dalam arti pengenaan tarif biaya harus ditetapkan secara wajar dengan memperhatikan :
- Biaya yang dikenakan atas jasa yang diberikan dalam memberikan pelayanan dalam taraf kewajaran.

- Kondisi dan kemampuan pelanggan (masyarakat) untuk membayar secara umum.
- 7. **Keadilan** yang merata dalam arti di dalam memberikan pelayanan perizinan semua pelayanan diberlakukan sama tanpa ada pilih kasih dan diperlakukan secara adil.
- 8. **Ketepatan waktu**, dalam arti penyelesaian pelayanan perizinan dapat diselesaikan dalam kurun waktu yang telah ditentukan, sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan.

Sehubungan dengan diterbitkannya Peraturan Walikota Balikpapan Nomor 12 tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Pelayanan Publik NonPerizinan Berusaha tanggal 7 Juni Tahun 2024, berdasarkan Peraturan Wali Kota Balikpapan tersebut pedelegasian kewenangan oleh Wali Kota kepada Kepala DPMPTSP Kota Balikpapan meliputi :

- Penyelenggaraan Perizinan Berusaha yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuanperaturan perundang-undangan;
- Penyelenggaraan Perizinan Berusaha yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat yang dilimpahkan kepada Wali Kota berdasarkan asas tugas pembantuan; dan
- Penyelenggaraan Pelayanan Publik NonPerizinan Berusaha yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Jenis pelayanan Perizinan Berusaha yang di delegasikan kewenangannya beserta Perangkat daerah teknis terkait dapat disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 1.4
Jenis Pelayanan Perizinan Berusaha serta
Perangkat Daerah Teknis Terkait pada DPMPTSP Kota Balikpapan

No	Nama Perizinan Berusaha	Perangkat Daerah Teknis Terkait
1	Sektor Perdagangan	Dinas Perdagangan

No	Nama Perizinan Berusaha	Perangkat Daerah Teknis Terkait
2	Sektor Koperasi	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Perindustrian
3	Sektor Ketenagakerjaan	Dinas Ketenagakerjaan
4	Sektor Pertanian	Dinas Pangan, Pertanian, dan Perikanan
5	Sektor Perhubungan	Dinas Perhubungan
6	Sektor Pendidikan dan Kebudayaan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
7	Sektor Kesehatan, Obat dan Makanan	Dinas Kesehatan
8	Sektor Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Dinas Pekerjaan Umum
9	Sektor Aenergi dan Sumber Daya Mineral	Dinas Lingkungan Hidup
10	Sektor Perindustrian	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Perindustrian
11	Sektor Pariwisata	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata
12	Sektor Kelautan dan Perikanan	Dinas Pangan, Pertanian, dan Perikanan
13	Sektor Transportasi	Dinas Perhubungan
14	Sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Dinas Lingkungan Hidup

Sumber : Lampiran Perwali Nomor 12 tahun 2024

Sedangkan untuk Pelayanan Publik NonPerizinan Berusaha yang di delegasikan kewenangannya beserta Perangkat daerah teknis terkait dapat disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 1.5
Jenis Pelayanan Publik NonPerizinan Berusaha serta
Perangkat Daerah Teknis Terkait pada DPMPSTSP Kota Balikpapan

No	Nama Pelayanan Publik Non Perizinan Berusaha	Perangkat Daerah Teknis Terkait
1	Tanda Daftar Lembaga Pelatihan Kerja	Dinas Ketenagakerjaan
2	Izin Membuka Tanah Negara	Dinas Pertanahan dan Penataan

No	Nama Pelayanan Publik Non Perizinan Berusaha	Perangkat Daerah Teknis Terkait
		Ruang
3	Surat Izin Praktek Tenaga Kesehatan	Dinas Kesehatan
4	Surat Terdaftar Penyehat Tradisional	Dinas Kesehatan
5	Surat Pendirian Satuan Pendidikan Dasar	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
6	Surat Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
7	Izin Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
8	Izin Reklame Non Konstruksi	Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang
9	Siteplan Perumahan dan Bangunan Umum	Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang, Dinas Perumahan dan Permukiman
10	Izin Penebangan dan/atau Pemangkasan dan/atau Pemindahan Pohon	Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Perumahan dan Permukiman
11	Persetujuan Bangunan Gedung	Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang, Dinas Perumahan dan Permukiman
12	Sertifikat Laik Fungsi	Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang, Dinas Perumahan dan Permukiman
13	Pertelaan	Dinas Perumahan dan Permukiman
14	Surat Ijin Juru Bor	Dinas Pekerjaan Umum
15	Surat Tanda Daftar Penyehat Tradisional	Dinas Kesehatan
16	Surat Izin Peil Banjir	Dinas Pekerjaan Umum
17	Izin Jagal	Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan
18	Izin Rencana Fungsi dan Pemanfaatan Rumah Susun	Dinas Perumahan dan Permukiman
19	Izin Pengubahan Rencana Fungsi dan Pemanfaatan Rumah Susun	Dinas Perumahan dan Permukiman
20	Notifikasi Perintah Pembayaran Penggunaan Tenaga Kerja Asing	Dinas Ketenagakerjaan
21	Surat Terdaftar Penyehat Tradisional	Dinas Kesehatan

No	Nama Pelayanan Publik Non Perizinan Berusaha	Perangkat Daerah Teknis Terkait
22	Surat Keterangan Penelitian	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
23	Akta Pemisahan Satuan Hak Rumah Susun Hunian dan Non Hunian	Dinas Perumahan dan Permukiman

Sumber : Lampiran Perwali Nomor 12 tahun 2024

Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal yang dilaksanakan oleh DPMPTSP Kota Balikpapan yang dilaksanakan sesuai dengan kedudukannya sebagai perangkat daerah di bidang administrasi dokumen perizinan dalam hal ini bekerjasama dengan Perangkat Daerah teknis terkait di lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan terutama dalam hal : penyelenggaraan koordinasi dengan Perangkat Daerah teknis terkait dalam proses pengawasan dan pengendalian perizinan/non perizinan yang diterbitkan serta pengoordinasian dan penyampaian dokumen salinan perizinan kepada perangkat Daerah terkait dalam rangka pelaksanaan pengawasan dan pengendalian teknis. Sehingga dengan kerjasama yang baik yang telah terjalin dengan Perangkat Daerah teknis terkait diharapkan dapat mewujudkan peningkatan kualitas pelayanan perizinan terpadu yang prima.

Selain dua aspek strategis diatas, terdapat beberapa permasalahan utama yang dihadapi oleh DPMPTSP Kota Balikpapan sebagai berikut :

- 1) Belum optimalnya realisasi penanaman modal, dengan masalah sebagai berikut :
 - a. Belum optimalnya investasi dalam bentuk pengendalian dan pengawasan penanaman modal
 - b. Belum optimalnya kuantitas promosi penanaman modal
 - c. Sengketa pra perizinan
 - d. Belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi
 - e. Kualitas materi dan media promosi belum mampu menarik dan menjangkau calon investor potensial

- f. Belum terbaharuinya Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal
- 2) Belum optimalnya layanan perizinan
- a. Belum seluruh perizinan dilimpahkan ke DPMPTSP
 - b. Belum semua layanan menggunakan sistem online
 - c. Kualitas Mal Pelayanan Publik yang belum optimal
 - d. Belum optimalnya sistem pendukung penyelenggaraan pelayanan perizinan
 - e. Permasalahan pasca perizinan

1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Balikpapan tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Bab I – Pendahuluan, menjelaskan secara ringkas latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, data organisasi yang meliputi tugas pokok dan fungsi, struktur organisasi, Aspek Strategis dan Permasalahan Utama Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Balikpapan, profil Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Balikpapan serta sistematika penulisan.

Bab II – Perencanaan Kinerja, menjelaskan tujuan dan sasaran serta indikator kinerja utama dalam rencana strategis periode tahun 2016 – 2022, Rencana Kinerja tahun 2024 serta penetapan kinerja atau perjanjian kerja tahun 2024

Bab III – Akuntabilitas Kinerja, menjelaskan pengukuran capaian kinerja tahun 2024 dan analisis pencapaian kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Balikpapan terhadap Indikator Kinerja Utama (IKU) dikaitkan dengan pertanggungjawaban keuangan terhadap pencapaian sasaran strategis untuk tahun 2024 serta Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Bab IV – Penutup, menjelaskan simpulan menyeluruh dari Laporan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Balikpapan tahun 2024 ini dan menguraikan rekomendasi, dan saran yang diperlukan bagi perbaikan kinerja di masa yang akan datang.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Perencanaan Strategis

Rencana strategis (Renstra) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Balikpapan Tahun 2021-2026 disusun sebagai perencanaan jangka menengah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Balikpapan yang merupakan gambaran tujuan, sasaran strategis dan target hasil yang akan dicapai dalam kurun waktu lima tahun sesuai dengan tugas dan fungsi, serta peran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Balikpapan sebagaimana yang diamanahkan oleh undang-undang.

Penyusunan Laporan Kinerja (LKjIP) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Balikpapan Tahun 2024 ini mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Adapun Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Balikpapan. Renstra Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Balikpapan Tahun 2021-2026 ditetapkan melalui Peraturan Wali Kota Balikpapan Nomor 11 tahun 2022 tentang Penetapan Rencana Strategis 2021-2026.

Pada dokumen Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Balikpapan Tahun 2021-2026 telah memuat Visi, Misi sebagai berikut :

Visi Terwujudnya Balikpapan Sebagai Kota Terkemuka Yang Nyaman Dihuni, Modern, dan Sejahtera dalam Bingkai Madinatul Iman

Misi :

- Mewujudkan penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik;
- Mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas tinggi;

- Menyediakan infrastruktur kota yang memadai;
- Mewujudkan kota nyaman dihuni yang berwawasan lingkungan;
- Mengembangkan ekonomi kerakyatan yang kreatif

Berangkat dari Tujuan dan Sasaran Pemerintah Daerah tersebut dan sesuai tugas dan pokok fungsinya, Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Balikpapan mendukung pencapaian Sasaran Pemerintah Daerah yaitu **Misi ke-1** yaitu Mewujudkan penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik serta **Misi ke-5** yaitu Mengembangkan ekonomi kerakyatan yang kreatif. Sasaran Strategis Mengacu pada tujuan yang telah ditetapkan, maka sasaran yang hendak dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu lima tahun telah disepakati dalam dokumen Rencana Strategis DPMPTSP Kota Balikpapan Tahun 2021-2026 dalam bentuk tabel sebagai berikut :

Tabel 2.1.3
Tujuan, Sasaran dan Target Renstra DPMPTSP Perubahan Tahun 2021-2026

No	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun				
					2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Meningkatnya Nilai Realisasi Investasi Daerah	Meningkatnya Capaian Nilai Realisasi Investasi	Persentase Pencapaian nilai realisasi investasi	476,11 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
2	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Atas Layanan Pemerintahan	Meningkatnya Kualitas Layanan Perizinan	Persentase peningkatan Indeks Kepuasan Masyarakat	0,73%	0,11 %	0,11 %	0,11 %	0,11 %	0,11 %

No	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun				
					2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3	Meningkatnya Nilai Realisasi Investasi Daerah	Meningkatnya Kualitas Penerapan Reformasi Birokrasi pada DPMPTSP Kota Balikpapan	Nilai Reformasi Birokrasi DPMPTSP Kota Balikpapan	34.11	34.12	34.13	34.14	34.15	34.16

Sumber : Renstra DPMPTSP 2021-2026

Tujuan, Sasaran dan Target Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Balikpapan Perubahan diatas kemudian dapat diturunkan lagi menjadi program, kegiatan dan sub kegiatan yang mendukung pencapaian Tujuan dan Sasaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Balikpapan Tahun 2024 tersebut. Pada Tahun 2024 terdapat 6 (enam) program, 10 (sepuluh) kegiatan dan 24 (dua puluh empat) sub kegiatan dengan rincian sebagaimana berikut :

Tabel: 2.1.4
Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Tahun 2023	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
Meningkatnya Nilai Realisasi Investasi Daerah	Meningkatnya Capaian Nilai Realisasi Investasi	Persentase Pencapaian nilai realisasi investasi	100%	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal
					Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota

Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Tahun 2023	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
				PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten /Kota	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota
				PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi Pelaku Usaha dalam Merealisasikan Kegiatan Usahanya Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha Pengawasan Penanaman Modal
				PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan, Penyajian, dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik
Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Atas Layanan Pemerintahan	Meningkatnya Kualitas Layanan Perizinan	Persentase peningkatan Indeks Kepuasan Masyarakat	0.11%	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik

Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Tahun 2023	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
					Kabupaten/Kota	Penyediaan dan Pengelolaan Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Pemantauan, Analisis, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
Meningkatnya Nilai Realisasi Investasi Daerah	Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai SAKIP DPMPTSP Kota Balikpapan	75,5	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
					Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
						Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
						Penyediaan Bahan Logistik Kantor
						Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
						Fasilitasi Kunjungan Tamu
						Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
					Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Surat Menyurat
						Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
						Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Tahun 2023	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
					Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
						Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
						Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

Sumber : DPA Perubahan DPMPTSP Kota Balikpapan Tahun 2024

2.2 Indikator Kinerja Utama

Indikator Kinerja Utama adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis operasional. Setiap lembaga atau Instansi pemerintah wajib merumuskan Indikator Kinerja Utama sebagai suatu prioritas program dan kegiatan yang mengacu pada sasaran strategis dalam RPJMD dan RENSTRA Satuan Kerja Perangkat Daerah. Indikator Kinerja Utama pada Unit Organisasi setingkat Eselon II/SKPD/Unit kerja mandiri sekurang-kurangnya adalah Indikator keluaran (Out Put) untuk mendukung pencapaian sasaran strategis.

Sehubungan dengan terbitnya Surat Edaran nomor : 060.4/01799/Org tentang Penyusunan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2023 dalam menyusun Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2023 dimana tidak lagi menggunakan indeks RB sebagai IKU, namun menggunakan Nilai SAKIP Perangkat Daerah sebagai IKU dan menyesuaikan target dengan realisasi dari Hasil Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah yang dikeluarkan oleh Inspektorat Kota Balikpapan, sehingga setelah dilakukan penyesuaian

terhadap target dan indikator target perubahan.

Indikator Kinerja Utama (IKU) Perubahan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Balikpapan Tahun 2021-2026 telah ditetapkan dalam Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Balikpapan Nomor : 188.4-106/2023 tentang Perubahan Indikator Kinerja Utama Rencana Strategis (Renstra) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Balikpapan Tahun 2021-2026. Berikut kami sajikan Indikator Kinerja Utama (IKU) Perubahan Tahun 2024 pada tabel berikut :

Tabel 2.2
Indikator Kinerja Utama (IKU) Perubahan Tahun 2021-2026

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI PENGHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1	Meningkatnya Capaian Nilai Realisasi Investasi	Persentase Pencapaian nilai realisasi investasi	Nilai realisasi investasi di daerah dihitung setiap 3 bulan sekali atau per-triwulan. Nilai relisasi investasi ini dihitung dari jumlah nilai investasi yang telah dilaporkan secara periodik oleh setiap perusahaan yang melakukan usaha di suatu wilayah melalui sistem Lapaaoran Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) online.	(Pencapaian nilai realisasi investasi tahun berjalan / Target nilai realisasi investasi tahun berjalan) x 100%	Data dari Press Release Realisasi Investasi DPMP TSP Provinsi Kalimantan Timur	Koordinator Penanaman Modal
2	Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai SAKIP DPMP TSP	Nilai hasil akhir dari penjumlahan komponen-komponen memberikan gambaran tingkat AKIP, yang merupakan rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasiasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah	Berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri PANRB No. 88 Tahun 2021 Tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Eviden LHE Evaluasi SAKIP	Sekretariat
3	Meningkatnya Kualitas Layanan Perizinan	Persentase peningkatan Indeks Kepuasan Masyarakat	Persentase angka kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Balikpapan untuk seluruh layanan perizinan dan non perizinan yang menjadi kewenangan DPMP TSP dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi no 25 tahun 2004 tentang Pedoman Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik. Adapun unsur kepuasan masyarakat yang dimaksud adalah Persyaratan, Prosedur, Waktu Pelayanan, Biaya/Tarif, Kompetensi dan Pelayanan, Perilaku Pelaksana, Maklumat Pelayanan, Kejelasan Pelayanan, Tanggung Jawab Petugas dan Kecepatan Pelayanan	(nilai SKM tahun n - nilai SKM tahun n-1) / nilai SKM tahun n-1 X100%	Hasil Survei pada aplikasi terpadu satu pintu	Koordinator PTSP I dan PTSP II

Sumber : SK IKU Perubahan DPMP TSP Kota Balikpapan

2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Pada sub bab ini disajikan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2024 yang merupakan proses perjanjian rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategi, yang akan dilaksanakan melalui berbagai kegiatan tahunan. Perjanjian kinerja ini memuat sasaran strategis dengan indikator kinerja dan target yang ditetapkan untuk dicapai dalam tahun 2024 serta menyebutkan tentang program dan kegiatan yang mendukung tercapainya sasaran strategis.

Adapun Perjanjian Kinerja Perubahan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Balikpapan Tahun 2024 sebagai berikut :

Tabel 2.3
Perjanjian Kinerja Tahun 2024/Perubahan

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	Meningkatnya Capaian Nilai Realisasi Investasi	Presentase Pencapaian Nilai Realisasi Investasi	% (Presentase)	100
2	Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai SAKIP DPMPTSP Kota Balikpapan	Nilai SAKIP	75,5
3	Meningkatnya Kualitas Layanan Perizinan	Presentase peningkatan Indeks Kepuasan Masyarakat	% (Presentase)	0,11

Sumber : Perjanjian Kinerja Perubahan DPMPTSP Tahun 2024

Pada Tahun 2024 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Balikpapan melaksanakan kegiatan dengan anggaran murni sebesar **Rp 17.420.283.497,-** (Tujuh Belas Miliar Empat Ratus Dua Puluh Juta Dua Ratus Delapan Puluh Tiga Ribu Empat Ratus Sembilan Puluh Tujuh Rupiah). Melalui mekanisme perubahan APBD 2024 menjadi **Rp 15.359.364.044,20** (Lima Belas Miliar Tiga Ratus Lima Puluh Sembilan Juta Tiga Ratus Enam Puluh Empat Ribu Empat Puluh Empat Koma Dua Puluh Rupiah) atau mengalami penurunan sebesar 13,42% atau senilai **Rp. 2,061,019,452.80** (Dua Miliar Enam Puluh Satu Juta Sembilan Belas Ribu

Empat Ratus Lima Puluh Dua koma Delapan Puluh Rupiah). Adapun pendanaan untuk program, kegiatan dan sub kegiatan disajikan pada tabel sebagaimana di bawah ini: Adapun pendanaan untuk program, kegiatan dan sub kegiatan disajikan pada tabel sebagaimana di bawah ini :

Tabel 2.3.1
Rencana Anggaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2024

Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Tahun 2024	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7
Meningkatnya Nilai Realisasi Investasi Daerah	Meningkatnya Capaian Nilai Realisasi Investasi	Persentase Pencapaian nilai realisasi investasi	100%	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	185,250,000	APBD-P Kota Balikpapan
				Kegiatan Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	100,000,000	APBD-P Kota Balikpapan
				Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	100,000,000	APBD-P Kota Balikpapan
				Kegiatan Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	85,250,000	APBD-P Kota Balikpapan
				Penyediaan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	85,250,000	APBD-P Kota Balikpapan
				PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	693,674,000	APBD-P Kota Balikpapan
				Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	693,674,000	APBD-P Kota Balikpapan
				Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	530,998,000	APBD-P Kota Balikpapan
				Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota	162,676,000	APBD-P Kota Balikpapan

Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Tahun 2024	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7
				PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	1,239,202,000	APBD-P Kota Balikpapan
				Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	1,239,202,000	APBD-P Kota Balikpapan
				Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi Pelaku Usaha dalam Merealisasikan Kegiatan Usahanya	226,318,000	APBD-P Kota Balikpapan, DAK NF BKPM
				Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	662,384,000	APBD-P Kota Balikpapan, DAK NF BKPM
				Pengawasan Penanaman Modal	350,500,000	APBD-P Kota Balikpapan, DAK NF BKPM
				PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	462,913,533	APBD-P Kota Balikpapan
				Kegiatan Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	462,913,533	APBD-P Kota Balikpapan
				Pengelolaan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	462,913,533	APBD-P Kota Balikpapan

Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Tahun 2024	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7
Meningkatnya Nilai Realisasi Investasi Daerah	Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai SAKIP DPMPTSP Kota Balikpapan	75,5	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	13,920,853,164	APBD-P Kota Balikpapan
				Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	8,750,157,000	APBD-P Kota Balikpapan
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	8,750,157,000	APBD-P Kota Balikpapan
				Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	1,403,242,588	APBD-P Kota Balikpapan
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	43,973,100	APBD-P Kota Balikpapan
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	49,681,000	APBD-P Kota Balikpapan
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	588,844,400	APBD-P Kota Balikpapan
				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	74,999,000	APBD-P Kota Balikpapan
				Fasilitasi Kunjungan Tamu	33,500,000	APBD-P Kota Balikpapan
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	612,245,088	APBD-P Kota Balikpapan

Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Tahun 2024	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7
				Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2,616,896,400	APBD-P Kota Balikpapan
				Penyediaan Jasa Surat Menyurat	10,000,000	APBD-P Kota Balikpapan
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	575,454,900	APBD-P Kota Balikpapan
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2,031,441,500	APBD-P Kota Balikpapan
				Kegiatan Pemeliharaan Barang milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1,150,557,176	APBD-P Kota Balikpapan
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	676,501,564	APBD-P Kota Balikpapan
				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	274,163,612	APBD-P Kota Balikpapan
				Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	199,892,000	APBD-P Kota Balikpapan

Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Tahun 2024	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7
Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Atas Layanan Pemerintahan	Meningkatnya Kualitas Layanan Perizinan	Persentase peningkatan Indeks Kepuasan Masyarakat	0.11%	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL Kegiatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	918,390,800	APBD-P Kota Balikpapan
				Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	918,390,800	APBD-P Kota Balikpapan
				Penyediaan dan Pengelolaan Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	667,020,000	APBD-P Kota Balikpapan
				Pemantauan, Analisis, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	137,989,000	APBD-P Kota Balikpapan
					113,381,800	APBD-P Kota Balikpapan

Sumber : DPA Perubahan DPMPPTSP Tahun 2024

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Laporan Hasil Evaluasi atas Implementasi Sistem AKIP Tahun sebelumnya

Nilai hasil evaluasi Akuntabilitas kinerja DPMPTSP Kota Balikpapan hasil pemeriksaan dari Inspektorat dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.1.1
Rincian hasil Evaluasi atas Implementasi Sistem AKIP Tahun
Sebelumnya

No.	Komponan Yang Nilai	Bobot	Nilai 2023
1	Perencanaan Kinerja	30%	23,99
2	Pengukuran Kinerja	30%	22,66
3	Pelaporan Kinerja	15%	10,43
4	Evaluasi Kinerja	25%	18,25
	Nilai Hasil Evaluasi	100%	75,32
	Tingkat Akuntabilitas Kinerja		BB

Sumber :Laporan LHE LKjIP DPMPTSP Kota Balikpapan Tahun 2024

Evaluasi sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada OPD Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Balikpapan dilaksanakan terhadap 4 (empat) komponen manajemen kinerja yang meliputi : Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Evaluasi Kinerja. Dokumen yang dievaluasi yaitu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) tahun 2023, Rencana Strategis (Renstra) tahun 2016-2021, dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT), dokumen Perjanjian Kinerja (PK), Indikator Kinerja Individu (IKI) serta Rencana Aksi.

Dari hasil pencapaian Laporan Hasil Evaluasi SAKIP tahun 2023 atas penilaian tahun 2024 DPMPTSP Kota Balikpapan mencapai **75.32** dengan **Predikat BB (Sangat Baik)**. Nilai tersebut merupakan akumulasi penilaian

terhadap seluruh komponen manajemen kinerja yang dievaluasi oleh Inspektorat Kota Balikpapan. Nilai capaian hasil evaluasi SAKIP tahun 2023 atas penilaian tahun 2024 DPMPTSP Kota Balikpapan ditargetkan mencapai 75,5 namun realisasinya hanya mencapai 75,32 atau mencapai 99,76%. Hal ini terutama disebabkan oleh perubahan penilaian komponen manajemen kinerja yang di evaluasi yang sebelumnya terdapat lima komponen menjadi hanya empat komponen saja yang di evaluasi sehingga sangat berpengaruh terhadap capaian hasil evaluasi SAKIP DPMPTSP Kota Balikpapan tersebut.

Pada laporan hasil evaluasi atas impelementasi akuntabilitas kinerja terdapat beberapa rekomendasi yang disampaikan oleh Inspektorat Kota Balikpapan yang dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.1.2
Matriks Tindak lanjut Implementasi Akuntabilitas Kinerja
DPMPTSP Tahun 2023 atas penilaian tahun 2024

No	Komponen	Saran / Rekomendasi	Tindak Lanjut	Bidang Pengampu dan Tenggat Waktu
1.	Perencanaan Kinerja	Dalam menentukan Target yang ditetapkan dalam perencanaan kinerja hendaknya dapat dicapai (<i>achievable</i>), menantang dan realistis	Terdapat kenaikan target yang dihitung menggunakan angka desimal dan tercapai lebih dari yang ditargetkan	Seluruh Bidang (Tenggat waktu awal tahun pada saat penyusunan Perjanjian Kinerja)

No	Komponen	Saran / Rekomendasi	Tindak Lanjut	Bidang Pengampu dan Tenggat Waktu
2.		Agar Setiap Dokumen Perencanaan Kinerja menggambarkan hubungan yang berkesinambungan, penyelarasan (<i>cascading</i>) dan kinerja bidang lain <i>crosscutting</i>	Seluruh dokumen telah dibuat (<i>cascading</i> dan <i>crosscutting</i>)	Tim Perencanaan dengan didukung oleh seluruh bidang (Tenggat waktu triwulan I tahun 2025)
	Pengukuran Kinerja	Agar rencana aksi kinerja dapat berjalan dinamis maka perlu pemantauan secara berkala	Rencana aksi telah dibuat per triwulan dan dilakukan pertemuan dengan staf terkait	Seluruh bidang (tenggat waktu per triwulan)
		Setiap Pegawai perlu untuk terus meningkatkan pemahaman dan peduli serta berkomitmen dalam mencapai kinerja yang telah direncanakan	Telah dilakukan survei pemahaman kinerja dan dilakukan rapat seluruh staf secara rutin untuk menyatukan visi pencapaian kinerja yang telah direncanakan	Seluruh bidang (rapat Monev kinerja dilaksanakan per triwulan)
		Agar Pengukuran Kinerja yang dijadikan dasar pemberian <i>reward and punishment</i>	Pengukuran Kinerja telah dijadikan sebagai dasar pemberian <i>reward and punishment</i>	Seluruh bidang (tenggat waktu triwulan I tahun 2025)

No	Komponen	Saran / Rekomendasi	Tindak Lanjut	Bidang Pengampu dan Tenggat Waktu
		dapat diimplementasikan		
3	Pelaporan kinerja	Agar informasi dalam laporan kinerja selalu menjadi perhatian utama pimpinan dan menjadi kepedulian seluruh pegawai	Laporan Kinerja telah diposting pada website DPMPTSP sebagai alat akuntabilitas dinas sehingga semua pegawai memiliki kepedulian	Tim Perencanaan dan admin website DPMPTSP (tenggat waktu triwulan I tahun 2025)
		Agar informasi dalam laporan kinerja digunakan dalam penyesuaian perencanaan kinerja yang akan dihadapi berikutnya serta dapat mempengaruhi perubahan budaya kerja organisasi	Hasil Survei Kepuasan Masyarakat dan penilaian Pelayanan Publik (Yanlik) serta rekomendasi Instansi Pemeriksa menjadi acuan dalam penyusunan rencana kerja di tahun berikutnya	Seluruh Bidang (tenggat waktu triwulan I tahun 2025 sesuai penyusunan PK 2025)
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	Hasil evaluasi telah disampaikan atau dibahas dengan pihak yang dievaluasi (yang berkepentingan), namun perlu dilengkapi dengan kesepakatan mengenai tindak	Telah dibuat Perwali nomor 12 Tahun 2024 tanggal 7 Juni 2024 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Pelayanan Publik NonPerizinan Berusaha. Untuk Internal telah dibuat	Seluruh Bidang (tenggat waktu triwulan I Tahun 2025)

No	Komponen	Saran / Rekomendasi	Tindak Lanjut	Bidang Pengampu dan Tenggat Waktu
		lanjut rekomendasi hasil evaluasi yang secara formal menjelaskan siapa dan kapan batas waktu rekomendasi akan ditindaklanjuti	Surat Edaran Kepala DPMPTSP nomor 188.6/1473/DPMPTS P tanggal 17 Desember 2024 tentang tindak lanjut Hasil Laporan Audit Kinerja Pendahuluan Investasi dan Peiayanan Penanaman Modal	

Sumber : Tindak Lanjut LHE SAKIP DPMPTSP Tahun 2024

3.2 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Pengukuran tingkat capaian kinerja Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kota Balikpapan Tahun 2024 dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja sasaran dan didukung dengan data-data yang terkait dengan sasaran strategis.

$$\text{Capaian IKU} = \frac{\text{REALISASI}}{\text{TARGET}} \times 100\%$$

2. Angka maksimum capaian setiap IKU sebesar 100%
3. Sedangkan untuk memberikan penilaian tingkat capaian kinerja setiap sasaran, menggunakan pengukuran *instrument standart* pengukuran ordinal dengan skala pengukuran kinerja sebagai berikut :

Tabel 3.2
Predikat Capaian Kinerja

No	Interval Capaian Kinerja	Predikat	Keterangan
1	< 100%	Tidak Tercapai	Kinerja belum memenuhi target yang telah ditetapkan. Perlu evaluasi dan perbaikan untuk mencapai target

2	= 100%	Tercapai/Sesuai Target	Kinerja telah memenuhi target secara tepat sesuai denagn yang direncanakan
3	> 100 %	Melebihi Target	Kinerja melampaui target yang telah ditetapkan, menunjukkan hasil yang sangat baik dan efisiensi tinggi

Sumber: Sistematika Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2024

3.2.1 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

Rincian pengukuran tingkat capaian kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Balikpapan Tahun 2024 yang disusun berdasarkan sasaran strategis, indikator kinerja utama, satuan, target, realisasi, dan capaian dapat diuraikan pada tabel 3.2.1 sebagai berikut:

Tabel 3.2.1
Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Balikpapan

No .	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Ket (Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja)
1	2	3	4	5	6	7 = 6/5	8
1	Meningkatnya Capaian Nilai Realisasi Investasi	Presentase Pencapaian Nilai Realisasi Investasi	%	100	128.02	128.02 %	Melebihi Target
2	Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai SAKIP DPMPTSP Kota Balikpapan	Nilai SAKIP	75.5	75.32	99.76%	Tidak Tercapai
3	Meningkatnya Kualitas Layanan Perizinan	Presentase peningkatan Indeks Kepuasan Masyarakat	%	0.11	0.39	354.55 %	Melebihi Target

Sumber : Laporan Monev IKU DPMPTSP Tahun 2024

Pada tabel 3.2.1 diperoleh pengukuran capaian kinerja berdasarkan indikator kinerja utama pada sasaran strategis dengan realisasi capaian sebagai berikut:

- 1). **Sasaran I : Meningkatnya Capaian Nilai Realisasi Investasi**
 - **Indikator I “Presentase Pencapaian Nilai Realisasi Investasi”**, dengan realisasi sebesar **128,02 %** dari target 100% sehingga capaian indikator I sebesar **128,02 %** dengan kriteria penilaian realisasi kinerja **Melebihi target**;
- 2). **Sasaran II : Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah**
 - **Indikator I “Nilai SAKIP DPMPTSP Kota Balikpapan”**, dengan realisasi sebesar 75,32 dari target 75,5 sehingga capaian sebesar **99.76%** dengan kriteria penilaian realisasi kinerja **Tidak Tercapai**;
- 3). **Sasaran II : Meningkatnya Kualitas Layanan Perizinan**
 - **Indikator I “Presentase peningkatan Indeks Kepuasan Masyarakat”**, dengan realisasi sebesar 0,39 dari target 0,11 sehingga capaian sebesar **354,55%** dengan kriteria penilaian realisasi kinerja **Melebihi target**.

Dengan demikian maka secara umum Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Balikpapan telah melaksanakan tugas dan fungsi dalam urusan penanaman modal secara baik dalam rangka mencapai tujuan organisasi seperti yang telah ditetapkan dalam Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Balikpapan tahun 2021-2026.

3.2.2 Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

Pada sub bab in membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu

Tabel 3.2.2
Realisasi Kinerja Tahun 2022-2026

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	2022		2023		2024	
			Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian
1	Meningkatnya Capaian Nilai Realisasi Investasi	Presentase Pencapaian Nilai Realisasi Investasi	463.26	463.26	156.39	156.39	128.02	128.02

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	2022		2023		2024	
			Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian
2	Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai SAKIP DPMPTSP Kota Balikpapan	- *)	- *)	73.91	98.55	75.32	99.76
3	Meningkatnya Kualitas Layanan Perizinan	Presentase peningkatan Indeks Kepuasan Masyarakat	4.71	4282	2.01	1827	0.39	354.55

* Keterangan : Terdapat perbedaan indikator kinerja tahun 2023 yaitu Nilai Reformasi Birokrasi DPMPTSP Kota Balikpapan

Sumber : Hasil Pengolahan Data DPMPTSP

Berdasarkan data pada tabel di atas, dapat diketahui bahwa tahun ini adalah tahun kedua realisasi kinerja dari indikator kinerja perubahan sebagaimana telah ditetapkan pada SK IKU perubahan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Balikpapan tahun 2021-2026, sehingga terdapat beberapa indikator kinerja yang belum dapat dibandingkan antara tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.

Adapun beberapa realisasi kinerja dari indikator kinerja di atas dapat dibandingkan dengan realisasi capaian pada tahun awal perencanaan (tahun 2021) yang dapat diketahui bahwa ada peningkatan trend realisasi pada dua indikator kinerja, sedangkan terdapat dua indikator kinerja mengalami trend penurunan dengan penjelasan sebagai berikut:

Sasaran I : Meningkatnya Capaian Nilai Realisasi Investasi

Indikator : Presentase Pencapaian Nilai Realisasi Investasi terjadi selisih penurunan sebesar (18,14%) dengan capaian tahun 2024 terhadap capaian tahun 2023 yaitu **capaian tahun 2023 tercapai sebesar 156,39%** dibandingkan dengan capaian **tahun 2024 hanya mencapai 128,02%**. Terjadi penurunan dikarenakan terdapat penyesuaian dasar perhitungan pada target investasi yang sebelumnya adalah merupakan target Renstra DPMPTSP Tahun 2021-2026 yaitu target realisasi investasi yang menjadi

dasar perhitungan adalah target Realisasi Investasi dari DPMPTSP Provinsi Kalimantan Timur kepada DPMPTSP Kota Balikpapan yaitu sejumlah **Rp.20.080.000.000.000**, sedangkan dasar perhitungan target kinerja realisasi investasi pada tahun 2023 adalah realisasi tahun sebelumnya (Realisasi Investasi Tahun 2022), kebijakan ini diambil terkait hasil pemeriksaan SAKIP DPMPTSP Kota Balikpapan Tahun 2023 atas evaluasi tahun 2024 bahwa dalam menentukan target yang ditetapkan dalam perencanaan kinerja hendaknya dapat dicapai (*achieavable*), menantang dan realistis.

Sasaran II : Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Indikator : Nilai SAKIP DPMPTSP Kota Balikpapan, dimana pada indikator ini terjadi perubahan indikator dari yang sebelumnya Indeks Reformasi Birokrasi menjadi Nilai SAKIP DPMPTSP Kota Balikpapan, terdapat kenaikan sebesar 1,91% dengan capaian tahun 2024 sebesar 75,32 jika dibandingkan dengan capaian indikator pada tahun 2023 yang hanya mencapai 73,91 kenaikan tersebut disebabkan oleh konsistensi perbaikan dalam penyusunan dokumen SAKIP pada DPMPTSP Kota Balikpapan baik dalam komponen perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja maupun evaluasi akuntabilitas kinerja internal.

Sasaran III : Meningkatnya Kualitas Layanan Perizinan

Indikator : Presentase peningkatan Indeks Kepuasan Masyarakat, pada indikator tersebut juga mengalami penurunan yaitu sebesar (80,60%) penurunan tersebut dikarenakan kenaikan hasil survey Indeks Kepuasan Masyarakat pada tahun 2024 tidak signifikan dibandingkan dengan kenaikan Indeks Kepuasan Masyarakat tahun 2023, dimana nilai Indeks Kepuasan Masyarakat pada tahun 2022 mencapai 93,26 sedangkan nilai Indeks Kepuasan Masyarakat pada tahun 2023 mencapai 95,13 dengan selisih kenaikan cukup tinggi yaitu 2,01% jika dibandingkan dengan nilai Indeks Kepuasan Masyarakat pada tahun 2023 mencapai 95,13 sedangkan nilai Indeks Kepuasan Masyarakat pada tahun 2024 mencapai 95,50 sehingga selisih kenaikan hanya mencapai 0.39%.

3.2.3 Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Tahun 2024 dengan Target Jangka Menengah pada Rencana Strategis

Pada Sub bab ini mengukur capaian kinerja sasaran adalah dengan membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2024 dengan target jangka menengah sebagaimana tercantum pada Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021 – 2026 seperti dalam tabel di bawah ini:

Tabel 3.2.3

Realisasi Kinerja yang mengacu pada Target Jangka Menengah Renstra

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	2024			Target Akhir Renstra 2026	Capaian Terhadap Akhir Renstra
				Target Renstra	Realisasi	Capaian		
1	2	3	4	5	6	7 = 6/5*100	8	9 = 6/8*100
1	Meningkatnya Capaian Nilai Realisasi Investasi	Presentase Pencapaian Nilai Realisasi Investasi	%	100	128.02	128.02	100	128.02
2	Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai SAKIP DPMPTSP Kota Balikpapan	Nilai SAKIP	77.6	75.32	97.06	78	96.56
3	Meningkatnya Kualitas Layanan Perizinan	Presentase peningkatan Indeks Kepuasan Masyarakat	%	0.11	0.39	354.55	0.11	354.55

Sumber : Hasil Pengolahan Data DPMPTSP

Berdasarkan Tabel tersebut diatas dapat dijelaskan bahwa pada pelaksanaan tahun pertama Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Balikpapan dari tiga indikator kinerja, yang telah memenuhi target jangka menengah Renstra adalah dua indikator kinerja yaitu **Presentase Pencapaian Nilai Realisasi Investasi** serta **Presentase peningkatan Indeks Kepuasan Masyarakat** Untuk indikator kinerja yang telah memenuhi jangka menengah pada Renstra, selanjutnya akan dilakukan penyesuaian target kinerja pada pelaksanaan tahun berikut.

Untuk indikator **Nilai SAKIP DPMPTSP Kota Balikpapan** telah mencapai 96,56% atau tercapai nilai 75,32 dari nilai capaian yang ditargetkan sebesar 78. Pada awal penyusunan Renstra DPMPTSP Kota Balikpapan Tahun 2021-2026 untuk sasaran strategis presentase peningkatan Indeks Kepuasan Masyarakat indikator awalnya adalah Nilai Reformasi Birokrasi DPMPTSP Kota Balikpapan, namun setelah terbitnya Surat Edaran nomor : 060.4/01799/Org tentang Penyusunan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2023 dalam menyusun Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2023 dimana tidak lagi menggunakan indeks RB sebagai IKU, namun menggunakan Nilai SAKIP Perangkat Daerah sebagai IKU dan menyesuaikan target dengan realisasi dari Hasil Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah yang dikeluarkan oleh Inspektorat Kota Balikpapan.

3.2.4 Perbandingan Realisasi Kinerja tahun ini dengan Mengacu pada SPM/Standar Nasional/ Internasional (Benchmark Kinerja)

Pada sub bab ini membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional/ lainnya

Tabel 3.2.4 Realisasi Kinerja yang mengacu pada Standar Nasional

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2024	Realisasi Nasional 2024	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7 = 5/6*100
NIHIL						

Sumber:Hasil Pengolahan Data DPMPTSP

Berdasarkan tabel tersebut diatas, dapat diketahui bahwa realisasi kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Balikpapan tidak dapat disandingkan dengan dengan standar nasional/ lainnya, karena Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Balikpapan merupakan perangkat daerah yang melaksanakan urusan penunjang pemerintahan bukan melaksanakan urusan wajib sehingga tidak

melaksanakan SPM ataupun standar nasional lainnya.

3.2.5 Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang telah dilakukan

Pada sub bab ini menguraikan analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan dengan menyajikan tabel sebagai berikut :

Tabel 3.2.5
Ikhtisar Capaian Kinerja pada Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian (%)	Predikat		
				Tidak Tercapai (< 100%)	Tercapai/ Sesuai Target (=100%)	Melebihi Target (> 100 %)
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatnya Capaian Nilai Realisasi Investasi	Presentase Pencapaian Nilai Realisasi Investasi	128.02%			√
2	Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai SAKIP DPMPTSP Kota Balikpapan	99.76%	√		
3	Meningkatnya Kualitas Layanan Perizinan	Presentase peningkatan Indeks Kepuasan Masyarakat	354.55%			√

Sumber : Hasil Pengolahan Data DPMPTSP

Pengukuran pencapaian kinerja diatas dapat disimpulkan bahwa dalam pencapaian sasaran strategis dan indikator kinerja selama tahun 2024 terdapat keberhasilan dan kegagalan yang harus dievaluasi untuk bahan pelaksanaan kegiatan di tahun berikutnya. Adapun analisa penyebab keberhasilan pencapaian kinerja yang telah diperjanjikan adalah sebagai berikut:

1) Sasaran Strategis : Meningkatnya Capaian Nilai Realisasi Investasi

Dari tabel tersebut di atas, dapat diketahui bahwa hasil evaluasi kinerja terhadap sasaran Meningkatnya Capaian Nilai Realisasi Investasi dengan indikator kinerja Presentase Pencapaian Nilai Realisasi Investasi menunjukkan tercapai **melebihi target** yaitu mempunyai nilai capaian kinerja **128,02%** dengan realisasi kinerja **Rp 25.705.569.857.505,-** dari target **Rp 20.080.000.000.000** . Data dasar yang digunakan sebagai bahan perhitungan adalah merupakan data dari Bidang Penanaman Modal DPMPT Kota Balikpapan yang telah disinkronisasikan dengan DPMPTSP Provinsi Kalimantan Timur yang dapat kita lihat pada data berikut :

DATA REALISASI INVESTASI (PMA & PMDN) KOTA BALIKPAPAN TAHUN 2024					
NO.	TRIWULAN	PROYEK	REALISASI INVESTASI (Rp.)	TENAGA KERJA	
				TKI	TKA
1	Triwulan I (Januari - Maret)	1.707	5.098.955.500.000	3.057	12
	PMA	283	715.135.500.000	424	4
	PMDN	1.424	4.383.820.000.000	2.633	8
2	Triwulan II (April - Juni)	2.545	5.214.706.800.000	2.109	14
	PMA	325	682.398.000.000	239	13
	PMDN	2.220	4.532.308.800.000	1.870	1
3	Triwulan III (Juli - September)	2.564	8.153.129.000.000	1.701	12
	PMA	357	2.200.867.500.000	242	9
	PMDN	2.207	5.952.261.500.000	1.459	3
4	Triwulan IV (Oktober - Desember)	2.024	7.238.778.557.505	2.863	0
	PMA	300	805.209.377.993	165	0
	PMDN	1.724	6.433.569.179.512	2.698	0
TOTAL TAHUN 2024 (Januari - Desember)		8.840	25.705.569.857.505	9.730	38
PMA		1.265	4.403.610.377.993	1.070	26
PMDN		7.575	21.301.959.479.512	8.660	12

Sumber : Diolah dari data Kementerian Investasi/BKPM RI, DPMPTSP Kota Balikpapan

*Kursi USD terhadap Rp : 1 USD = Rp. 15.000.

- * Total Realisasi Investasi Kota Balikpapan selama tahun 2024 adalah Rp. 25.705.569.857.505,-.
- * Target realisasi investasi Kota Balikpapan (sesuai Renstra DPMPTSP) = Rp. 20,08 T (hingga saat ini sudah tercapai sebesar 128,02 %).
- * Target realisasi investasi Kota Balikpapan dari DPMPTSP Prov. Kaltim = Rp. 20,08 T (hingga saat ini sudah tercapai sebesar 128,02 %).

Balikpapan, 7 Februari 2025
Kepala DPMPTSP Kota Balikpapan
HASBULLAH HELMI

Gambar 3.1
Data Realisasi Investasi (PMA & PMDN) Kota Balikpapan Tahun 2024
Sumber : Laporan Publish Perkembangan Realisasi Investasi Kota Balikpapan Tahun 2020-2024

Berikut detail sektor usaha yang memberikan sumbangsih terbesar bagi realisasi investasi di Kota Balikpapan pada tahun 2024 :

Status Modal	Sektor Usaha	Realisasi Tahun 2024 (PMA)			Peringkat Sektor PMA
		Tambahan Investasi (Dalam Rp.)	TKI	TKA	
PMA	Industri Kimia Dan Farmasi	Rp 1.274.782.500.000	51	0	1
	Transportasi, Gudang dan Telekomunikasi	Rp 977.049.477.474	60	0	2
	Industri Makanan	Rp 940.245.628.216	11	3	3
	Perdagangan dan Reparasi	Rp 493.660.908.885	510	19	4
	Industri Mesin, Elektronik, Instrumen Kedokteran, Peralatan Listrik, Presisi, Optik dan Jam	Rp 376.829.222.925	27	1	5
	Pertambangan	Rp 237.571.554.216	57	2	6
	Jasa Lainnya	Rp 62.341.029.932	124	0	7
	Perumahan, Kawasan Industri dan Perkantoran	Rp 10.241.747.099	0	0	8
	Hotel dan Restoran	Rp 10.018.521.912	127	1	9
	Industri Kendaraan Bermotor dan Alat Transportasi Lain	Rp 8.820.652.179	5	0	10
	Industri Logam Dasar, Barang Logam, Bukan Mesin dan Peralatannya	Rp 7.943.475.214	7	0	11
	Konstruksi	Rp 2.294.155.000	45	0	12
	Industri Mineral Non Logam	Rp 1.122.000.000	23	0	13
	Listrik, Gas dan Air	Rp 499.500.000	0	0	14
	Tanaman Pangan, Perkebunan, dan Peternakan	Rp 144.130.000	17	0	15
	Industri Kayu	Rp 25.500.000	1	0	16
	Industri Karet dan Plastik	Rp 20.374.941	2	0	17
	Industri Lainnya	Rp -	3	0	18
PMA Total		Rp 4.403.610.377.993	1070	26	

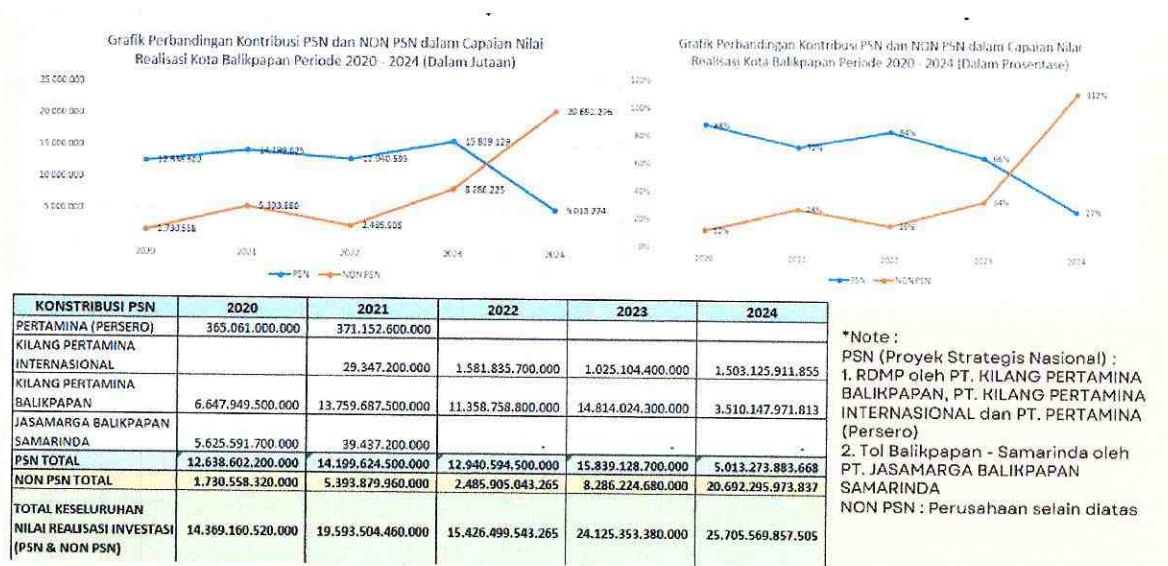
Gambar 3.2
 Data Realisasi Investasi PMA berdasarkan Sektor Usaha
 Sumber : Laporan Publish Perkembangan Realisasi Investasi Kota
 Balikpapan Tahun 2020-2024

Status Modal	Sektor Usaha	Realisasi Tahun 2024 (PMDN)			Peringkat Sektor PMDN
		Tambahan Investasi (Dalam Rp.)	TKI	TKA	
PMDN	Industri Logam Dasar, Barang Logam, Bukan Mesin dan Peralatannya	Rp 6.882.667.291.214	501	2	1
	Industri Kimia Dan Farmasi	Rp 5.091.135.363.668	102	0	2
	Pertambangan	Rp 3.012.132.181.105	802	0	3
	Transportasi, Gudang dan Telekomunikasi	Rp 2.218.464.250.624	729	1	4
	Industri Makanan	Rp 1.507.516.103.008	453	0	5
	Jasa Lainnya	Rp 712.816.412.472	2532	0	6
	Perdagangan dan Reparasi	Rp 708.817.095.112	1374	2	7
	Perumahan, Kawasan Industri dan Perkantoran	Rp 707.006.626.188	245	0	8
	Konstruksi	Rp 230.749.110.354	656	0	9
	Listrik, Gas dan Air	Rp 109.270.975.644	4	0	10
	Hotel dan Restoran	Rp 39.917.364.689	974	7	11
	Tanaman Pangan, Perkebunan, dan Peternakan	Rp 31.952.709.556	0	0	12
	Industri Mesin, Elektronik, Instrumen Kedokteran, Peralatan Listrik, Presisi, Optik dan Jam	Rp 18.934.766.219	5	0	13
	Industri Mineral Non Logam	Rp 14.112.379.000	188	0	14
	Industri Lainnya	Rp 12.432.067.304	13	0	15
	Industri Karet dan Plastik	Rp 2.016.957.257	23	0	16
	Kehutanan	Rp 1.048.326.098	5	0	17
	Industri Kendaraan Bermotor dan Alat Transportasi Lain	Rp 964.200.000	44	0	18
	Industri Kayu	Rp 5.300.000	0	0	19
	Industri Kertas dan Percetakan	Rp -	0	0	20
	Industri Tekstil	Rp -	0	0	21
PMDN Total		Rp 21.301.959.479.512	8660	12	

Gambar 3.3
Data Realisasi Investasi PMDN berdasarkan Sektor Usaha
Sumber : Laporan Publish Perkembangan Realisasi Investasi Kota
Balikpapan Tahun 2020-2024

Dapat kita lihat pada data diatas tahun 2024 bahwa sektor Industri Kimia dan Farmasi masih merupakan sektor terbesar yang menyumbang realisasi investasi dari PMA (Penanaman Modal Asing) sedangkan pada peringkat pertama pada PMDN (Penanaman Modal Dalam Negeri) disumbang oleh sektor Industri Logam dasar, Barang Logam, Bukan Mesin dan Peralatannya.

Jika kita lihat lebih dalam lagi bahwa kenaikan nilai realisasi beberapa tahun terakhir di Kota Balikpapan juga berhubungan erat dengan beberapa Proyek Strategis Nasional (PSN) yang dilaksanakan di Kota Balikpapan. Berikut disajikan grafik perbandingan kontribusi capaian nilai realisasi investasi dari PSN (Proyek Strategis Nasional) dan Non PSN (Non Proyek Strategis Nasional)



Gambar 3.4
Data Perbandingan Kontribusi PSN dan NON PSN dalam Capaian Nilai Realisasi Investasi Kota Balikpapan periode 2020-2024
Sumber : Laporan Publish Perkembangan Realisasi Investasi Kota Balikpapan Tahun 2020-2024

Pada grafik diatas dapat kita lihat bahwa perkembangan realisasi **Proyek Strategis Nasional (PSN) tahun 2024** yang mencapai **19,50%** yaitu senilai **Rp. 5,03 Trilliun**, terdapat penurunan yang cukup signifikan jika

dibandingkan dengan capaian realisasi investasi dari **Proyek Strategis Nasional (PSN)** pada tahun 2023 **65,65%** yaitu senilai **Rp. 15,839 Triliun**.

Untuk capaian realisasi investasi dari sumber **Non Proyek Strategis Nasional (Non PSN) tahun 2024** capaian mencapai **80,50%** yaitu senilai **Rp. 20,692 Triliun** mencapai kenaikan yang cukup signifikan jika dibandingkan dengan capaian realisasi investasi dari **Non Proyek Strategis Nasional (Non PSN)** pada tahun 2023 nilai realisasi investasi hanya mencapai **34,35%** atau senilai **Rp. 8,286 Triliun**.

Sehingga dapat ditarik Kesimpulan bahwa nilai realisasi investasi pada tahun 2024 mulai beralih dari yang sebelumnya sangat bergantung pada Proyek Strategis Nasional (PSN) beralih menjadi Non Proyek Strategis Nasional (Non PSN), hal ini sesuai dengan harapan DPMPTSP Kota Balikpapan dimana realisasi investasi Kota Balikpapan hendaknya tidak hanya berharap dari Proyek Strategis Nasional (PSN) yang diselenggarakan di Kota Balikpapan karena proyek tersebut memiliki jangka waktu yang pendek sehingga perlu dilakukan berbagai upaya sehingga nilai realisasi investasi Kota Balikpapan dapat tercapai sesuai target yang telah ditetapkan sesuai dengan yang telah termuat dalam dokumen Perjanjian Kinerja Kepala DPMPTSP Kota Balikpapan.

Beberapa hal yang menjadi penyebab keberhasilan capaian indikator kinerja antara lain:

- a. Makin kondusifnya iklim investasi di Indonesia pada umumnya dan Kota Balikpapan pada khususnya. Tahun 2024 ini kontribusi capaian realisasi investasi terbesar dari proyek Non PSN yaitu 20,692 T atau 80 % dari total realisasi investasi di akhir tahun 2024 (25,705 T).
- b. Terlaksananya kegiatan LKPM *Hunter* berupa kegiatan mengejar realisasi investasi langsung di lapangan yang ditujukan kepada Pelaku Usaha yang sedang dalam tahap persiapan/pembangunan/berkonstruksi guna mendapatkan nilai realisasi investasi dengan modal tetap yang angkanya signifikan dan bisa mendorong pencapaian target nilai realisasi investasi, dengan melakukan pembinaan mengenai kewajiban LKPM secara langsung di lokasi kegiatan usaha kepada petugas yang ditunjuk

oleh Direksi/penanggung jawab perusahaan yang kompeten untuk menangani penyampaian LKPM Pelaku Usaha

- c. Meningkatnya kepatuhan teknis dan administratif pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan usahanya dengan adanya kegiatan pengawasan/inspeksi lapangan secara terkoordinasi dan terintegrasi oleh DPMPSTSP Kota Balikpapan selaku Koordinator Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dengan Perangkat Daerah Teknis Pengampu Izin di Kota Balikpapan terhadap kegiatan usaha yang menjadi kewenangan Kota Balikpapan
- d. terselesaikannya permasalahan dan hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan kegiatan usahanya dengan adanya kegiatan Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan kegiatan usahanya sehingga kegiatan investasi dapat berjalan dengan lancar.
- e. Terlaksananya promosi investasi penanaman modal yang dilakukan dengan cara mengikuti secara langsung kegiatan pameran penanaman modal maupun dengan mengikuti kegiatan seminar bisnis, forum, one on one meeting yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia dan DPMPSTSP Provinsi Kalimantan Timur sehingga dapat mempromosikan potensi usaha yang ada di Kota Balikpapan
- f. Makin mudahnya pengurusan perizinan berusaha melalui laman oss.go.id sehingga mendukung proses kemudahan berinvestasi di Kota Balikpapan.

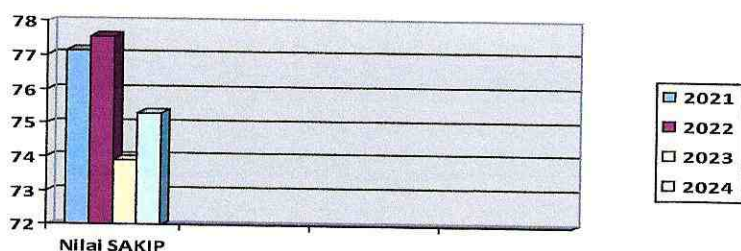
Beberapa solusi/upaya telah yang dilakukan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Balikpapan untuk mengatasi maupun meminimalisir kegagalan dalam pencapaian indikator sebagai berikut:

- a. Meningkatkan kesadaran dan pemahaman Pelaku Usaha akan kewajiban penyampaian nilai realisasi investasi melalui LKPM (Laporan Kegiatan Penanaman Modal) dengan diadakannya kegiatan pembinaan kepada Pelaku Usaha Kota Balikpapan berupa kegiatan Bimtek Implementasi Perizinan dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

- b. Mengapresiasi Pelaku Usaha Kota Balikpapan yang telah menyampaikan LKPM dengan nilai terbesar di tahun 2023 (Lima PMA & Lima PMDN) dengan memberikan penghargaan pada kegiatan Balikpapan Investment Award 2024.
- c. Melakukan kolaborasi dengan OPD teknis dalam hal pengawasan dan pengendalian terhadap penerbitan perizinan dan non perizinan dalam bentuk rapat-rapat teknis dengan OPD Teknis serta visitasi dan monitoring ke lapangan baik secara rutin (terjadwal) maupun yang bersifat insidental oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Balikpapan.

2) Sasaran Strategis : Meningkatnya kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Untuk capaian sasaran kedua dari tabel di atas, dapat diketahui bahwa hasil evaluasi kinerja terhadap sasaran Meningkatnya kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dengan indikator kinerja Nilai SAKIP DPMPTSP Kota Balikpapan menunjukkan predikat **Tidak Tercapai** yaitu mempunyai nilai capaian kinerja **99,76%** dengan realisasi kinerja Nilai SAKIP Tahun 2023 sebesar **75,32** dari target yang telah ditetapkan pada dokumen Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Balikpapan yaitu sebesar **78**. Capaian Nilai SAKIP DPMPTSP Kota Balikpapan dapat disajikan dalam bentuk grafik sebagai berikut :



Grafik 3.1
 Capaian Nilai SAKIP DPMPTSP Kota Balikpapan Tahun 2021-2024
 Sumber : Hasil Pengolahan Data DPMPTSP

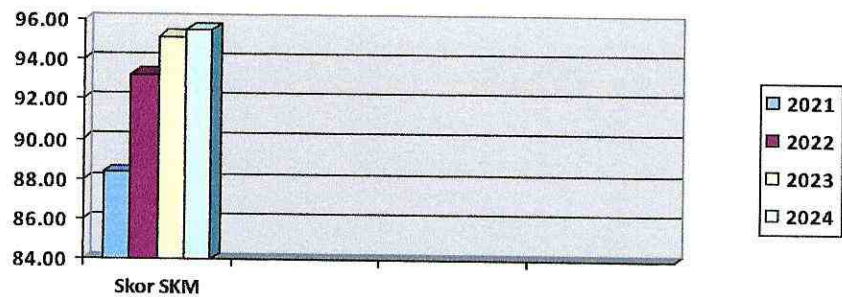
Untuk Indikator kinerja Nilai SAKIP DPMPTSP Kota Balikpapan merupakan Indikator Perjanjian Kinerja Perubahan Dimana pada Perjanjian

Kinerja Murni untuk sasaran strategis yang diampu adalah Meningkatnya kualitas Penerapan Reformasi Birokrasi pada DPMPTSP Kota Balikpapan dengan indikator kinerja Nilai Reformasi Birokrasi DPMPTSP Kota Balikpapan yang sudah tidak dapat dilakukan perhitungan Kembali sehubungan dengan terbitnya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 3 tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 25 tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024.

Pada capaian indikator kinerja kedua Nilai SAKIP DPMPTSP Kota Balikpapan diatas dapat dilihat bahwa terdapat peningkatan capaian nilai SAKIP pada tahun 2024 mencapai **75,32** dengan predikat **“BB”** dibandingkan dengan capaian pada tahun sebelumnya yang mencapai **73,91** dengan predikat **“BB”**, hal ini dapat dicapai melalui beberapa perbaikan dokumen sebagai tindak lanjut dari perbaikan SAKIP DPMPTSP Kota Balikpapan baik dalam aspek Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja maupun Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal.

3) Sasaran Strategis : Meningkatnya Kualitas Layanan Perizinan

Sementara itu untuk capaian sasaran ketiga dari tabel di atas, dapat diketahui bahwa hasil evaluasi kinerja terhadap sasaran Meningkatnya Kualitas Layanan Perizinan dengan indikator Presentase peningkatan Indeks Kepuasan Masyarakat menunjukkan predikat **Melebihi Target** yaitu mempunyai nilai capaian kinerja 354,55% dengan realisasi kinerja 0,39% dari target yang telah ditetapkan pada dokumen Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Balikpapan yaitu sebesar 0,11%. Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Bidang Pelayanan Perizinan dapat kita lihat pada grafik tersebut di bawah ini :



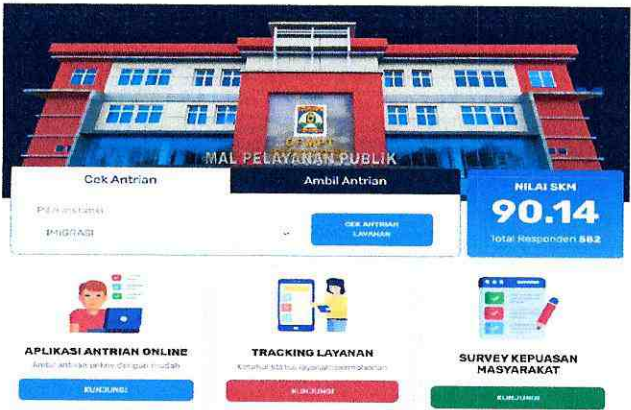
Grafik 3.2
 Capaian Skor SKM DPMPTSP Kota Balikpapan Tahun 2021-2024
 Sumber : Hasil Pengolahan Data DPMPTSP



Gambar 3.5
 Capaian Nilai SKM berdasarkan Jenis Responden (Umur, Jenis Kelamin dan Pendidikan)
 Sumber : Capaian Hasil Survey Kepuasan Masyarakat DPMPTSP Kota Balikpapan Tahun 2024

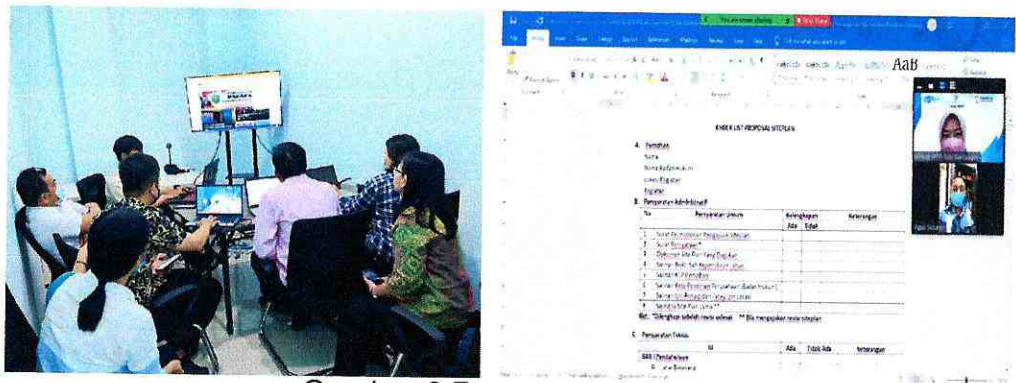
Beberapa hal yang menjadi penyebab keberhasilan capaian indikator kinerja antara lain:

- a. Ditetapkannya Gedung DPMPTSP Kota Balikpapan sebagai Penyelenggara Mal Pelayanan Publik Kota Balikpapan sesuai dengan Peraturan Wali Kota Balikpapan nomor 6 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik Kota Balikpapan dan diresmikannya Mal Pelayanan Publik Kota Balikpapan serentak oleh Bapak Wakil presiden Republik Indonesia dan MenPAN RB pada tanggal 5 Desember 2022
- b. Aplikasi Pelayanan MPP (Mal Pelayanan Publik) merupakan Pengembangan aplikasi untuk mengintegrasikan seluruh proses layanan yang ada di MPP Kota Balikpapan (dari proses pendaftaran hingga penyerahan produk ke masyarakat), yang salah satu outputnya adalah Survei Kepuasan Masyarakat secara online sehingga hasil survey tersebut dapat dicek secara *real time* dan *up to date* dan dapat langsung terlihat jumlah responden baik berdasarkan umur, jenis kelamin maupun tingkat pendidikannya.



Gambar 3.6
Aplikasi Pelayanan Mal Pelayanan Publik (MPP) Kota Balikpapan
Sumber: Dokumentasi Internal DPMPTSP

- c. Memaksimalkan fungsi Virtual Mal Pelayanan Publik (**Via Zoom meeting, Video Call, Wa dll**) untuk pelayanan terhadap pelaku usaha terkait pendampingan perizinan dan non perizinan yang membutuhkan koordinasi lebih lanjut.



Gambar 3.7
Aplikasi Pelayanan Mal Pelayanan Publik (MPP) Kota Balikpapan
Sumber: Dokumentasi Internal DPMPTSP

- d. Terdapat inovasi *Chatbot* MPP Kota Balikpapan yaitu pelayanan mengenai informasi terkait MPP Kota Balikpapan yang dapat diakses Via Whatsapp sehingga masyarakat dapat dengan mudah mengetahui informasi mengenai Porfil, Daftar Instansi, Jadwal serta Informasi secara cepat dan efisien karena menggunakan aplikasi chatbot percakapan berbasis AI yang menstimulasi komunikasi manusiawi antara OPD dan masyarakat melalui antarmuka chat WhatsApp.



Gambar 3.8
Flyer Pelayanan *Chatbot* Mal Pelayanan Publik (MPP) Kota Balikpapan
Sumber: Dokumentasi Internal DPMPTSP

Beberapa solusi/upaya yang dilakukan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Balikpapan untuk mengatasi atau meminimalisir kegagalan dalam pencapaian indikator tersebut sebagai berikut :

- a. Melakukan sosialisasi dan publikasi terkait pelayanan perizinan dan non

perizinan yang dilaksanakan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Balikpapan



Gambar 3.9
Forum Konsultasi Publik DPMPTSP tahun 2024
Sumber : Dokumentasi Internal DPMPTSP

- b. Melaksanakan pendampingan OSS serta Pelayanan Jemput Bola langsung untuk melayani perizinan dan non perizinan yang bekerja sama dengan pihak Mal maupun area publik lainnya sehingga mudah dijangkau oleh Masyarakat



Gambar 3.10
Kegiatan SiJempol (Sistem Jemput Bola Langsung) pada atrium Mal
Balikpapan Baru
Sumber : Dokumentasi Internal DPMPTSP

3.2.6 Analisis Program /Kegiatan yang menunjang Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Kinerja (Perjanjian Kinerja)

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian kinerja (Perjanjian Kinerja) dapat dijelaskan pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.2.6

Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Kinerja (Perjanjian Kinerja)

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian (%)	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Kinerja		
						Target	Realisasi	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Meningkatnya Capaian Nilai Realisasi Investasi	Presentase Pencapaian Nilai Realisasi Investasi	156.39%	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Persentase pelaku usaha yang mendapat manfaat insentif bidang penanaman modal	5.00%	0.00%	0.00%
				Kegiatan Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Bidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Rancangan Peraturan Daerah (Jumlah Perda/Perwali/Raperwali) yang disahkan	20.00%	20.00%	100%
				Kegiatan Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/ Kota	Persentase dokumen peta potensi yang diterbitkan	20.00%	20.00%	100%
				Program Promosi Penanaman Modal	Persentase minat investasi dalam kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah	90.00%	95.00%	106%
				Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Presentase kenaikan jumlah Kegiatan Promosi Penanaman Modal	5.00%	4.00%	80%
				Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Persentase Perusahaan (debottlenecking) yang difasilitasi permasalahan penanaman modalnya	100.00%	100.00%	100%

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian (%)	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Kinerja		
						Target	Realisasi	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai SAKIP DPMPTSP Kota Balikpapan	98.55%	Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penyampaian LKPM	330	7998	2424%
				Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Persentase data dan informasi perizinan dan non perizinan yang berlaku efektif	86.00%	93.88%	109%
				Kegiatan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Rasio Jumlah Permintaan Data dan informasi yang terpenuhi	100.00%	100.00%	100%
				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	IKM Internal Perangkat Daerah	80.00%	94.32%	118%
				Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Kota Balikpapan	79.00%	95.68%	121%
				Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	78.50%	90.26%	115%
				Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	IKM Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	80.00%	96.37%	120%
				Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	IKM Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	79.00%	94.71%	120%

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian (%)	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Kinerja		
						Target	Realisasi	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3	Meningkatnya Kualitas Layanan Perizinan	Presentase peningkatan Indeks Kepuasan Masyarakat	1827%	Program Pelayanan Penanaman Modal	Persentase Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan yang diterbitkan	69.00%	97.53%	141%
				Kegiatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelayanan Penerbitan perizinan dan non perizinan (Dokumen)	11600	15405	133%

Sumber : Laporan Monev Renja DPMPTSP Tahun 2024

Berdasarkan tabel 3.2.6 tentang analisa program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian kinerja, disampaikan hal sebagai berikut :

1. Sasaran Strategis : Meningkatnya Capaian Nilai Realisasi Investasi

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa indikator kinerja Presentase Pencapaian Nilai Realisasi Investasi telah tercapai sebesar 128,02%. Indikator ini dapat terlaksana melalui beberapa program dan kegiatan sebagai berikut :

a. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal dengan capaian program 0% hal ini dikarenakan Belum terdapat pelaku usaha yang mendapatkan insentif bidang penanaman modal dikarenakan regulasi teknis terkait mekanisme pemberian insentif belum ditetapkan menjadi Perda (masih menunggu pengesahan biro hukum provinsi) dan Perwali (masih berupa draf) sehingga belum dapat ditindaklanjuti untuk capaian indikator Presentase pelaku usaha yang mendapat manfaat insentif bidang penanaman modal, Program tersebut terdiri dari 2 kegiatan yaitu :

- Kegiatan Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota dengan capaian kinerja 100% pada tahun 2024 Penyusunan Draf Peraturan Wali Kota (Perwal) Tentang Tata Cara Pemberian Insentif Investasi telah selesai pada akhir November 2024, namun dalam penetapannya menjadi Peraturan Wali Kota (Perwal) masih menunggu Pengesahan Peraturan Daerah (Perda) oleh Biro Hukum Provinsi Kaltim.
- Kegiatan Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota dengan capaian kinerja 100% pada tahun 2024 telah tercapai dengan diterbitkannya dokumen updating Peta Potensi Investasi Kota Balikpapan DPMPSTSP Kota Balikpapan, sehingga peluang usaha berdasarkan KBLI dapat di akses secara cepat dan mudah oleh seluruh pihak terutama investor yang akan berinvestasi di Kota Balikpapan.

b. **Program Promosi Penanaman Modal** dengan capaian program 106% yang terdiri dari Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota dengan capaian kinerja 100%. Terdapat penurunan jumlah kegiatan promosi dikarenakan event ALKI II Zone Investment Forum dilaksanakan per dua tahun sekali, namun untuk kegiatan expo rutin dari tahun 2023 s.d 2025 tetap sama targetnya lima kali expo, berikut daftar kegiatan promosi yang diikuti oleh DPMPTSP Kota Balikpapan baik yang didanai oleh APBD maupun Non APBD :

Tabel 3.2.7
Kegiatan Promosi Penanaman Modal DPMPTSP tahun 2024

No	Nama Kegiatan	Uraian	Dokumentasi
1	High Level Meeting RIRU Kaltim (Balikpapan, 24 April 2024)	Meeting rutin tahunan yang diadakan oleh RIRU Bank Indonesia Prov Kaltim yang membahas terkait potensi dan peluang investasi di Kalimantan Timur dan Rencana Kerja RIRU Bank Indonesia terkait proyek investasi Kabupaten/Kota yang akan dibantu dalam peningkatannya menjadi <i>Pre-Feasibility Study</i> melalui program PIKAT BI	
2	Kunjungan Brunei China – One Belt Road Association (Balikpapan, 6 Mei 2024)	Pendampingan Kunjungan <i>Brunei-China One Belt Road Association</i> dengan agenda Perekonomian, Perdagangan, Investasi dan Pembangunan Infrastruktur Kota Balikpapan	

No	Nama Kegiatan	Uraian	Dokumentasi
3.	Indonesia City Expo (ICE) APEKSI 2024 (Balikpapan, 4-6 Juni 2024)	ICE APEKSI merupakan agenda rutin tahunan yang diselenggarakan oleh Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI). Pameran ICE APEKSI menampilkan potensi dan peluang investasi serta profuk UMKM yang dimiliki kota yang tergabung dalam asosiasi	
4.	Pertamina Vendor Day (Balikpapan, 8 Juli 2024)	Pertamina Vendor Day diselenggarakan dalam rangka mengapresiasi dan memperkuat kerja sama antara perusahaan dan mitra strategisnya dalam pengadaan barang dan jasa di wilayah operasional Kalimantan, Sulawesi, dan Papua-Maluku. Dalam kegiatan ini, DPMPSTSP dilibatkan sebagai peserta pameran yang menampilkan potensi investasi serta perbantuan dalam layanan perizinan bagi perusahaan-perusahaan maupun UMKM	
5.	Pameran Jogja PPUN Expo (Jogja, 22-25 Agustus 2024)	Jogja PPUN Expo merupakan sarana dalam mempromosikan berbagai produk unggulan baik barang maupun jasa dalam rangka meningkatkan dan menumbuh kembangkan sektor perdagangan, industri, pertanian dan pangan, kelautan dan perikanan, pariwisata dan investasi, baik dalam skala nasional maupun internasional	

No	Nama Kegiatan	Uraian	Dokumentasi
6.	German Business Delegation of Energy Infrastructure Storage and Smart Connectivity (Balikpapan, 5 September 2024)	Kegiatan ini merupakan pertemuan G2B (Government to Business) antara Pemerintah Kota Balikpapan dengan Delegasi Perusahaan yang bergerak di Sektor Energi. Kegiatan ini membahas tentang potensi investasi dan potensi wilayah di Kota Balikpapan yang dapat dimanfaatkan untuk pembangunan investasi berbasis sektor energi	
7.	Mahakam Investment Forum (Bali, 19 September 2024)	Forum ini merupakan bagian dari upaya strategis pemerintah daerah dalam mempercepat transformasi ekonomi berbasis sumber daya alam dan memperkuat infrastruktur wilayah. Forum ini menghadirkan proyek-proyek investasi unggulan, termasuk proyek hilirisasi industri serta kawasan strategis yang telah dilengkapi dengan pra-studi kelayakan (pre-feasibility study). 7Forum ini juga memiliki dua sesi utama, yaitu Project Expose yang dipandu oleh moderator dan sesi One-on-One Meeting antara pengelola proyek dengan calon investor.	
8.	Indonesia International Smart City Expo & Forum 2024 (Jakarta, 18-20 September 2024)	Pameran IISMEX merupakan pameran yang menampilkan solusi dari berbagai sektor penunjang terciptanya sebuah kota cerdas guna meningkatkan pelayanan, kenyamanan, dan berbagai kemudahan lainnya kepada masyarakat dan semua pemangku kepentingan lainnya.	

No	Nama Kegiatan	Uraian	Dokumentasi
9.	On Visit program for Renewable Energy Infrastructure (Waste) for the Chemical Industry Project JICA (Balikpapan, 25 September 2024)	Pendampingan Kunjungan dari Kementerian Investasi/BKPM RI dan <i>Japan International Cooperation Agency</i> (JICA). Program ini merupakan tindak lanjut dari penyusunan Pra-FS Peta Peluang Investasi yang telah disusun oleh Kementerian Investasi/BKPM untuk Proyek Infrastruktur Energi Terbarukan (Limbah) untuk Industri Kimia yang berlokasi di kawasan Kariangau Balikpapan.	
10.	<i>World Walking Day</i> dan Tafisa Forum 2024 (Balikpapan, 6-9 Oktober 2024)	<i>World Walking Day</i> dan Tafisa Forum 2024 diselenggarakan dengan tujuan untuk membudidayakan dan memasyarakatkan olahraga jalan kaki; meningkatkan derajat kesehatan dan kebugaran masyarakat; mempromosikan kawasan IKN sebagai wilayah ibu kota negara yang hijau, sehat, dan aktif; serta menggerakkan sektor ekonomi terutama UMKM. Kegiatan ini dihadiri juga oleh delegasi dari beberapa negara ASEAN, Presiden Tafisa dari Jerman, Petinggi dari ASEAN yakni China dan Korea Selatan	
11.	Trade Expo Indonesia (Tangerang, 15-19 Oktober 2024)	TEI merupakan platform perdagangan yang lebih terfokus dan komprehensif untuk interaksi Business-to-Business (B2B) dengan berbagai jenis dan kategori produk: Food, Beverage & Agriculture, Manufacture, Services & Lifestyle.	

No	Nama Kegiatan	Uraian	Dokumentasi
12.	On Site Visit Program for Property, Buluminung Industrial Estate, Logistics and Integrated Warehousing Project (Balikpapan, 23 Oktober 2024)	Pendampingan Kunjungan dari Kementerian Investasi/BKPM RI dan Japan International Cooperation Agency (JICA). Program ini merupakan tindak lanjut dari penyusunan Pra-FS Peta Peluang Investasi yang telah disusun oleh Kementerian Investasi/BKPM untuk Proyek Kawasan Insutri Buluminung yang berlokasi di Buluminung dan Proyek Logistik dan Pergudangan terintegrasi yang berlokasi di kawasan Kariangau Balikpapan.	
13.	Kaltim Paradise of The East – The Jorney of Mahakam Investment Forum 2024 (Samarinda, 8 November 2024)	Kegiatan Kaltim Paradise of The East merupakan rangkaian kegiatan Mahakam Investment Forum. Kegiatan ini membahas mengenai potensi investasi di wilayah Kabupaten/Kota di wilayah Kalimantan Timur dan One on One Meeting antara calon investor dengan Pemerintah (B2G).	

Sumber : Pengolahan Data Bidang Penanaman Modal DPMPTSP

- c. **Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal** dengan capaian program 100% yang terdiri dari Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota dengan capaian kinerja mencapai 2678.79 %, capaian yang cukup signifikan tersebut dengan realisasi 8840 LKPM dari jumlah 330 LKPM yang ditargetkan, hal ini juga turut dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu :
- Peraturan BKPM Nomor 5 tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, dimana disebutkan pada pasal 5 huruf c bahwa Setiap Pelaku Usaha berkewajiban menyampaikan LKPM
 - Melaksanakan kegiatan sosialisasi Bimbingan Teknis diselenggarakan

dalam 3 (tiga) gelombang (batch) dengan menghadirkan narasumber diantaranya Kementerian Investasi dan Hilirasasi/ BKPM, Kementerian Hukum Dan Ham RI dan Kementerian Ketenagakerjaan RI.dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 3.2.8
Kegiatan Sosialisasi Bimbingan Teknis LKPM Online DPMPSTSP tahun 2024

No	HARI /TANGGAL	URAIAN	TEMPAT	DOKUMENTASI
1.	Rabu, 4 September 2024	Bimbingan Teknis Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM)	Nusantara Ballroom, Lt. 6, Pentacity Mall Balikpapan, Komplek BSB (Balikpapan Superblock)	
2.	Rabu, 25 September 2024	Bimtek Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Nusantara Ballroom, Lt. 6, Pentacity Mall Balikpapan, Komplek BSB (Balikpapan Superblock)	
3.	Kamis, 26 September 2024	Bimtek Implementasi Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Nusantara Ballroom, Lt. 6, Pentacity Mall Balikpapan, Komplek BSB(Balikpapan Superblock)	

Sumber : Pengolahan Data Bidang Penanaman Modal DPMPSTSP

- Melaksanakan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal langsung ke lapangan. Berdasarkan PP No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Perka BKPM No. 5 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, maka DPMPTSP Kota Balikpapan selaku Koordinator Pengawasan Perizinan Berusaha untuk kegiatan Perizinan Berusaha yang menjadi kewenangan Kota Balikpapan telah melaksanakan kegiatan pengawasan/inspeksi lapangan yang dilakukan secara terkoordinasi dan terintegrasi dengan Perangkat Daerah Teknis selaku Pengampu Izin yang ada di Kota Balikpapan, guna melakukan evaluasi atas pelaksanaan perizinan berusaha berbasis risiko terhadap kegiatan usaha yang telah dilakukan oleh para Pelaku Usaha di Kota Balikpapan. DPMPTSP Kota Balikpapan melakukan evaluasi dengan memberikan penilaian atas kepatuhan administratif Pelaku Usaha, sedangkan OPD Teknis melakukan evaluasi dengan memberikan penilaian atas kepatuhan teknis Pelaku Usaha. Berikut kegiatan Pengawasan perizinan Berusaha Berbasis Risiko (PBBR) melalui sistem OSS pada tahun 2024 yang telah dilaksanakan oleh DPMPTSP dengan rincian sebagai berikut :

Periode Triwulan I 2024 (Januari – Maret)			
No	Bulan	Jumlah Perusahaan	Jumlah Kegiatan Usaha (NKU / KBLI)
1	Januari	-	
2	Februari	-	
3	Maret	1	1 NKU / KBLI
Triwulan I 2024 Dilaksanakan Pengawasan Kepada 1 (Satu) Perusahaan dengan 1 (Satu) Kegiatan Usaha			
Periode Triwulan II 2024 (April - Juni)			
4	April	3	4 NKU / KBLI
5	Mei	3	3 NKU / KBLI
6	Juni	1	1 NKU / KBLI
Triwulan II 2024 Dilaksanakan Pengawasan Kepada 7 (Tujuh) Perusahaan dengan 8 (Delapan Kegiatan Usaha)			
Periode Triwulan III 2024 (Juli - September)			
7	Juli	4	4 NKU / KBLI
8	Agustus	5	8 NKU / KBLI
9	September	-	-
Triwulan III 2024 Dilaksanakan Pengawasan Kepada 9 (Sembilan) Perusahaan dengan 12 (Dua Belas) Kegiatan Usaha			
Periode Triwulan IV 2024 (Oktober - Desember)			
10	Oktober	-	-
11	November	8	23 NKU / KBLI
12	Desember	-	-
Triwulan IV 2024 Dilaksanakan Pengawasan Kepada 8 (Delapan) Perusahaan dengan 23 (Dua Puluh Tiga) Kegiatan Usaha			
Periode Januari - Desember Tahun 2024 Telah Dilaksanakan Pengawasan Kepada 25 (Dua Puluh Lima) Perusahaan Dengan Total 44 (Empat Puluh Empat) Kegiatan Usaha			

Gambar 3.11
kegiatan Pengawasan perizinan Berusaha Berbasis Risiko (PBBR) melalui sistem OSS pada tahun 2024

Sumber : Laporan Kegiatan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal Tahun 2024 oleh Tim Pengendalian dan Pelaksanaan Penanaman Modal DPMPTSP

- Melaksanakan Kegiatan Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan kegiatan usahanya. Kegiatan Penyelesaian permasalahan dan hambatan yang dihadapi pelaku usaha dapat kami sajikan pada rincian berikut :

Periode Triwulan I 2024 (Januari – Maret)			
No	Nama Perusahaan	Tanggal	Keterangan
1	PT. AGPA Refinery Complex	6/3/2024	(1 NKU) Fasilitas LKPM dan Fasilitas Kendala dalam pengajuan Izin Site Plan dan PBG
2	PT Wahana Prima Sejati	6/3/2024	(1 NKU) Fasilitas LKPM
3	PT. Expro Indonesia	26/3/2024	(1 NKU) Fasilitas LKPM
4	PT. Sinar Mas Wisesa	26/3/2024	(1 NKU) Fasilitas LKPM
5	PT. Sinarwisata Permai	22/3/2024	(Hotel Le Grandeur – 1 NKU) Fasilitas LKPM
Triwulan I 2024 dilaksanakan fasilitasi kepada 5 (lima) perusahaan dan 5 (lima) kegiatan usaha			
Periode Triwulan II 2024 (April - Juni)			
6	PT. Suri Retail Nusantara	18/4/ 2024	(2 NKU) Fasilitas LKPM
7	PT. Suri Nusantara Jaya	18/4/ 2024	(1 NKU) Fasilitas LKPM
8	PT. Brivanda Berkah Abadi	23/4/ 2024	(4 NKU) LKPM.
9	Perumda Tirta Manuntung Balikpapan (PDAM)	26/4/2024	(2 NKU) Fasilitas Izin Instalasi Pengolahan Air.
Triwulan II 2024 dilaksanakan fasilitasi kepada 4 (Empat) perusahaan dan 9 (Sembilan) kegiatan usaha			
Periode Triwulan III 2024 (Juli - September)			
10	PT. Intipratama Terminal Kontainer	5/7/2024	(1 NKU) Fasilitas LKPM
11	PT. Unggul Diesel Part	5/7/2024	(2 NKU) Fasilitas LKPM, Perbaikan Data Usaha untuk kesesuaian dengan pengajuan Site Plan dan Pendampingan PB UMKU TDG
12	PT. Wulandari Bangun Laksana	5/7/2024	(1 NKU) Fasilitas LKPM
13	PT. Astra International – Daihatsu	19/7/2024	(1 NKU) Fasilitas LKPM
14	PT. Multitech Prima Utama	22/7/2024	(2 NKU) Fasilitas LKPM
15	PT. Medikal Helt Centera / RSBB	23/7/2024	(1 NKU) Fasilitas Perpanjangan Izin RS Swasta.
Triwulan III 2024 dilaksanakan fasilitasi kepada 6 (Enam) perusahaan dan 8 (Delapan) kegiatan usaha			
Periode Triwulan IV 2024 (Oktober - Desember)			
16	PT. Astra International – Honda Motor	10/12/2024	(4 NKU) Fasilitas perbaikan data OSS
17	PT. Batu Penjuru	12/12/2024	(30 NKU) Fasilitas Penghapusan KBLI dan LKPM
18	PT. Mulia Tritunggal Estetika	12/12/2024	(8 NKU) Fasilitas Penghapusan KBLI dan LKPM
19	CV. Biru Laut	13/12/2024	(1 NKU) Fasilitas isian OSS dan konsultasi persyaratan untuk verifikasi penerbitan SS
20	CV. Biru Laut Serpong	13/12/2024	(1 NKU) Fasilitas isian OSS dan konsultasi persyaratan untuk verifikasi penerbitan SS
Triwulan IV 2024 dilaksanakan fasilitasi kepada 5 (Lima) perusahaan dan 44 (Empat Puluh Empat) kegiatan usaha			
Periode Januari - Desember Tahun 2024 telah dilaksanakan Fasilitas kepada 19 (Sembilan Belas) Perusahaan dengan Total 66 (Enam Puluh Enam) Kegiatan Usaha. *Noted : untuk Astra Daihatsu dan Astra Honda Motor berada dalam 1 (satu) perusahaan yang sama PT. Astra International namun pada divisi yang berbeda.			

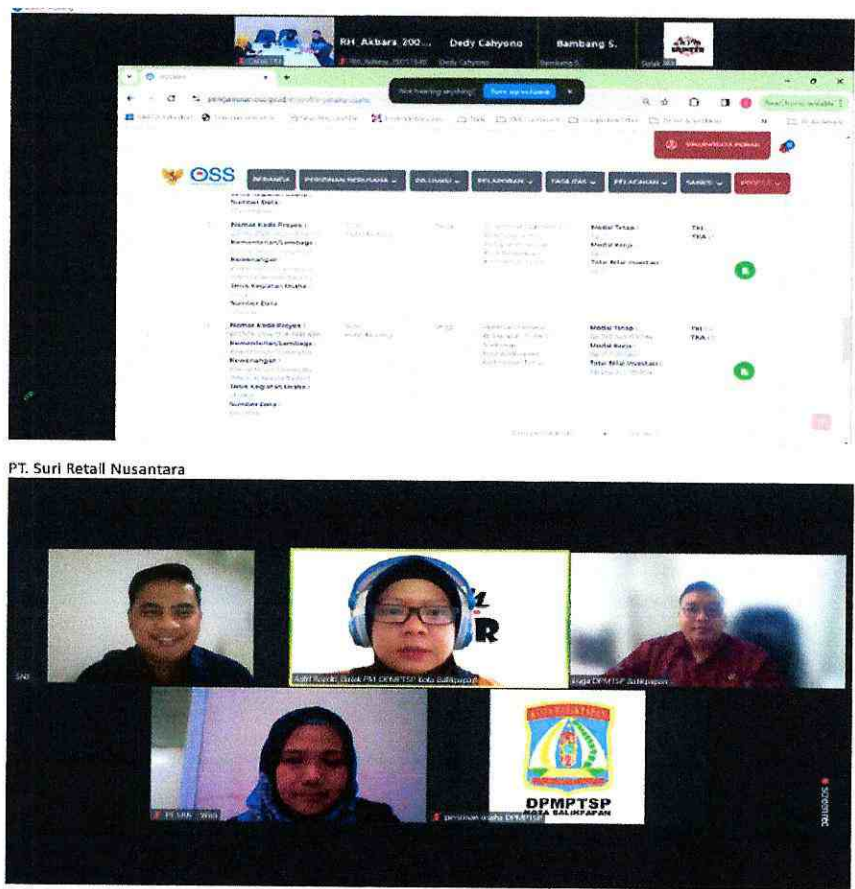
Gambar 3.12

Kegiatan Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan kegiatan usahanya pada tahun 2024

Sumber : Laporan Kegiatan Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan kegiatan usahanya Tahun 2024 oleh Tim Pengendalian dan Pelaksanaan Penanaman Modal DPMPSTP

- Melaksanakan Pendampingan Pengisian Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) baik secara online (dapat menghubungi

helpdesk LKPM ataupun dapat melakukan pendampingan melalui zoom) serta dapat pula dilakukan secara offline (Perusahaan yang akan melaporkan kegiatan penanaman modalnya dapat langsung datang ke kantor DPMTSP Kota Balikpapan untuk mendapatkan layanan pendampingan ataupun dapat juga mengajukan surat untuk diadakan penampingan langsung di perusahaan mereka)



- Melaksanakan publikasi pengisian LKPM melalui media sosial, website maupun broadcast



Publikasi melalui medsos



sumber : balpos.com

BALIKPAPAN– Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Balikpapan menggelar Bimtek dan Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Implementasi Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko di Hotel Novotel Balikpapan, pada Selasa (11/10).

Bimtek dan sosialisasi ini merupakan rangkaian acara yang telah digelar sebelumnya pada 14-15 September dan 17-18 September. Kota Balikpapan juga mengundang pengkaderan dari Balikpapan dan Penanaman Modal DPMPTSP Kota Balikpapan sebagai fasilitator dan fasilitator kegiatan.

Melalui bimtek, terdapat dua sesi implementasi Data Aplikasi Minus (DAK) Nalik, Fasilitas Penanaman Modal (FPM) Tahun Anggaran 2022. Bimtek dan sosialisasi dengan tema sosialisasi kemudahan berusaha ini akan ditutup Kamis 9 Oktober, Kota Aneka.

Isi materi bimtek, kegiatan ini dihadiri DPMPTSP, OPD terkait, serta 60 pelaku usaha di Balikpapan. Pada kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada pelaku usaha tentang cara mengisi DPMPTSP serta OPD terkait mengenai implementasi Perizinan dan Implementasi Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko yang dilakukan secara online dan manual melalui sistem OSS 4.14.4 (Online Single Submission Risk Based Approach). Kota berharap sistem ini dapat mendukung iklim kemudahan berusaha. (nuzulita.ekspres.via)

Dari Bimtek dan Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
Pengawasan Berbasis Risiko Berbasis Risiko



Publikasi melalui Website Balpos.com



instagram : kpfmbalikpapan



Publikasi melalui Broadcast

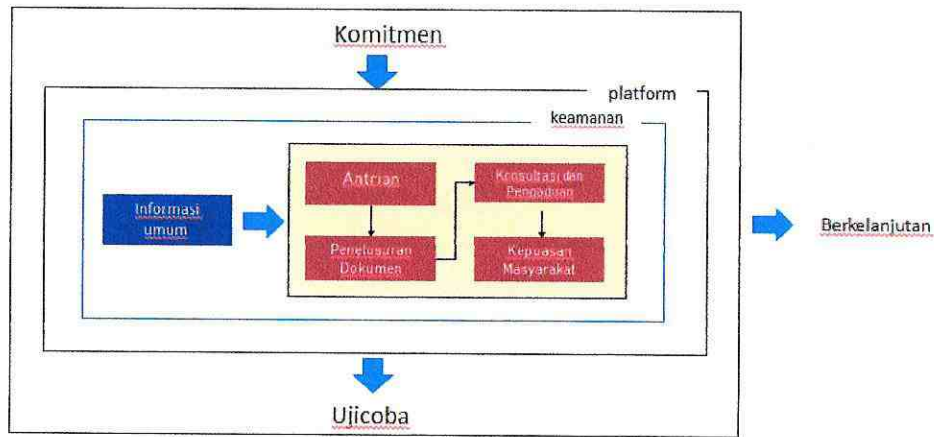
d. Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal

dengan capaian program mencapai 109,16% yang terdiri dari Kegiatan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dengan capaian kinerja mencapai 100%. Untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan maka upaya-upaya yang dilakukan oleh DPMPTSP Kota

Balikpapan pada tahun 2023 antara lain yaitu :

1. Pemeliharaan jaringan internet kantor

Pemeliharaan tersebut dilaksanakan dengan bekerjasama dengan pihak ketiga guna mendukung operasional Mal Pelayanan Publik Kota Balikpapan sehingga dapat lebih meningkatkan pelayanan terhadap pelayanan publik dan guna menyongsong strategi percepatan MPP Digital



Skema Keterhubungan Kriteria Pelayanan MPP Digital Kota Balikpapan



Pemeliharaan Jaringan Internet DPMPTSP Kota Balikpapan

2. Pengembangan aplikasi/software SPONTAN

Aplikasi Bank data yang dibangun di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Balikpapan digunakan untuk

mengintegrasikan data pemerintah daerah secara terpusat dan tersinkronisasi, juga sebagai manajemen arsip berkas data fisik ke digital pada setiap OPD. Pengembangan SPONTAN ini bertujuan untuk mempermudah dalam memberikan akses informasi data pemerintahan yang bersifat publik kepada OPD lain. Dengan detail pengembangan aplikasi sebagai berikut :

- a. Seluruh jenis layanan perizinan non oss dapat diakomodir dalam sistem SPONTAN versi Baru
 - b. Seluruh tahapan proses layanan SPONTAN versi baru (Registrasi, Verifikasi, Penerbitan, pelacakan/*Tracking*)
 - c. Menggunakan sistem baru yang lebih fleksibel (menu yang ada dapat diaplikasikan untuk beragam layanan perizinan tanpa memerlukan Tenaga Ahli Khusus/ dapat dikelola secara mandiri oleh petugas DPMPTSP
 - d. Memudahkan pengembangan modul-modul baru untuk Perizinan tanpa coding secara langsung
 - e. Fleksibel dan Dinamis, dapat dikonfigurasi sesuai dengan SOP Pelayanan Perizinan
 - f. User *Interface* dari *website* dibangun lebih interaktif
 - g. Tools yang disediakan lebih inklusif untuk pengembangan *Front-end*
 - h. Sangat ramah untuk pemula/ *User Friendly*
 - i. Notifikasi pemohon izin yang selesai melalui Whatsapp dan email
 - j. Perbaikan Sistem Informasi pengolahan data dashboard OSS RBA
 - k. Selama sistem berjalan tetap ada pemeliharaan/ *maintenance* selama 1 (satu) tahun
 - l. *Source* database & membuat dokumentasi setiap program menjadi milik DPMPTSP Kota Balikpapan
 - m. Migrasi data lama di SPONTAN ke database aplikasi baru
 - n. Tetap ada pendampingan untuk transfer ilmu (*knowledge*)
 - o. Melakukan pemeliharaan terhadap modul-modul SPONTAN yang sudah berjalan.
3. Pengembangan Aplikasi/*Software* (Aplikasi Pengaduan Layanan MPP,

Antrian Online dan SKM), dengan lingkup pekerjaan meliputi :

a. Ticketing pengaduan/permasalahan

Didalam akun pemohon terdapat pengaduan di DPMPSTSP dan pengaduan yang diluar SPONTAN dengan mendapatkan nomor tiket pengaduan

b. Perbaikan antrian online MPP data testing antrian web mpp yang masih belum sesuai dengan Pelayanan yang diinginkan

c. Rekap antrian MPP dan SKM

Perbaikan rekap layanan dashboard di SKM, penambahan fitur eksport utk responden.

d. SKM dikirim ke HP

- Sebelum isi SKM dari nomor HP tersebut dapat kirim link SKM
- Perbaikan Format untuk nomor antrian. No Layanan Terisi Otomatis sesuai Format dan link SKM dikirim ke No HP Pemohon.

e. Akses *dashboard* SKM per tenan

Dibuatkan akses login untuk melihat dashboard SKM utk masing-masing tenan sehingga bisa melihat nilai SKM setiap pelayan yang sudah dilakukan

f. Perbaikan *dashboard* SKM dan Antrian.

2. Sasaran Strategis : Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa indikator Nilai SAKIP DPMPSTSP Kota Balikpapan telah tercapai sebesar 99.76%. Indikator ini dapat terlaksana melalui :

a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, yang terdiri dari beberapa kegiatan sebagai berikut :

- Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (121%)
- Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah (115%)
- Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (120,46%)
- Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan

Pemerintahan Daerah (120%)

Hasil tersebut diatas menunjukkan bahwa pelayanan yang telah diberikan oleh bagian sekretariat DPMPTSP Kota Balikpapan sejauh ini dinilai sangat baik pelayanannya oleh seluruh karyawan internal DPMPTSP Kota Balikpapan. Namun hal tersebut layak nya dapat lebih dilakukan perbaikan Kembali dalam rangka mempertahankan dan meningkatkan mutu layanan.

3. Sasaran Strategis : Meningkatnya Kualitas Layanan Perizinan

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa indikator kinerja Presentase peningkatan Indeks Kepuasan Masyarakat telah tercapai sebesar **354,55%**. Indikator ini dapat terlaksana melalui Program Pelayanan Penanaman Modal telah tercapai sebesar 141% dan Kegiatan Kegiatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota dengan capaian kinerja sebesar 133%.

Untuk mencapai target indikator Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Bidang Pelayanan Perizinan, maka DPMPTSP Kota Balikpapan telah mengupayakan langkah-langkah strategis sebagai berikut :

1. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Balikpapan telah menyusun Standar Pelayanan dan Standar Operasional Prosedur, hal ini bertujuan agar dalam memberikan pelayanan DPMPTSP Kota Balikpapan diwajibkan memiliki sistem dan prosedur baku eksternal berupa standar pelayanan dan dipublikasikan sebagai jaminan adanya kepastian bagi penerima layanan
 - a. Standar Pelayanan yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Balikpapan Nomor:188.46/42/DPMPTSP/2020 Tentang Penetapan Standar Pelayanan dilingkungan Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu, Tanggal 28 Desember 2020. Standar Pelayanan mengatur dasar hukum, kualifikasi pelaksana pelayanan, peralatan/perlengkapan pelayanan, pencatatan dan pendataan, peringatan/sanksi, prosedur pelayanan.

b. SOP DPMPTSP Kota Balikpapan ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Balikpapan Nomor:188.46/42.a/DPMPTSP/2020 Tentang Penetapan Standar Operasional Prosedur dilingkungan Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu, Tanggal 28 Desember 2020, SOP memuat prosedur pelayanan perizinan yang memuat uraian prosedur setiap langkah, syarat-syarat permohonan, waktu pelaksanaan tiap langkah dalam prosedur serta output tiap langkah.

2. Pelaksanaan pengaduan masyarakat dapat dilalukan dengan cara :

- A. Langsung / tatap muka yaitu Pengaduan dapat dilaksanakan oleh masyarakat secara langsung yaitu datang ke DPMPTSP kota Balikpapan menemui Kasi Pengaduan Layanan Informasi atau ke Help Desk pada Front Oficce
- B. Tidak langsung, yaitu masyarakat dapat mengadukan masalah yang dihadapi yang terkait dengan perizinan atau hal lain yang menimbulkan rasa tidak nyaman dari pegawai DPMPTSP dengan cara tidak langsung melalui :

a). PPID

PPID adalah Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu di lingkungan DPMPTSP Kota Balikpapan yang dalam tugasnya dibantu oleh petugas Informasi yaitu Help Desk pada Front Oficce. Sedangkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi utama adalah Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Balikpapan yang juga membawahi PPID Perangkat Daerah se Kota Balikpapan

b). Si Tanggap

Masyarakat yang mempunyai keluhan/saran/kritik terhadap pelayanan Publik pada DPMPTSP kota Balikpapan juga dapat menghubungi Sitanggap yaitu Sistem Informasi dan Tanggapan Aduan Publik dengan Leading Sektor di Bagian Organisasi Setda Kota Balikpapan .

Masyarakat yang ingin menghubungi Sitanggap dapat melalui :

Website Balikpapan : www.balikpapan.go.id
Email : @ sitanggapbalikpapan@gmail.com
Twiter : @PemkotBPN
Facebook: www.facebook.com/pemkotbpn



Gambar 3.13
Manajemen Pengaduan DPMPTSP Kota Balikpapan
Sumber : Dokumentasi DPMPTSP Kota Balikpapan

c). Website

Masyarakat yang mempunyai keluhan/saran/kritik terhadap pelayanan Publik pada DPMPTSP kota Balikpapan juga dapat menghubungi ruang pengaduan pada website DPMPTSP Kota Balikpapan melalui Website : www.investasi.balikpapan.go.id

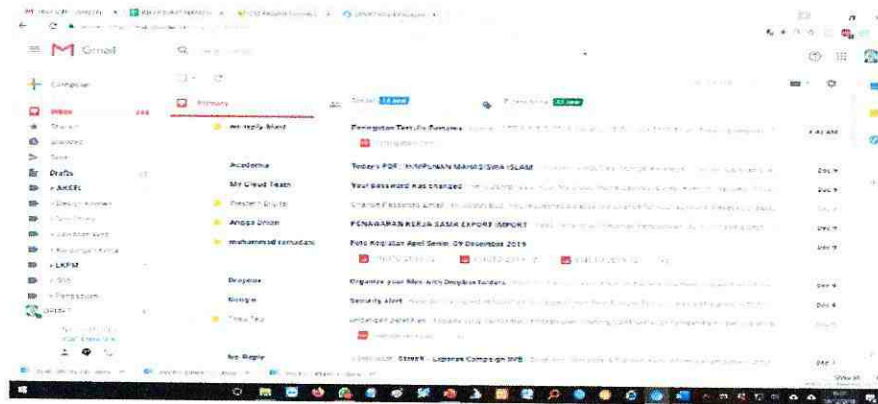


Gambar 3.14
Tampilan Website DPMPTSP Kota Balikpapan
Sumber : Dokumentasi DPMPTSP Kota Balikpapan

d). Email DPMPSTSP Kota Balikpapan

Masyarakat juga dapat mengirim keluhan/saran/kritik terhadap pelayanan Publik pada DPMPSTSP kota Balikpapan ataupun bertanya tentang Izin dan lain sebagainya melalui

Email : dpmpptsp.bpp@gmail.com



Gambar 3.15
email terkait keluhan/saran/kritik DPMPTSP Kota Balikpapan
Sumber : Dokumentasi DPMPTSP Kota Balikpapan

e). Layanan Pengaduan via WA

Demikian pula bila ada yang ingin berkomunikasi langsung / menelpon atau mengirim pesan melalui Whats App (WA) dapat menghubungi nomor Kontak person / *Customer Service* melalui Hand Phone di nomor :

- CS1 : 0815 45000010
- CS1 : 0815 45000012
- CS1 : 0815 45000013

f). *Whistle Blower System*

PNS pada Perangkat Daerah lain di Kota Balikpapan dapat melaporkan PNS DPMPTSP Kota Balikpapan bila disinyalir / diduga / dilihat melakukan hal yang berkaitan dengan Pungli, KKN, Gratifikasi pada PNS yang bersangkutan pada jalur Whistle Blower System pada Website DPMPTSP Kota Balikpapan, dengan menyertakan Tanda pengenal diri (KTP) dan bukti serta saksi yang lengkap

3. Peningkatan Penyampaian Informasi kepada masyarakat

Dalam rangka transparansi informasi kepada masyarakat, maka DPMPTSP Kota Balikpapan menyampaikan Informasi Pelayanan Publik melalui media Informasi Elektronik dan Non Elektronik:

I. Informasi elektronik melalui :

- a. Balikpapan Televisi (BTV)
- b. Radio KPFM
- c. Website DPMPTSP Kota Balikpapan
- d. Media Sosial : Instagram dan Facebook

II. Informasi Non elektronik melalui :

- a. Media Cetak Balikpapan Post
- b. Leaflet /Pamflet yang tersedia di ruang *Front Office*
- c. Poster
- d. Banner
- e. Sosialisasi melalui tatap muka dan
- f. Pendampingan penginputan izin OSS

3.2.7 Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Dalam rangka mencapai sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Balikpapan Tahun 2021-2026 tidak terlepas dari adanya dukungan sumber daya yang terdiri dari sumber daya manusia, sarana prasarana dan anggaran. Adapun analisis atas penggunaan sumber daya tersebut adalah sebagai berikut :

1. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber daya Manusia (SDM)

Pengaruh langsung terhadap kinerja organisasi dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya dapat ditentukan oleh faktor sumber daya manusia. Demikian pula, kemajuan organisasi sangat bergantung pada kualitas sumber daya manusia yang terdapat di dalamnya. Berdasarkan perhitungan Analisis Jabatan (ANJAB) dan Analisis Beban Kerja (ABK) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Balikpapan Kota Balikpapan diketahui bahwa

kebutuhan personil ASN berjumlah 77 orang. Namun untuk melaksanakan tugas dan fungsi, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Balikpapan Kota Balikpapan hanya didukung oleh 39 orang ASN/ PNS.

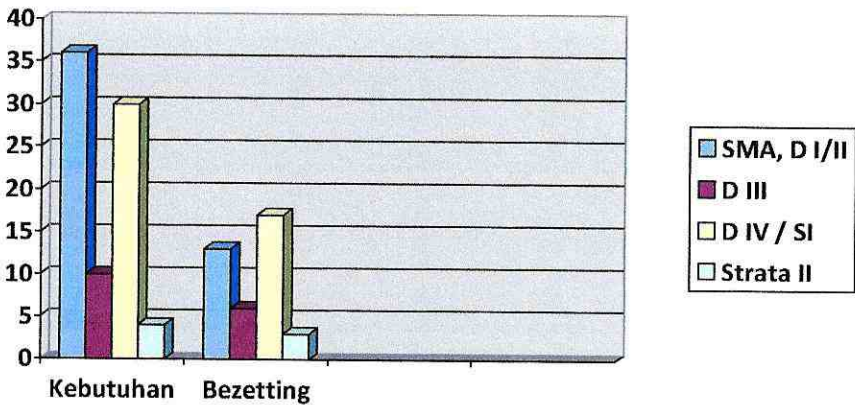
Tabel 3.2.9

Jumlah Aparatur Sipil Negara (PNS) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Balikpapan Menurut Jabatan dan Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah Pegawai	Keterangan
1	Perempuan	38	20 PNS, 18 Naban
2	Laki-Laki	33	19 PNS, 10 Naban, 4 THL
Jumlah Keseluruhan		71	

Sumber : Pengolahan Data Bidang Sekretariat DPMPTSP

Adapun data sumber daya manusia aparatur dapat dilihat dari 91 able91 i 91able91 i kan sebagaimana tertuang dalam diagram/ 91able berikut :



Grafik 3.3

Komposisi/Perbandingan Aparatur Sipil Negara (PNS) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Balikpapan menurut tingkat Pendidikan

Sumber : Pengolahan Data Bidang Sekretariat DPMPTSP

Dari gambaran tersebut di atas dapat dijelaskan bahwa kondisi sumber daya manusia pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu

Pintu Kota Balikpapan Kota Balikpapan di dominasi oleh kualifikasi pendidikan D4 / SI berjumlah 17 orang atau 57% dari target, kemudian diikuti oleh pendidikan SLTA/D1/D2 berjumlah 13 orang atau 36% dari target, pendidikan D3 berjumlah 6 orang atau 60% dari target, dan S2 berjumlah 3 orang atau 75%. Untuk mengatasi keterbatasan Sumber Daya Manusia yang dimiliki, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Balikpapan melakukan optimalisasi personil dengan menambah beban tugas terhadap personil yang ada dan mengusulkan tambahan pegawai ke BKPSDM Kota Balikpapan serta pengangkatan Tenaga Kontrak.

2. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sarana Prasarana

Analisis atas efisiensi penggunaan sarana dan prasarana pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Balikpapan adalah penggunaan sarana dan prasarana yang ada di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Balikpapan yang sesuai dengan fungsi dan kebutuhannya. Adapun sarana prasana yang dimiliki oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Balikpapan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.2.10
Jumlah Aset yang dimiliki dan tidak dipakai (Rp)
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota
Balikpapan

No.	Nama Barang	Jumlah Aset yang dimiliki (Rp)		Jumlah aset yang tidak dipakai (Rp)		Keterangan
		Unit	Rp (ribuan)	Unit	Rp (ribuan)	
1	Portable Generating Set	1	239,800.00	1	239,800.00	
2	Station Wagon	8	1,275,015.00	0	0.00	
3	Micro Bus (Penumpang 15 S/D 29 orang)	1	439.012,00	1	439.012,00	
4	Mini Bus (Penumpang 14 Orang ke Bawah)	4	277,050.00	2	102,050.00	
5	Sepeda Motor	17	364,818.93	1	13,600.00	
6	R O L	1	9.585,00	1	9.585,00	
7	Multisester Digital	2	9.900,00	0	0.00	
8	Global Positioning System	7	61,913.00	2	31,163.00	

No.	Nama Barang	Jumlah Aset yang dimiliki (Rp)		Jumlah aset yang tidak dipakai (Rp)		Keterangan
		Unit	Rp (ribuan)	Unit	Rp (ribuan)	
9	alat ukur universal lainnya (dst)	2	5.000,00	0	0.00	
10	Termometer Standar	1	19.250,00	1	19.250,00	
11	alat ukur lain-lain lainnya (dst)	1	4.900,00	0	0.00	
12	alat timbangan/biara lainnya (dst)	1	525,00	0	0.00	
13	Rak-Rak Penyimpan	7	61,180.00	1	4.155,00	
14	Mesin Ketik Manual Portable(11-13 inci)	1	3.679,50	0	0.00	
15	Mesin Ketik Manual Standard (14-16 inci)	1	6.204,00	0	0.00	
16	mesin hitung/mesin jumlah lainnya (dst)	2	11.000,00	0	0.00	
17	Mesin Fotocopy Folio	1	17.870,00	0	0.00	
18	Lemari Besi/Metal	18	74,500.00	10	21.800,00	
19	Rak Besi	37	171,334.00	1	24.398,00	
20	Rak Kayu	5	8.700,00	5	8.700,00	
21	Filing Cabinet Besi	15	171,334.00	10	14,755.00	
22	Brandkas	2	22,790.00	1	7.030,00	
23	CCTV - Camera Control Television System	4*	124,975.00	1	7.975,00	
24	Alat Penghancur Kertas	4	30,800.00	2	23.800,00	
25	Mesin Absensi	4	34,370.00	3	28,600.00	
26	LCD Projector/Infocus	1	9.950,00	0	0.00	
27	Alat Sidik Jari	2	7,198.00	2	7,198.00	
28	Mesin Antrian	1	15.400,00	0	0.00	
29	Papan Nama Instansi	3	44,340.00	1	6.380,00	
30	Papan Pengumuman	26	522,248.40	23	497,478.40	
31	Alat Kantor Lainnya	136	336,899.00	2	36.410,00	
32	Meja Kerja Besi/Metal	6	7,000.00	0	0.00	
33	Meja Kerja Kayu	4	103,621.00	2	90.190,00	
34	Kursi Besi/Metal	63	99,530.00	0	0.00	
35	Meja Rapat	2	98,500.00	1	3.000,00	
36	Tempat Tidur Besi	1	6.510,15	0	0.00	
37	Meja Tambahan	1	5.990,00	1	5.990,00	
38	Kursi Rapat	4	17.920,00	0	0.00	
39	Kursi Tamu	7	21.860,00	7	21.860,00	
40	Kursi Putar	1	97.625,00	1	97.625,00	
41	Kursi Lipat	6	6.600,00	0	0.00	
42	Sofa	11	44,912.00	1	5.830,00	
43	Meubeleur lainnya	2	203,388.00	1	198,488.42	

No.	Nama Barang	Jumlah Aset yang dimiliki (Rp)		Jumlah aset yang tidak dipakai (Rp)		Keterangan
		Unit	Rp (ribuan)	Unit	Rp (ribuan)	
44	Lemari Es	2	7.936,50	0	0.00	
45	A.C. Window	3	14.250,00	3	14.250,00	
46	A.C. Split	5	26,250.00	10	65.517,00	
47	Kipas Angin	4	3.929,40	0	0.00	
48	Televisi	33	1.489.158,00	6	46.958,00	
49	Loudspeaker	1	20.200,00	0	0.00	
50	Sound System	4	136,800.00	0	0.00	
51	Wireless	2	13.975,50	2	13.975,50	
52	Microphone	2	2.800,00	0	0.00	
53	Unit Power Supply	14	42.405,00	9	15,840.00	
54	Camera Video	1	44.900,00	0	0.00	
55	Alat Hiasan	2	1.150,00	2	1.150,00	
56	Tangga Aluminium	2	10.200,00	1	2.500,00	
57	Dispenser	5	13.656,00	1	3.000,00	
58	Gordyin/Kray	2	20.505,00	2	20.505,00	
59	Bracket Standing Peralatan	4	45.960,00	0	0.00	
60	Meja Kerja Pejabat Eselon II	2	5,400.00	2	5,400.00	
61	Meja Kerja Pejabat Eselon III	8	21,600.00	8	21,600.00	
62	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	4	3.410,00	4	3,410.00	
63	Kursi Kerja Pejabat Eselon II	2	9,600.00	1	5,000.00	
64	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	45	43,294.00	1	4,354.00	
65	Kursi Kerja Pejabat lainnya	2	4.000,00	2	4,000.00	
66	Audio Visual	1	117.535,00	0	0.00	
67	Microphone/Wireless MIC	3	19.740,00	0	0.00	
68	Uninterruptible Power Supply (UPS)	28	91,245.00	23	79,365.00	
69	peralatan studio audio lainnya (dst)	4	29,322.18	4	29,322.18	
70	Off Air TV Monitor	4	39.516,00	0	0.00	
71	Camera Electronic	2	19,602.00	1	4,950.00	
72	Layar Film/Projector	4	51,990.00	3	38,900.00	
73	Camera Digital	2	62.850,00	0	0.00	
74	Camera Conference	4	6.640,00	0	0.00	

No.	Nama Barang	Jumlah Aset yang dimiliki (Rp)		Jumlah aset yang tidak dipakai (Rp)		Keterangan
		Unit	Rp (ribuan)	Unit	Rp (ribuan)	
75	Mesin Barcode	1	4.983,00	0	0.00	
76	Telephone (PABX)	1	7.881,00	0	0.00	
77	Telephone Mobile	3	24.030,00	0	0.00	
78	Handy Talky (HT)	4	19.778,00	0	0.00	
79	Facsimile	1	10.015,00	1	10,015.00	
80	alat komunikasi sosial lainnya (dst)	2	63.099,00	2	63,099.00	
81	Alat Kedokteran umum lainnya	2	3.600,00	0	0.00	
82	Video Printer	1	5.035,00	0	0.00	
83	Distiling Apparatus	6	56.991,00	6	56,991.00	
84	alat peraga praktek sekolah bidang studi : ipa dasar lainnya (dst)	1	1.695,00	0	0.00	
	alat peraga praktek sekolah bidang studi : ipa lanjutan lainnya (dst)	1	16,455.00	1	16,455.00	
85	Layar	1	19.758,00	0	0.00	
86	recorder display lainnya (dst)	10	87,427.00	3	48,927.00	
87	Uninterrupted Power Supply (UPS)	1	1.000,00	1	1,000.00	
88	Air Purlier	10	71.500,00	0	0.00	
89	Target Drone (Simulasi Pesawat Sasaran Tembak Udara)	3	21,249.00	3	21,249.00	
90	Local Area Network (LAN)	2	88.600,00	2	88,600.00	
91	Komputer Jaringan lainnya	1	128,00	1	128.00	
92	P.C Unit	107	533,781.00	2	335,891.00	
93	Lap Top	19	510,218.00	0	0.00	
94	Note Book	30	337,432.00	14	188,718.00	
95	Tablet PC	36	335,022.00	10	23,962.50	
96	Personal Komputer lainnya	2	7,740.00	2	7,740.00	
97	CPU (Peralatan Mainframe)	1	3.200,00	1	3,200.00	
98	Hard Disk	3	6,809.00	1	1,925.00	
99	peralatan mainframe lainnya (dst)	1	12.100,00	1	12,100.00	
100	Scanner (Peralatan Mini Komputer)	4	123,849.00	1	3,960.00	
101	CPU (Peralatan Personal Komputer)	2	6,400.00	2	6,400.00	
102	Monitor	3	5,310.00	3	5,310.00	

No.	Nama Barang	Jumlah Aset yang dimiliki (Rp)		Jumlah aset yang tidak dipakai (Rp)		Keterangan
		Unit	Rp (ribuan)	Unit	Rp (ribuan)	
103	Printer (Peralatan Personal Komputer)	95	699,765.90	18	104,600.00	
104	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	2	64,591.00	1	45,155.00	
105	External	2	2,300.00	2	2,300.00	
106	External/ Portable Hardisk	4	9.988,00	0	0.00	
107	Peralatan Personal Komputer lainnya	7	13,448.00	1	2,000.00	
108	Server	3	372,900.00	0	0.00	
109	Router	1	54.495,00	0	0.00	
110	Modem	2	1831.3	1	103.20	
111	Switch	10	3.587,00	0	0.00	
112	Peralatan Jaringan lainnya	4	102,709.00	4	102,709.00	
113	Air Conditioning (AC)	10	118.500,00	0	0.00	
114	Peralatan Permainan lainnya	1	3.968,25	0	0.00	
115	Pompa Air	1	15,330.00	0	0.00	
116	Tool Kit Set	1	26,250.00	0	0.00	

Sumber : Rekapitulasi Kartu Inventaris Barang (KIB) B DPMPTSP Kota Balikpapan Tahun 2024

3. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Anggaran

Pengukuran efisiensi anggaran dilakukan dengan mengadaptasi ketentuan terkait pengukuran efisiensi anggaran yang berlaku pada tingkat Kementerian/Lembaga (K/L), yaitu sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.02/2017 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga. Pengukuran efisiensi berdasarkan ketentuan tersebut diperoleh dari formula sebagai berikut:

$$E = \frac{\sum_{i=1}^n ((PAKi \times CKi) - RAKi)}{\sum_{i=1}^n (PAKi \times CKi)} \times 100\%$$

Keterangan :

- E : Efisiensi
- CKi : Capaian keluaran i (kolom 6)
- PAKi : Pagu anggaran keluaran i (kolom 7)
- RAKi : Realisasi anggaran keluaran i (kolom 8)

Berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan Laporan Monitoring realisasi fisik dan keuangan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Balikpapan, efisiensi penggunaan sumber daya dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran perangkat daerah dapat dijelaskan pada tabel berikut

Tabel 3.2.11

Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya (Anggaran)

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KINERJA			ANGGARAN			EFISIENSI	KET
				TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PAGU	REALISASI	CAPAIAN		
1	Meningkatnya Capaian Nilai Realisasi Investasi	Persentase Pencapaian nilai realisasi investasi	%	100	128.02	128.02 %	2,581,039,533	2,215,897,803	85.85%	32.94%	Efisien
2	Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai SAKIP DPMPTSP Kota Balikpapan	Skor	75.5	75.32	99.76%	13,920,853,164	12,331,324,098	88.58%	11.21%	-
3	Meningkatnya Kualitas Layanan Perizinan	Persentase peningkatan Indeks Kepuasan Masyarakat	%	0.11	0.39	354.55 %	918,390,800	812,142,143	88.43%	75.06%	Efisien

Sumber : Pengolahan Data DPMPTSP

Berdasarkan tabel 3.2.11. analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya (anggaran) dapat diketahui bahwa antara capaian kinerja dengan capaian penyerapan anggaran sudah relatif baik karena meskipun terdapat anggaran yang tidak terserap 100%, tetapi kegiatan telah dilaksanakan secara optimal sesuai dengan kebutuhan riil di lapangan. Hal ini menunjukkan bahwa anggaran yang disediakan untuk pencapaian sasaran pembangunan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu pintu Kota Balikpapan tahun 2024 telah mencukupi serta terdapat efisiensi anggaran dan efektivitas penggunaan dana yang dijabarkan sebagai berikut :

- 1) Anggaran yang disediakan untuk pencapaian sasaran **Meningkatnya Capaian Nilai Realisasi Investasi** telah mencukupi dengan capaian kinerja 128,02% dan capaian penyerapan anggaran 85,85% serta terdapat tingkat efisiensi anggaran sebesar 32,94%.

Efisiensi tersebut terjadi pada program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal disebabkan oleh jumlah kegiatan usaha yang dilakukan pengawasan melebihi target karena memaksimalkan kegiatan pengawasan dan pendampingan baik secara offline maupun online. Sehingga dengan adanya efisiensi tersebut mendorong tercapainya capaian kinerja secara maksimal.

- 2) Anggaran yang disediakan untuk pencapaian sasaran **Meningkatnya Kualitas Layanan Perizinan** telah mencukupi dengan capaian kinerja 354,55% dan capaian penyerapan anggaran 88,43% serta terdapat tingkat efisiensi anggaran sebesar 75,06%.

Efisiensi tersebut terjadi pada Program Pelayanan Penanaman Modal Kegiatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan Penyediaan Layanan Terpadu Perizinan dan Non perizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik dimana dokumen perizinan yang

diterbitkan melalui laman *oss.go.id* terklasifikasi resiko rendah sehingga realisasi tinggi karena proses perizinan resiko rendah otomatis langsung terbit dan tidak membutuhkan blangko tertentu untuk pencetakannya.

Di samping itu, analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya (anggaran) sebagaimana tabel 3.2.11 juga dapat diketahui bahwa terdapat capaian kinerja yang tidak mencapai 100% dan anggarannya juga tidak terserap 100% sehingga tidak dapat diakui efisien dan efektivitas penggunaan anggarannya yang dijabarkan sebagai berikut:

- 1) Anggaran yang disediakan untuk pencapaian sasaran **Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah** terserap 88.58% sehingga mempengaruhi capaian kerjanya yang hanya **99,76%** hal tersebut terjadi dikarenakan :
 - a. Kegiatan administrasi keuangan daerah, sub kegiatan penyediaan gaji dan tunjangan ASN, hal ini disebabkan karena penganggaran gaji dianggarkan untuk 60 orang PNS sedangkan jumlah PNS sesuai dengan yang terdaftar pada aplikasi SIM GAJI adalah sejumlah 39 orang, sehingga terdapat selisih penganggaran yang menyebabkan presentase realisasi anggaran menjadi rendah
 - b. Kegiatan Pemeliharaan Barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah, sub kegiatan pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya, hal ini disebabkan oleh kondisi peralatan dan mesin pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Balikpapan masih dalam kondisi baik dan tidak terjadi kerusakan sehingga anggaran pemeliharaan belum terserap secara maksimal.

3.3 Realisasi Anggaran Tahun 2024

Penyerapan anggaran belanja pada tahun 2024 sebesar 88,17% dari total anggaran yang dialokasikan. Adapun anggaran dan realisasi anggaran yang digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan Perjanjian Kinerja tahun 2024 Perubahan adalah sebagai berikut :

Tabel 3.3
Realisasi Anggaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu Kota Balikpapan Tahun 2024

No.	Uraian	Anggaran		
		Pagu	Realisasi	Capaian (%)
1	2	3	4	5
	Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	13,920,853,164	12,331,324,098	88.58%
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	13,920,853,164	12,331,324,098	88.58%
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	8,750,157,000	7,718,407,846	88.21%
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	8,750,157,000	7,718,407,846	88.21%
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1,403,242,588	1,267,489,993	90.33%
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	43,973,100	39,362,480	89.51%
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	49,681,000	46,830,000	94.26%
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	588,844,400	514,418,300	87.36%
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	74,999,000	59,735,000	79.65%
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	33,500,000	32,538,000	97.13%
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	612,245,088	574,606,213	93.85%
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2,616,896,400	2,496,606,390	95.40%
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	10,000,000	6,250,000	62.50%
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	575,454,900	558,076,530	96.98%
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2,031,441,500	1,932,279,860	95.12%
	Pemeliharaan Barang milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1,150,557,176	848,819,869	73.77%
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	676,501,564	448,668,240	66.32%
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	274,163,612	203,137,500	74.09%

No.	Uraian	Anggaran		
		Pagu	Realisasi	Capaian (%)
1	2	3	4	5
	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	199,892,000	197,014,129	98.56%
	Meningkatnya Capaian Nilai Realisasi Investasi	2,581,039,533	2,215,897,803	85.85%
	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	185,250,000	135,385,700	73.08%
	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	100,000,000	54,390,700	54.39%
	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	100,000,000	54,390,700	54.39%
	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	85,250,000	80,995,000	95.01%
	Penyediaan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	85,250,000	80,995,000	95.01%
	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	693,674,000	662,922,382	95.57%
	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	693,674,000	662,922,382	95.57%
	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	530,998,000	522,673,539	98.43%
	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota	162,676,000	140,248,843	86.21%
	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	1,239,202,000	991,091,171	79.98%
	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	1,239,202,000	991,091,171	79.98%
	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi Pelaku Usaha dalam Merealisasikan Kegiatan Usahanya	226,318,000	157,088,513	69.41%
	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	662,384,000	606,182,858	91.52%
	Pengawasan Penanaman Modal	350,500,000	227,819,800	

No.	Uraian	Anggaran		
		Pagu	Realisasi	Capaian (%)
1	2	3	4	5
	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	462,913,533	426,498,550	92.13%
	Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	462,913,533	426,498,550	92.13%
	Pengelolaan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	462,913,533	426,498,550	92.13%
	Meningkatnya Kualitas Layanan Perizinan	918,390,800	812,142,143	88.43%
	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	918,390,800	812,142,143	88.43%
	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	918,390,800	812,142,143	88.43%
	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	667,020,000	571,495,900	85.68%
	Penyediaan dan Pengelolaan Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	137,989,000	133,967,565	97.09%
	Pemantauan, Analisis, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	113,381,800	106,678,678	94.09%
	TOTAL	17,420,283,497	15,359,364,044	88.17%

Sumber : Pengolahan Data DPMPTSP

Pada Tahun Anggaran 2024, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu pintu Kota Balikpapan melaksanakan 6 program, 10 kegiatan dan 24 sub kegiatan dengan anggaran sebesar **Rp 17.420.283.497,-** serta Realisasi anggaran di tahun 2024 sebesar **Rp 15.359.364.044,-** atau dengan realisasi capaian sebesar **88,17%** dan dengan persentase capaian fisik kegiatan sebesar **93,58%**.

BAB IV PENUTUP

a. Kesimpulan

Secara umum, Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kota Balikpapan pada tahun 2024 telah dapat memenuhi tugas dan fungsi yang dibebankan. Hal ini tercermin dari 3 (tiga) sasaran strategis yang ditargetkan melalui indikator kinerja sebanyak 3 (tiga) Indikator pada tahun 2024, pada **Sasaran I yaitu “Meningkatnya Capaian Nilai Realisasi Investasi”** yang rata-rata capaiannya **128,02%** atau dengan predikat **melebihi target**, untuk **Sasaran II yaitu “Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah”** mencapai rata-rata yaitu **99,76%** atau dengan predikat **tidak tercapai**, sedangkan untuk pencapaian **Sasaran III yaitu “Meningkatnya Kualitas Layanan Perizinan”** rata-rata capaiannya **354,55%** atau dengan predikat **melebihi target**.

Pencapaian ini tidak terlepas dari pelaksanaan perencanaan yang telah ditetapkan dan komitmen dari seluruh stakeholder yang terkait dalam mendukung pencapaian realisasi dari target yang telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2024. Sedangkan pada akuntabilitas keuangan realisasinya mencapai **88,17%** dari total Anggaran DPA Perubahan yang dilakukan oleh DPMPPTSP dilakukan sesuai dengan kebutuhan organisasi DPMPPTSP Kota Balikpapan.

Untuk sasaran ketiga yaitu Meningkatkan Kualitas Pelayanan Perizinan Terpadu yang Prima telah melebihi target yang ditetapkan yaitu Skor SKM Pelayanan Perizinan tahun 2024 mencapai kenaikan Indeks dari skor nilai **95,50** dari capaian tahun sebelumnya yaitu capaian skor SKM dengan nilai **95,13** untuk Indikator **Skor Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)** Nilai realisasi kepuasan masyarakat pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Balikpapan.

Sehingga dapat diambil kesimpulan untuk capaian ketiga sasaran strategis untuk DPMPPTSP Kota Balikpapan pada tahun 2024 diatas, semua

tercapai dengan hasil yang **“sangat baik”**, dengan rata-rata nilai capaian > 100% sehingga rata-rata capaian tersebut dapat dijadikan salah satu tolak ukur keberhasilan bagi pencapaian realisasi antara dokumen perencanaan dengan realisasi program dan kegiatan DPMPTSP Kota Balikpapan. Pencapaian tersebut juga dijadikan sebagai sumber pemecut semangat bagi DPMPTSP Kota Balikpapan di masa mendatang dalam hal peningkatan pencapaian target Sasaran Strategis dan Pelayanan Perizinan Prima secara seluruh perizinan dan non perizinan yang dilayani oleh DPMPTSP Kota Balikpapan.

b. Tindak lanjut

Dalam meningkatkan kinerja maka terdapat hal-hal yang perlu ditingkatkan antara lain:

1. Perlu adanya kerjasama seluruh pihak yang terkait dalam proses perencanaan program dan kegiatan yang akan diusulkan pada tahun yang akan datang;
2. Penetapan program dan kegiatan yang tepat sasaran sehingga sasaran serta tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai memenuhi target yang direncanakan;
3. Memprioritaskan anggaran tepat guna dan tepat sasaran sehingga anggaran dapat terealisasi secara maksimal;
4. Perlu ditetapkan adanya Formulasi dari target indikator kinerja dalam perjanjian kinerja;
5. Peningkatan Sumber daya Manusia (SDM) Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kota Balikpapan, baik secara kualitas dan kuantitas yang memiliki relevansi kuat dengan penyelenggaraan tugas dan tanggung jawab melalui bimbingan teknis;
6. Pemutakhiran dan penyusunan Standar Pelayanan dan Standar Operasional Prosedur (SP/SOP) terkait dengan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kota Balikpapan.
7. Peningkatan Inovasi Pelayanan dengan memanfaatkan teknologi sehingga mendukung Kota Balikpapan sebagai SMART CITY.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ini diharapkan dapat

memacu pelaksanaan Zona Integritas yaitu OPD yang mempunyai komitmen untuk mewujudkan wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBK/WBBM) sehingga ke depan akan tercipta sasaran dan hasil kerja yang dapat dipertanggungjawabkan.

Akhirnya semoga Laporan Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Balikpapan Tahun 2024 ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang berkepentingan dan semoga target kinerja yang diinginkan dalam menunjang pencapaian visi Kota Balikpapan **“Terwujudnya Balikpapan Sebagai Kota Terkemuka Yang Nyaman Dihuni, Modern, dan Sejahtera dalam Bingkai Madinatul Iman”** setiap tahun senantiasa dapat tercapai.

Balikpapan, 24 Februari 2025
Kepala DPMPTSP Kota Balikpapan

HASBULLAH HELMI, A.P. M.Si

LAMPIRAN

1. Matriks Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021 – 2026
2. Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2024
3. Rencana Aksi (RENAKSI) Tahun 2024
4. SK Indikator Kinerja Utama (IKU) / SK Indikator Kinerja Utama (IKU) Perubahan Tahun 2021 – 2026
5. Perjanjian Kinerja (PK) Perubahan Tahun 2024
6. Pengukuran Kinerja Tahun 2024
7. Piagam Penghargaan Tahun 2024
8. Laporan Hasil Evaluasi atas Implementasi Sistem AKIP dari Inspektorat Tahun Sebelumnya

Matrik Renstra DPMPPTSP Tahun 2022-2026 Sesuai Kepmendagri 050_5889 tahun 2021

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome), kegiatan (output), Sub Kegiatan (keluaran) Sesuai Kepmendagri 050_5889 Tahun 2021	Sasaran Sesuai Kepmendagri 050_5889 Tahun 2021	Uraian Capaian pada tahun Awal Perencanaan 2020-2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi		
							Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026					
							Target	Rp ('000)	Target	Rp ('000)	Target	Rp ('000)	Target	Rp ('000)	Target	Rp ('000)			Target	Rp ('000)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)		
Meningkatnya Nilai Realisasi Investasi Daerah	Meningkatnya Capaian Nilai Realisasi Investasi					3.018	3.330	3.530		3.760		4.080		4.440		4.440				
						476,11%	100%	100%		100%		100%		100%		100%				
		2.18.02	PROGRAM PENGEMBANGAN IKUM PENANAMAN MODAL	Nilai Realisasi Investasi (Triliun Rp.)	%	N/A	5%	300.000	5%	315.000	5%	425.250	5%	574.087,50	5%	775.018	25%	2.389.355,50	DPMPPTSP	Bali
		2.18.02.2.01	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pencapaian nilai realisasi investasi	%	N/A	20%	150.000	20%	100.000	20%	200.000	20%	300.000	20%	400.000	100%	1.150.000	DPMPPTSP	Bali
		2.18.02.2.01.01	Penerapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Persentase Rancangan Peraturan Daerah (Jumlah Perda/Perwali) yang disahkan	Dokumen	0	1	150.000	1	100.000	1	100.000	1	150.000	1	200.000	5	700.000	DPMPPTSP	Bali
		2.18.02.2.01.02	Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Kegiatan Usaha	N/A		100.000	5	100.000	5	100.000	5	150.000	5	200.000	15	450.000	DPMPPTSP	Bali
		2.18.02.2.02	Penetapan Model Pembiayaan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Persentase dokumen peta potensi yang diterbitkan	%	0	20%	150.000	20%	215.000	20%	225.250	20%	274.087,50	20%	375.018	100%	1.239.355,50	DPMPPTSP	Bali
		2.18.02.2.02.01	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	N/A	1	150.000	1	140.000		140.000		150.000	1	175.000	3	755.000	DPMPPTSP	Bali
		2.18.02.2.02.02	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	Jumlah Peta Potensi Investasi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	Dokumen	1	1	-	1	75.000	1	85.250	1	124.087,50	1	200.018	5	484.355,50	DPMPPTSP	Bali

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome), kegiatan (output), Sub Kegiatan (Keluaran) Sesuai Keppmendagri 050_5889 Tahun 2021	Satuan Sesuai Keppmendagri 050_5889 Tahun 2021	Data Capaian pada tahun Awal Perencanaan Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada akhir periode Rencana Perangkaan		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi		
							Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target	Rp ('000)	Target	Rp ('000)			Target	Rp ('000)
							Target	Rp ('000)	Target	Rp ('000)	Target	Rp ('000)	Target	Rp ('000)	Target	Rp ('000)								
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)					
		2.18.03	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Persentase minat investasi dalam kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah	%	30%	80%	650.000	85%	662.676	90%	915.409	95%	1.024.416	100%	1.096.987	100%	4.349.488	DPMPTSP	Bali				
		2.18.03.2.01	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kenaikan jumlah kegiatan Promosi Penanaman Modal	%	0	5%	850.000	5%	662.676	5%	915.409	5%	1.024.416	5%	1.096.987	25%	4.349.488	DPMPTSP	Bali				
		2.18.03.2.01.01	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah yang Mengatur Promosi Penanaman Modal	Dokumen	1	1	150.000	1	162.676	0	0	0	0	1	266.987	28	1.049.488	DPMPTSP	Bali				
		2.18.03.2.01.02	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	Dokumen	2	4	500.000	4	500.000	6	915.409	6	1.024.416	6	800.000	39	3.300.000	DPMPTSP	Bali				
		2.18.05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Persentase Perusahaan (debit/lien/necking) yang difasilitasi permasalahan penanaman modalnya	%	N/A	100%	400.000	100%	400.000	100%	540.000	100%	729.000	100%	984.150	100%	3.053.150	DPMPTSP	Bali				
		2.18.05.2.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penyampaian LKPM	LKPM	1241 LKPM	300 LKPM	400.000	315 LKPM	400.000	330 LKPM	540.000	345 LKPM	729.000	360 LKPM	984.150	1650 LKPM	3.053.150	DPMPTSP	Bali				
		2.18.05.2.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penantuan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Penantuan Pelaksanaan Penanaman Modal	Kegiatan Usaha	N/A	4	5.000	4	5.000	4	5.000	4	5.000	4	5.000	20	0	DPMPTSP	Bali				
		2.18.05.2.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Pelaku Usaha	0	100	200.000	100	200.000	125	270.000	150	365.000	200	450.000	675	1.485.000	DPMPTSP	Bali				
		2.18.05.2.01.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan	Kegiatan Usaha	N/A	6	185.000	6	185.000	10	265.000	14	359.000	16	529.150	51	1.543.150	DPMPTSP	Bali				

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome), kegiatan (output), Sub Kegiatan (keluaran) Sesuai Keppmendagri 050_5889 Tahun 2021	Satuan Sesuai Keppmendagri 050_5889 Tahun 2021	Data Capaian pada tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi		
							Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026							
							Rp ('000)		Rp ('000)		Rp ('000)		Rp ('000)		Rp ('000)		Rp ('000)				Rp ('000)	
							Target	Rp ('000)	Target	Rp ('000)	Target	Rp ('000)	Target	Rp ('000)	Target	Rp ('000)	Target	Rp ('000)			Target	Rp ('000)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)			
	2.18.06		PROGRAM PENGELolaan DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Persentase data dan informasi perizinan dan non perizinan yang berlaku efektif	%	83,45	84	500.000	85	525.000	86	708.750	87	955.812,50	88	1.291.696	88	3.982.256,50	DPMP TSP	Baliapp an		
	2.18.06.2.01		Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah	Rasio Jumlah Permintaan Data dan Informasi yang terpenuhi	%	100	100	500.000	100	525.000	100	708.750	100	955.812,50	100	1.291.696	100	3.982.258,50	DPMP TSP	Baliapp an		
	2.18.06.2.01.01		Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Didata, Dikaji dan Dimanfaatkan	Dokumen	N/A	1	500.000	1	525.000	1	708.750	1	955.812,50	1	1.291.696	5	3.982.258,50	DPMP TSP	Baliapp an		
																		DPMP TSP	Baliapp an			
																		DPMP TSP	Baliapp an			

Tujan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome), kegiatan (output), Sub Kegiatan (keluaran) Sesuai Kepmendagri 650_5889 Tahun 2021	Saluran Sesuai Kepmendagri 650_5889 Tahun 2021	Data Capaian pada tahun Perencanaan Awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi		
							Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah					
							Target	Rp ('000)	Target	Rp ('000)	Target	Rp ('000)	Target	Rp ('000)	Target	Rp ('000)	Target	Rp ('000)			Target	Rp ('000)
							(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)			
Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Atas Layanan Pemendagri				Indeks Kepuasan Masyarakat (Nilai)	89	89,1		89,2		89,3		89,4		89,5		89,5						
	Meningkatnya Kualitas Layanan Perizinan			Persentase peningkatan Indeks Kepuasan Masyarakat	0,73%	0,11%		0,11%		0,11%		0,11%		0,11%		0,11%						
		2.18.04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Persentase Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan yang diterbitkan	66	67	900.000	68	900.000	69,00	1.215.000	70	1.640.250	71	2.214.337,50	71	6.359.587,50	DPMP TSP	Baikpap an			
		2.18.04.2.01	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelayanan Penerbitan perizinan dan non perizinan (Dokumen)	4.351	11596	900.000	11596	900.000	11600	1.215.000	11610	1.640.250	11620	2.214.337,50	58022	6.859.587,50	DPMP TSP	Baikpap an			
		2.18.04.2.01.01	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	4528	1500	600.000	1500	600.000	1500	835.000	1500	1.000.000	1500	1.200.000	7.500	4.235.000	DPMP TSP	Baikpap an			
		2.18.04.2.01.02	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Mendapat Pemenuhan Pemenuhan Komitmen Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Penanaman Modal	N/A	96	150.000	96	150.000	100	150.000	110	250.000	120	400.000	522	1.100.000	DPMP TSP	Baikpap an			
		2.18.04.2.01.03	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengabdian Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Jumlah Orang yang Memperoleh Layanan Konsultasi dan Teknologinya Pengabdian Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	216	10000	150.000	10000	150.000	10000	230.000	10000	390.250	10000	614.337,50	50.000	1.534.587,50	DPMP TSP	Baikpap an			
		2.18.04.2.01.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	N/A	50	150.000	50	150.000	50	230.000	50	390.250	50	614.337,50	250	1.534.587,50	DPMP TSP	Baikpap an			

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome), kegiatan (output), Sub Kegiatan (keluaran) Sesuai Kepmendagri 650_5889 Tahun 2021	Sesuai Kepmendagri 650_5889 Tahun 2021	Data Capaian pada tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
							Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
							Target	Rp ('000)	Target	Rp ('000)	Target	Rp ('000)	Target	Rp ('000)	Target	Rp ('000)	Target	Rp ('000)	Target	Rp ('000)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
							(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
(1)	Meningkatnya Nilai Realisasi Investasi Daerah	(2)	(4)	(5)		(6)	3.330	3.530	3.780	4.080	4.440		4.440																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome), kegiatan (output), Sub Kegiatan (Keluaran) Sesuai Kepmendagri 050_5889 Tahun 2021	Satuan Sesuai Kepmendagri 050_5889 Tahun 2021	Data Capaian pada tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi					
							Tahun 2022			Tahun 2023			Tahun 2024			Tahun 2025					Tahun 2026			Kondisi: Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
							Target		Rp ('000)	Target		Rp ('000)	Target		Rp ('000)	Target		Rp ('000)			Target		Rp ('000)	Target	Rp ('000)
							(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)							
							(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)							
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	75,39	8.935.959,90	77,5	8.875.431	79	9.512.474	80,5	9.735.687	81	9.986.482	81	47.046.043,90	DPMTSP	Bali					
		2.18.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Keuangan Daerah	Nilai	75,39														Bali					
		2.18.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	14 Bulan	60	8.935.959,90	60	8.875.431	60	9.512.474	60	9.735.687	60	9.986.482	60	47.046.043,90	DPMTSP	Bali					
		2.18.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	4 Laporan	4		4		4		4		4		4		DPMTSP	Bali					
		2.18.01.2.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akutansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akutansi SKPD	Dokumen	1 laporan	1		1		1		1		1		1		DPMTSP	Bali					
		2.18.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	2 laporan	2		2		2		2		2		2		DPMTSP	Bali					
		2.18.01.2.02.06	Pengadaan dan Penyediaan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Dokumen	1 Laporan	24		24		24		24		24		24		DPMTSP	Bali					
		2.18.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Laporan	24 laporan	24		24		24		24		24		24		DPMTSP	Bali					
		2.18.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Dokumen	13 laporan	13		13		13		13		13		13		DPMTSP	Bali					

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome), kegiatan (output), Sub Kegiatan (keluaran) 1050_5889 Tahun 2021	Sabuan Sesuai Kepmendagri 1050_5889 Tahun 2021	Data Capaian pada tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggun g-jawab	Lokasi																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
							Tahun 2022			Tahun 2023			Tahun 2024			Tahun 2025					Tahun 2026			Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
							Target		Rp ('000)	Target		Rp ('000)	Target		Rp ('000)	Target		Rp ('000)			Target		Rp ('000)	Target	Rp ('000)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
							(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
							(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	76,5	77,5	79	80,5	81																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												</

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome), kegiatan (output), Sub Kegiatan (Keluaran) Sesuai Keppmendagri 1050_5889 Tahun 2021	Satian Sesuai Keppmendagri 1050_5889 Tahun 2021	Data Capaian pada tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab						
							Tahun 2022			Tahun 2023			Tahun 2024			Tahun 2025					Tahun 2026			Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		
							Target		Rp ('000)	Target		Rp ('000)	Target		Rp ('000)	Target		Rp ('000)			Target		Rp ('000)	Target		Rp ('000)
							(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)								
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)													(19)	(20)						
		2.18.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Nilai	74,7	77	-	78,5	-	79	-	81	-	81,5	-	81,5		DPMPPTSP	Balikpapan an						
		2.18.01.2.05.01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Unit	2	2		2		2		2		2		10		DPMPPTSP	Balikpapan an						
		2.18.01.2.05.02	Pengadaan Pakelan Dinas Beserta Akibat Kelengkapan	Jumlah Paket Pakelan Dinas beserta Akibat Kelengkapan	Paket	70	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0		DPMPPTSP	Balikpapan an						
		2.18.01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen	12	12		12		12		12		12		12		DPMPPTSP	Balikpapan an						
		2.18.01.2.05.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Dokumen	12	12		12		12		12		12		12		DPMPPTSP	Balikpapan an						
		2.18.01.2.05.05	Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dokumen	60	60		60		60		60		60		60		DPMPPTSP	Balikpapan an						
		2.18.01.2.05.09	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	30	30		30		30		30		30		30		DPMPPTSP	Balikpapan an						

Tujan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome), kegiatan (output), Sub Kegiatan (Keluaran) Sesuai Kepmendagri 050_5889 Tahun 2021	Satuan Sesuai Kepmendagri 050_5889 Tahun 2021	Data Capaian pada tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi			
							Tahun 2022			Tahun 2023			Tahun 2024			Tahun 2025					Tahun 2026		
							Target		Rp ('000)	Target		Rp ('000)	Target		Rp ('000)	Target		Rp ('000)			Target		Rp ('000)
							(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	76	480.000	77	830.000	78,5	1.027.000	80,5	1.205.000	81	1.398.000	81	4.940.000	DPMPPTSP	Balikpapan			
		2.18.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Nilai	75.1														(19)	(20)		
		2.18.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disiapkan	Paket	1	1	30.000	1	40.000	1	50.000	1	60.000	1	70.000	5	250.000	DPMPPTSP	Balikpapan			
		2.18.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disiapkan	Paket	3	6	100.000	13	200.000	13	250.000	13	300.000	13	350.000	58	1.200.000	DPMPPTSP	Balikpapan			
		2.18.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disiapkan	Paket	4	4	150.000	4	250.000	4	312.000	4	350.000	4	408.000	20	1.470.000	DPMPPTSP	Balikpapan			
		2.18.01.2.06.05	Penyediaan Barang Celakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Celakan dan Penggandaan yang Disiapkan	Paket	3	3	50.000	3	75.000	3	100.000	3	125.000	3	150.000	15	500.000	DPMPPTSP	Balikpapan			
		2.18.01.2.06.08	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	Laporan	0	1	-	1	15.000	1	15.000	1	20.000	1	20.000	5	70.000	DPMPPTSP	Balikpapan			
		2.18.01.2.06.09	Penyenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	50	30	150.000	35	250.000	40	300.000	45	350.000	50	400.000	200	1.450.000	DPMPPTSP	Balikpapan			
		2.18.01.2.06.10	Penelaahan Asip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penelaahan Asip Dinamis pada SKPD	Dokumen	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	5		DPMPPTSP	Balikpapan			

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome), kegiatan (output), Sub Kegiatan (keluaran) Sesuai Kepmendagri 650_5893 Tahun 2021	Satuan Sesuai Kepmendagri 650_5893 Tahun 2021	Data Capaian pada tahun Awal Perencanaan Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi	
							Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perandaal Target Rp ('000)
							Target	Rp ('000)	Target	Rp ('000)	Target	Rp ('000)	Target	Rp ('000)	Target	Rp ('000)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
		2.18.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	IKM Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai	75.08	524.040,10	77.5	550.000	79	750.000	80	875.000	80.5	990.000	80.5	3.699.040,10	DPMPTSP	Baliapp an
		2.18.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pakainya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pakainya	Unit	24 Unit	330.000	31	350.000	31	400.000	36	450.000	36	470.000	36	2.000.000	DPMPTSP	Baliapp an
		2.18.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Pentinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lain-lainnya	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Pentinannya	Unit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DPMPTSP	Baliapp an
		2.18.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DPMPTSP	Baliapp an
		2.18.01.2.09.06	Pemeliharaan Perlalatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Perlalatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihar	Unit	-	194.040,10	8	200.000	8	250.000	8	275.000	8	320.000	8	1.239.040,10	DPMPTSP	Baliapp an
		2.18.01.2.09.07	Pemeliharaan Asel Telap Lainnya	Jumlah Asel Telap Lainnya yang Dipelihara	Unit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DPMPTSP	Baliapp an
		2.18.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihar/Direhabilitasi	Unit	-	100.000	1	100.000	1	100.000	1	150.000	1	200.000	3	450.000	DPMPTSP	Baliapp an
		2.18.01.2.09.10	Prasana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihar/Direhabilitasi	Unit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DPMPTSP	Baliapp an
		2.18.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihar/Direhabilitasi	Unit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DPMPTSP	Baliapp an
				JUMLAH			14.250.000		14.643.107		16.828.863		18.600.263		20.721.670,50		85.043.923,50		

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Balikpapan
Tahun 2024

Unit Organisasi : 2.18.0.00.0.00.01.0000 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Sub Unit Organisasi : 2.18.0.00.0.00.01.0000 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Kode	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2024					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Tolok Ukur	Target
									15.620.000.000,00			18.225.263.000,00
2									15.620.000.000,00			18.225.263.000,00
2	18								15.620.000.000,00			18.225.263.000,00
2	18	01							13.159.921.800,00			13.600.697.000,00
2	18	01	2.02						8.875.431.000,00			9.735.697.000,00
2	18	01	2.02	01		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						
						Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	IKM Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	- Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATA NASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	60 Orang /bulan
2	18	01	2.06			Administrasi Umum Perangkat Daerah			1.353.128.300,00			1.205.000.000,00
2	18	01	2.06	01		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor						
						Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	- Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATA NASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Kantor yang Disediakan	1 Paket
2	18	01	2.06	02		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						
						Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	- Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATA NASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	7 Paket
2	18	01	2.06	04		Penyediaan Bahan Logistik Kantor						
						Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	- Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATA NASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket
2	18	01	2.06	05		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan						
						Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	- Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATA NASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket
									74.999.000,00			125.000.000,00

Kode			Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025					
			Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja			
								Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target		
2	18	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	- Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	81 Nilai	1 Laporan	80.5 Nilai	27.585.000,00	PENDAPATA NASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	20.000.000,00
	2	18	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	- Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	81 Nilai	40 Laporan	80.5 Nilai	470.000.000,00	PENDAPATA NASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	40 Laporan
2	18	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	IKM Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	- Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	80 Nilai	1 Laporan	80 Nilai	10.000.000,00	PENDAPATA NASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	10.000.000,00
2	18	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	IKM Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	- Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	80 Nilai	4 Laporan	80 Nilai	550.000.000,00	PENDAPATA NASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4 Laporan	800.000.000,00
2	18	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	IKM Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	- Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	80 Nilai	3 Laporan	80 Nilai	1.671.362.500,00	PENDAPATA NASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	3 Laporan	975.000.000,00
2	18	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	IKM Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	- Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	80 Nilai	24 Unit	79 Nilai	350.000.000,00	PENDAPATA NASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	24 Unit	450.000.000,00
2	18	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	IKM Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	- Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	80 Nilai	24 Unit	79 Nilai	350.000.000,00	PENDAPATA NASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	24 Unit	450.000.000,00

Kode			Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025					
			Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Catatan Penting	Target Capaian Kinerja			
								Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Tolok Ukur	Target
2	18	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya										
					Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	IKM Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	- Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	80 Nilai	8 Unit	79 Nilai	PENDAPATA N/ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	8 Unit	275.000.000,00
2	18	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya										
					Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	IKM Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	- Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	80 Nilai	1 Unit	79 Nilai	PENDAPATA N/ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	150.000.000,00
2	18	02			PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL										
2	18	02	2.01		Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota										
2	18	02	2.01	01	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal										
					Persentase Pelaku Usaha yang Mendapat Manfaat Insentif Bidang Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Persentase Rancangan Peraturan Daerah (Jumlah Perda/Perwali/Raperwali) yang disahkan	- Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5 %	1 Dokumen	20 %	PENDAPATA N/ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	1 Dokumen	150.000.000,00
2	18	02	2.02		Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota										
2	18	02	2.02	02	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota										
					Persentase Pelaku Usaha yang Mendapat Manfaat Insentif Bidang Penanaman Modal	Jumlah Peta Potensi Investasi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	Persentase dokumen peta potensi yang diterbitkan	- Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5 %	1 Dokumen	20 %	PENDAPATA N/ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Peta Potensi Investasi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	1 Dokumen	124.087.500,00
2	18	03			PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL										
2	18	03	2.01		Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota										
2	18	03	2.01	01	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal										
					Persentase Minat Investasi dalam Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah	Jumlah Peraturan Daerah yang Mengatur Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase kenaikan jumlah kegiatan Promosi Penanaman Modal	- Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	90 %	1 Dokumen	5 %	PENDAPATA N/ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Peraturan Daerah yang Mengatur Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	0,00
2	18	03	2.01	02	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota										

Kode			Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Rencana Tahun 2024					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025					
				Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja			
								Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target		
				Presentase Minat Investasi dalam Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	Presentase kenaikan jumlah Kegiatan Promosi Penanaman Modal	- Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kal/Desa	90 %	4 Dokumen	5 %	530.998.000,00	PENDAPATA NASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	4 Dokumen	1.024.416.000,00		
2	18	04		PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL												1.640.250.000,00	
2	18	04	2.01	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota												1.640.250.000,00	
2	18	04	2.01	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Pelayanan Penerbitan perizinan dan non perizinan	- Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kal/Desa	69 %	1500 Pelaku Usaha	11600 Dokumen	236.020.000,00	PENDAPATA NASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	1500 Pelaku Usaha	1.000.000.000,00		
2	18	04	02	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal													
				Persentase Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan yang Diterbitkan	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Mendapat Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Penanaman Modal	Jumlah Pelayanan Penerbitan perizinan dan non perizinan	- Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kal/Desa	69 %	100 Kegiatan Usaha	11600 Dokumen	100.000.000,00	PENDAPATA NASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Mendapat Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Penanaman Modal	100 Kegiatan Usaha	250.000.000,00		
2	18	04	2.01	03	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan												

[illegible]

**PERUBAHAN RENCANA KERJA SATUAN PERANGKAT DAERAH
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA BALIKPAPAN
TAHUN 2024**

No	KODE	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET PERENCANAAN / RENCANA / SUB RENCANA	REALISASI / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PERAKSIAN / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PAGU INDIKATIF (Rp)					SARAN / KEGIATAN / SUB KEGIATAN					KELompok SARAF	PRANALAN MASU BERKASAH TAHUN 2025					PAGU INDIKATIF (Rp)	PAGU INDIKATIF (Rp)			
							SARAF		PAGU INDIKATIF (Rp)		SARAN / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		PAGU INDIKATIF (Rp)		SARAN / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PAGU INDIKATIF (Rp)		SARAN / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	SARAN / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PAGU INDIKATIF (Rp)						
							1	2	3	4	5	6	7	8								9			10	11	12
1	2	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET PERENCANAAN / RENCANA / SUB RENCANA	REALISASI / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PERAKSIAN / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
2	2	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET PERENCANAAN / RENCANA / SUB RENCANA	REALISASI / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PERAKSIAN / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
2	2	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET PERENCANAAN / RENCANA / SUB RENCANA	REALISASI / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PERAKSIAN / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
2	2	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET PERENCANAAN / RENCANA / SUB RENCANA	REALISASI / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PERAKSIAN / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
2	2	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET PERENCANAAN / RENCANA / SUB RENCANA	REALISASI / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PERAKSIAN / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
2	2	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET PERENCANAAN / RENCANA / SUB RENCANA	REALISASI / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PERAKSIAN / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
2	2	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET PERENCANAAN / RENCANA / SUB RENCANA	REALISASI / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PERAKSIAN / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
2	2	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET PERENCANAAN / RENCANA / SUB RENCANA	REALISASI / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PERAKSIAN / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
2	2	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET PERENCANAAN / RENCANA / SUB RENCANA	REALISASI / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PERAKSIAN / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
2	2	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET PERENCANAAN / RENCANA / SUB RENCANA	REALISASI / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PERAKSIAN / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
2	2	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET PERENCANAAN / RENCANA / SUB RENCANA	REALISASI / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PERAKSIAN / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
2	2	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET PERENCANAAN / RENCANA / SUB RENCANA	REALISASI / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PERAKSIAN / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
2	2	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET PERENCANAAN / RENCANA / SUB RENCANA	REALISASI / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PERAKSIAN / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
2	2	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET PERENCANAAN / RENCANA / SUB RENCANA	REALISASI / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PERAKSIAN / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
2	2	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET PERENCANAAN / RENCANA / SUB RENCANA	REALISASI / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PERAKSIAN / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
2	2	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET PERENCANAAN / RENCANA / SUB RENCANA	REALISASI / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PERAKSIAN / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
2	2	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET PERENCANAAN / RENCANA / SUB RENCANA	REALISASI / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PERAKSIAN / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
2	2	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET PERENCANAAN / RENCANA / SUB RENCANA	REALISASI / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PERAKSIAN / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
2	2	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET PERENCANAAN / RENCANA / SUB RENCANA	REALISASI / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PERAKSIAN / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
2	2	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET PERENCANAAN / RENCANA / SUB RENCANA	REALISASI / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PERAKSIAN / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
2	2	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET PERENCANAAN / RENCANA / SUB RENCANA	REALISASI / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PERAKSIAN / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
2	2	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET PERENCANAAN / RENCANA / SUB RENCANA	REALISASI / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PERAKSIAN / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
2	2	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET PERENCANAAN / RENCANA / SUB RENCANA	REALISASI / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PERAKSIAN / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
2	2	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET PERENCANAAN / RENCANA / SUB RENCANA	REALISASI / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PERAKSIAN / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
2	2	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET PERENCANAAN / RENCANA / SUB RENCANA	REALISASI / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PERAKSIAN / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
2	2	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET PERENCANAAN / RENCANA / SUB RENCANA	REALISASI / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PERAKSIAN / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
2	2	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET PERENCANAAN / RENCANA / SUB RENCANA	REALISASI / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PERAKSIAN / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
2	2	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET PERENCANAAN / RENCANA / SUB RENCANA	REALISASI / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PERAKSIAN / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
2	2	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET PERENCANAAN / RENCANA / SUB RENCANA	REALISASI / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PERAKSIAN / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
2	2	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET PERENCANAAN / RENCANA / SUB RENCANA	REALISASI / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PERAKSIAN / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
2	2	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET PERENCANAAN / RENCANA / SUB RENCANA	REALISASI / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PERAKSIAN / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
2	2	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET PERENCANAAN / RENCANA / SUB RENCANA	REALISASI / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PERAKSIAN / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
2	2	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET PERENCANAAN / RENCANA / SUB RENCANA	REALISASI / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PERAKSIAN / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
2	2	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET PERENCANAAN / RENCANA / SUB RENCANA	REALISASI / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PERAKSIAN / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
2	2	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET PERENCANAAN / RENCANA / SUB RENCANA	REALISASI / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PERAKSIAN / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
2	2	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET PERENCANAAN / RENCANA / SUB RENCANA	REALISASI / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PERAKSIAN / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
2	2	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET PERENCANAAN / RENCANA / SUB RENCANA	REALISASI / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PERAKSIAN / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
2	2	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET PERENCANAAN / RENCANA / SUB RENCANA	REALISASI / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PERAKSIAN / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
2	2	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET PERENCANAAN / RENCANA / SUB RENCANA	REALISASI / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PERAKSIAN / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
2	2	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET PERENCANAAN / RENCANA / SUB RENCANA	REALISASI / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PERAKSIAN / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
2	2	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET PERENCANAAN / RENCANA / SUB RENCANA	REALISASI / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PERAKSIAN / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
2	2	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET PERENCANAAN / RENCANA / SUB RENCANA	REALISASI / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PERAKSIAN / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
2	2	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET PERENCANAAN / RENCANA / SUB RENCANA	REALISASI / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PERAKSIAN / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
2	2	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET PERENCANAAN / RENCANA / SUB RENCANA	REALISASI / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PERAKSIAN / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
2	2	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET PERENCANAAN / RENCANA / SUB RENCANA	REALISASI / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PERAKSIAN / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
2	2	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET PERENCANAAN / RENCANA / SUB RENCANA	REALISASI / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PERAKSIAN / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
2	2	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET PERENCANAAN / RENCANA / SUB RENCANA	REALISASI / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PERAKSIAN / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
2	2	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET PERENCANAAN / RENCANA / SUB RENCANA	REALISASI / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PERAKSIAN / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
2	2	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET PERENCANAAN / RENCANA / SUB RENCANA	REALISASI / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PERAKSIAN / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	1																				

NO	KODE	URUSAN/ RUMAH KUNYU/ PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARJIK RENDRA	REKAMIS	PRATIRAN	CAPAIAN KINERJA DAN KENDARAAN PIRANAMAN										KELIMPOK	PRATIRAN BUKU KINERJA	PRATIRAN BUKU KINERJA	PRATIRAN BUKU KINERJA				
							TARJIK RENDRA		REKAMIS		PRATIRAN		REKAMIS		PRATIRAN						REKAMIS		PRATIRAN	
							REKAMIS	PRATIRAN	REKAMIS	PRATIRAN	REKAMIS	PRATIRAN	REKAMIS	PRATIRAN	REKAMIS	PRATIRAN					REKAMIS	PRATIRAN		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21				
1	2	3	4	5	6	7																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG / KEMENTERIAN / LEMBAGA / KEMAHKAMATAN	MISI/ATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARJAT KINERJA RENCANA TAHUNAN	REVISI/AMENDAMEN	PRASARANA	CAPAIAN KINERJA DAN KEMAMPUAN PENDANAAN										KELompok SALINAN	PRASARANA KAJI RENCANA TAHUNAN		PERINGKAT PEMANGKUPAN JAWAB
							TARJAT 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)		Berkas/Keperluan (Rp)		LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARJAT	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SEKUTUP	RPO 2024	APRO 2024	RPO 2024	APRO 2024			MASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
2.18.02.01.0003		Perencanaan Sistem Perencanaan Keadilan Sosial dan Kesejahteraan Masyarakat					4 Dokumen	4 Dokumen	520.875.000,00	520.875.000,00	520.875.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Kalimantan Timur, Seluruh Kalimantan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Meningkatkan Efisiensi dan Efektivitas Anggaran yang Berbasis Keunggulan Lokal	18	108.416.000,00	DINAS PERENCANAAN KEMAMPUAN KEKAWAHLAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
4	2.18.02	PROGRAM PELAYANAN PEMANAMAN MODAL	Perencanaan dan Pelaksanaan Program Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur				1 Dokumen	1 Dokumen	162.071.000,00	162.071.000,00	162.071.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Kalimantan Timur, Seluruh Kalimantan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Meningkatkan Efisiensi dan Efektivitas Anggaran yang Berbasis Keunggulan Lokal			DINAS PERENCANAAN KEMAMPUAN KEKAWAHLAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.18.02.01		Program Pelayanan dan Pemeliharaan Infrastruktur	Perencanaan dan Pelaksanaan Program Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur				1000 Dokumen	1000 Dokumen	913.380.800,00	913.380.800,00	913.380.800,00	0,00	Kota Balikpapan, Kalimantan Timur, Seluruh Kalimantan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Meningkatkan Efisiensi dan Efektivitas Anggaran yang Berbasis Keunggulan Lokal			DINAS PERENCANAAN KEMAMPUAN KEKAWAHLAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.18.02.01.0006		Perencanaan dan Pelaksanaan Program Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur	Perencanaan dan Pelaksanaan Program Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur				1000 Dokumen	1000 Dokumen	913.380.800,00	913.380.800,00	913.380.800,00	0,00	Kota Balikpapan, Kalimantan Timur, Seluruh Kalimantan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Meningkatkan Efisiensi dan Efektivitas Anggaran yang Berbasis Keunggulan Lokal			DINAS PERENCANAAN KEMAMPUAN KEKAWAHLAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.18.02.01.0007		Perencanaan dan Pelaksanaan Program Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur	Perencanaan dan Pelaksanaan Program Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur				1000 Dokumen	1000 Dokumen	913.380.800,00	913.380.800,00	913.380.800,00	0,00	Kota Balikpapan, Kalimantan Timur, Seluruh Kalimantan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Meningkatkan Efisiensi dan Efektivitas Anggaran yang Berbasis Keunggulan Lokal			DINAS PERENCANAAN KEMAMPUAN KEKAWAHLAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.18.02.01.0008		Perencanaan dan Pelaksanaan Program Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur	Perencanaan dan Pelaksanaan Program Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur				1000 Dokumen	1000 Dokumen	913.380.800,00	913.380.800,00	913.380.800,00	0,00	Kota Balikpapan, Kalimantan Timur, Seluruh Kalimantan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Meningkatkan Efisiensi dan Efektivitas Anggaran yang Berbasis Keunggulan Lokal			DINAS PERENCANAAN KEMAMPUAN KEKAWAHLAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.18.02		PROGRAM PELAYANAN PEMANAMAN MODAL	Perencanaan dan Pelaksanaan Program Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur				1000 Dokumen	1000 Dokumen	913.380.800,00	913.380.800,00	913.380.800,00	0,00	Kota Balikpapan, Kalimantan Timur, Seluruh Kalimantan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Meningkatkan Efisiensi dan Efektivitas Anggaran yang Berbasis Keunggulan Lokal			DINAS PERENCANAAN KEMAMPUAN KEKAWAHLAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.18.02.01		Program Pelayanan dan Pemeliharaan Infrastruktur	Perencanaan dan Pelaksanaan Program Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur				1000 Dokumen	1000 Dokumen	913.380.800,00	913.380.800,00	913.380.800,00	0,00	Kota Balikpapan, Kalimantan Timur, Seluruh Kalimantan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Meningkatkan Efisiensi dan Efektivitas Anggaran yang Berbasis Keunggulan Lokal			DINAS PERENCANAAN KEMAMPUAN KEKAWAHLAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.18.02.01.0004		Perencanaan dan Pelaksanaan Program Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur	Perencanaan dan Pelaksanaan Program Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur				1000 Dokumen	1000 Dokumen	913.380.800,00	913.380.800,00	913.380.800,00	0,00	Kota Balikpapan, Kalimantan Timur, Seluruh Kalimantan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Meningkatkan Efisiensi dan Efektivitas Anggaran yang Berbasis Keunggulan Lokal			DINAS PERENCANAAN KEMAMPUAN KEKAWAHLAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.18.02.01.0005		Perencanaan dan Pelaksanaan Program Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur	Perencanaan dan Pelaksanaan Program Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur				1000 Dokumen	1000 Dokumen	913.380.800,00	913.380.800,00	913.380.800,00	0,00	Kota Balikpapan, Kalimantan Timur, Seluruh Kalimantan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Meningkatkan Efisiensi dan Efektivitas Anggaran yang Berbasis Keunggulan Lokal			DINAS PERENCANAAN KEMAMPUAN KEKAWAHLAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.18.02.01.0006		Perencanaan dan Pelaksanaan Program Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur	Perencanaan dan Pelaksanaan Program Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur				1000 Dokumen	1000 Dokumen	913.380.800,00	913.380.800,00	913.380.800,00	0,00	Kota Balikpapan, Kalimantan Timur, Seluruh Kalimantan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Meningkatkan Efisiensi dan Efektivitas Anggaran yang Berbasis Keunggulan Lokal			DINAS PERENCANAAN KEMAMPUAN KEKAWAHLAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.18.02.01.0007		Perencanaan dan Pelaksanaan Program Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur	Perencanaan dan Pelaksanaan Program Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur				1000 Dokumen	1000 Dokumen	913.380.800,00	913.380.800,00	913.380.800,00	0,00	Kota Balikpapan, Kalimantan Timur, Seluruh Kalimantan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Meningkatkan Efisiensi dan Efektivitas Anggaran yang Berbasis Keunggulan Lokal			DINAS PERENCANAAN KEMAMPUAN KEKAWAHLAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.18.02.01.0008		Perencanaan dan Pelaksanaan Program Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur	Perencanaan dan Pelaksanaan Program Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur				1000 Dokumen	1000 Dokumen	913.380.800,00	913.380.800,00	913.380.800,00	0,00	Kota Balikpapan, Kalimantan Timur, Seluruh Kalimantan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Meningkatkan Efisiensi dan Efektivitas Anggaran yang Berbasis Keunggulan Lokal			DINAS PERENCANAAN KEMAMPUAN KEKAWAHLAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.18.02.01.0009		Perencanaan dan Pelaksanaan Program Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur	Perencanaan dan Pelaksanaan Program Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur				1000 Dokumen	1000 Dokumen	913.380.800,00	913.380.800,00	913.380.800,00	0,00	Kota Balikpapan, Kalimantan Timur, Seluruh Kalimantan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Meningkatkan Efisiensi dan Efektivitas Anggaran yang Berbasis Keunggulan Lokal			DINAS PERENCANAAN KEMAMPUAN KEKAWAHLAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.18.02.01.0010		Perencanaan dan Pelaksanaan Program Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur	Perencanaan dan Pelaksanaan Program Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur				1000 Dokumen	1000 Dokumen	913.380.800,00	913.380.800,00	913.380.800,00	0,00	Kota Balikpapan, Kalimantan Timur, Seluruh Kalimantan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Meningkatkan Efisiensi dan Efektivitas Anggaran yang Berbasis Keunggulan Lokal			DINAS PERENCANAAN KEMAMPUAN KEKAWAHLAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.18.02.01.0011		Perencanaan dan Pelaksanaan Program Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur	Perencanaan dan Pelaksanaan Program Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur				1000 Dokumen	1000 Dokumen	913.380.800,00	913.380.800,00	913.380.800,00	0,00	Kota Balikpapan, Kalimantan Timur, Seluruh Kalimantan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Meningkatkan Efisiensi dan Efektivitas Anggaran yang Berbasis Keunggulan Lokal			DINAS PERENCANAAN KEMAMPUAN KEKAWAHLAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.18.02.01.0012		Perencanaan dan Pelaksanaan Program Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur	Perencanaan dan Pelaksanaan Program Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur				1000 Dokumen	1000 Dokumen	913.380.800,00	913.380.800,00	913.380.800,00	0,00	Kota Balikpapan, Kalimantan Timur, Seluruh Kalimantan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Meningkatkan Efisiensi dan Efektivitas Anggaran yang Berbasis Keunggulan Lokal			DINAS PERENCANAAN KEMAMPUAN KEKAWAHLAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.18.02.01.0013		Perencanaan dan Pelaksanaan Program Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur	Perencanaan dan Pelaksanaan Program Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur				1000 Dokumen	1000 Dokumen	913.380.800,00	913.380.800,00	913.380.800,00	0,00	Kota Balikpapan, Kalimantan Timur, Seluruh Kalimantan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Meningkatkan Efisiensi dan Efektivitas Anggaran yang Berbasis Keunggulan Lokal			DINAS PERENCANAAN KEMAMPUAN KEKAWAHLAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.18.02.01.0014		Perencanaan dan Pelaksanaan Program Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur	Perencanaan dan Pelaksanaan Program Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur				1000 Dokumen	1000 Dokumen	913.380.800,00	913.380.800,00	913.380.800,00	0,00	Kota Balikpapan, Kalimantan Timur, Seluruh Kalimantan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Meningkatkan Efisiensi dan Efektivitas Anggaran yang Berbasis Keunggulan Lokal			DINAS PERENCANAAN KEMAMPUAN KEKAWAHLAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.18.02.01.0015		Perencanaan dan Pelaksanaan Program Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur	Perencanaan dan Pelaksanaan Program Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur				1000 Dokumen	1000 Dokumen	913.380.800,00	913.380.800,00	913.380.800,00	0,00	Kota Balikpapan, Kalimantan Timur, Seluruh Kalimantan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Meningkatkan Efisiensi dan Efektivitas Anggaran yang Berbasis Keunggulan Lokal			DINAS PERENCANAAN KEMAMPUAN KEKAWAHLAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.18.02.01.0016		Perencanaan dan Pelaksanaan Program Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur	Perencanaan dan Pelaksanaan Program Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur				1000 Dokumen	1000 Dokumen	913.380.800,00	913.380.800,00	913.380.800,00	0,00	Kota Balikpapan, Kalimantan Timur, Seluruh Kalimantan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Meningkatkan Efisiensi dan Efektivitas Anggaran yang Berbasis Keunggulan Lokal			DINAS PERENCANAAN KEMAMPUAN KEKAWAHLAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.18.02.01.0017		Perencanaan dan Pelaksanaan Program Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur	Perencanaan dan Pelaksanaan Program Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur				1000 Dokumen	1000 Dokumen	913.380.800,00	913.380.800,00	913.380.800,00	0,00	Kota Balikpapan, Kalimantan Timur, Seluruh Kalimantan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Meningkatkan Efisiensi dan Efektivitas Anggaran yang Berbasis Keunggulan Lokal			DINAS PERENCANAAN KEMAMPUAN KEKAWAHLAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.18.02.01.0018		Perencanaan dan Pelaksanaan Program Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur	Perencanaan dan Pelaksanaan Program Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur				1000 Dokumen	1000 Dokumen	913.380.800,00	913.380.800,00	913.380.800,00	0,00	Kota Balikpapan, Kalimantan Timur, Seluruh Kalimantan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Meningkatkan Efisiensi dan Efektivitas Anggaran yang Berbasis Keunggulan Lokal			DINAS PERENCANAAN KEMAMPUAN KEKAWAHLAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.18.02.01.0019		Perencanaan dan Pelaksanaan Program Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur	Perencanaan dan Pelaksanaan Program Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur				1000 Dokumen	1000 Dokumen	913.380.800,00	913.380.800,00	913.380.800,00	0,00	Kota Balikpapan, Kalimantan Timur, Seluruh Kalimantan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Meningkatkan Efisiensi dan Efektivitas Anggaran yang Berbasis Keunggulan Lokal			DINAS PERENCANAAN KEMAMPUAN KEKAWAHLAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.18.02.01.0020		Perencanaan dan Pelaksanaan Program Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur	Perencanaan dan Pelaksanaan Program Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur				1000 Dokumen	1000 Dokumen	913.380.800,00	913.380.800,00	913.380.800,00	0,00	Kota Balikpapan, Kalimantan Timur, Seluruh Kalimantan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Meningkatkan Efisiensi dan Efektivitas Anggaran yang Berbasis Keunggulan Lokal			DINAS PERENCANAAN KEMAMPUAN KEKAWAHLAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.18.02.01.0021		Perencanaan dan Pelaksanaan Program Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur	Perencanaan dan Pelaksanaan Program Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur				1000 Dokumen	1000 Dokumen	913.380.800,00	913.380.800,00	913.380.800,00	0,00	Kota Balikpapan, Kalimantan Timur, Seluruh Kalimantan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Meningkatkan Efisiensi dan Efektivitas Anggaran yang Berbasis Keunggulan Lokal			DINAS PERENCANAAN KEMAMPUAN KEKAWAHLAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.18.02.01.0022		Perencanaan dan Pelaksanaan Program Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur	Perencanaan dan Pelaksanaan Program Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur				1000 Dokumen	1000 Dokumen	913.380.800,00	913.380.800,00	913.380.800,00	0,00	Kota Balikpapan, Kalimantan Timur, Seluruh Kalimantan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Meningkatkan Efisiensi dan Efektivitas Anggaran yang Berbasis Keunggulan Lokal			DINAS PERENCANAAN KEMAMPUAN KEKAWAHLAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.18.02.01.0023		Perencanaan dan Pelaksanaan Program Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur	Perencanaan dan Pelaksanaan Program Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur				1000 Dokumen	1000 Dokumen	913.380.800,00	913.380.800,00	913.380.800,00	0,00	Kota Balikpapan, Kalimantan Timur, Seluruh Kalimantan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Meningkatkan Efisiensi dan Efektivitas Anggaran yang Berbasis Keunggulan Lokal			DINAS PERENCANAAN KEMAMPUAN KEKAWAHLAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.18.02.01.0024		Perencanaan dan Pelaksanaan Program Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur	Perencanaan dan Pelaksanaan Program Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur				1000 Dokumen	1000 Dokumen	913.380.800,00	913.380.800,00	913.380.800,00	0,00	Kota Balikpapan, Kalimantan Timur, Seluruh Kalimantan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Meningkatkan Efisiensi dan Efektivitas Anggaran yang Berbasis Keunggulan Lokal			DINAS PERENCANAAN KEMAMPUAN KEKAWAHLAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.18.02.01.0025		Perencanaan dan Pelaksanaan Program Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur	Perencanaan dan Pelaksanaan Program Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur				1000 Dokumen	1000 Dokumen	913.380.800,00	913.380.800,00	913.380.800,00	0,00	Kota Balikpapan, Kalimantan Timur, Seluruh Kalimantan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Meningkatkan Efisiensi dan Efektivitas Anggaran yang Berbasis Keunggulan Lokal			DINAS PERENCANAAN KEMAMPUAN KEKAWAHLAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.18.02.01.0026		Perencanaan dan Pelaksanaan Program Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur	Perencanaan dan Pelaksanaan Program Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur				1000 Dokumen	1000 Dokumen	913.380.800,00	913.380.800,00	913.380.800,00	0,00	Kota Balikpapan, Kalimantan Timur, Seluruh Kalimantan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Meningkatkan Efisiensi dan Efektivitas Anggaran yang Berbasis Keunggulan Lokal			DINAS PERENCANAAN KEMAMPUAN KEKAWAHLAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.18.02.01.0027		Perencanaan dan Pelaksanaan Program Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur	Perencanaan dan Pelaksanaan Program Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur				1000 Dokumen	1000 Dokumen	913.380.800,00	913.380.800,00	913.380.800,00	0,00	Kota Balikpapan, Kalimantan Timur, Seluruh Kalimantan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Meningkatkan Efisiensi dan Efektivitas Anggaran yang Berbasis Keunggulan Lokal			DINAS PERENCANAAN KEMAMPUAN KEKAWAHLAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.18.02.01.0028		Perencanaan dan Pelaksanaan Program Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur	Perencanaan dan Pelaksanaan Program Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur				1000 Dokumen	1000 Dokumen	913.380.800,00	913.380.800,00	913.380.800,00	0,00	Kota Balikpapan, Kalimantan Timur, Seluruh Kalimantan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Meningkatkan Efisiensi dan Efektivitas Anggaran yang Berbasis Keunggulan Lokal			DINAS PERENCANAAN KEMAMPUAN KEKAWAHLAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.18.02.01.0029		Perencanaan dan Pelaksanaan Program Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur	Perencanaan dan Pelaksanaan Program Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur				1000 Dokumen	1000 Dokumen	913.380.800,00	913.380.800,00	913.380.800,00	0,00	Kota Balikpapan, Kalimantan Timur, Seluruh Kalimantan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Meningkatkan Efisiensi dan Efektivitas Anggaran yang Berbasis Keunggulan Lokal			DINAS PERENCANAAN KEMAMPUAN KEKAWAHLAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.18.02.01.0030		Perencanaan dan Pelaksanaan Program Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur	Perencanaan dan Pelaksanaan Program Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur				1000 Dokumen	1000 Dokumen	913.380.800,00	913.380.800,00	913.380.800,00	0,00	Kota Balikpapan, Kalimantan Timur, Seluruh Kalimantan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Meningkatkan Efisiensi dan Efektivitas Anggaran yang Berbasis Keunggulan Lokal			DINAS PERENCANAAN KEMAMPUAN KEKAWAHLAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.18.02.01.0031		Perencanaan dan Pelaksanaan Program Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur	Perencanaan dan Pelaksanaan Program Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur				1000 Dokumen	1000 Dokumen	913.380.800,00	913.380.800,00	913.380.800,00	0,00	Kota Balikpapan, Kalimantan Timur, Seluruh Kalimantan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Meningkatkan Efisiensi dan Efektivitas Anggaran yang Berbasis Keunggulan Lokal			DINAS PERENCANAAN KEMAMPUAN KEKAWAHLAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.18.02.01.0032		Perencanaan dan Pelaksanaan Program Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur	Perencanaan dan Pelaksanaan Program Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur				1000 Dokumen	1000 Dokumen	913.380.800,00	913.380.800,00	913.380.800,00	0,00	Kota Balikpapan, Kalimantan Timur, Seluruh Kalimantan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Meningkatkan Efisiensi dan Efektivitas Anggaran yang Berbasis Keunggulan Lokal			DINAS PERENCANAAN KEMAMPUAN KEKAWAHLAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.18.02.01.0033		Perencanaan dan Pelaksanaan Program Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur	Perencanaan dan Pelaksanaan Program Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur				1000 Dokumen	1000 Dokumen	913.380.800,00	913.380.800,00	913.380.800,00	0,00	Kota Balikpapan, Kalimantan Timur, Seluruh Kalimantan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Meningkatkan Efisiensi dan Efektivitas Anggaran yang Berbasis Keunggulan Lokal			DINAS PERENCANAAN KEMAMPUAN KEKAWAHLAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.18.02.01.0034		Perencanaan dan Pelaksanaan Program Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur	Perencanaan dan Pelaksanaan Program Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur				1000 Dokumen	1000 Dokumen	913.380.800,00	913.380.800,00	913.380.800,00	0,00	Kota Balikpapan, Kalimantan Timur, Seluruh Kalimantan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Meningkatkan Efisiensi dan Efektivitas Anggaran yang Berbasis Keunggulan Lokal			DINAS PERENCANAAN KEMAMPUAN KEKAWAHLAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.18.02.01.0035		Perencanaan dan Pelaksanaan Program Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur	Perencanaan dan Pelaksanaan Program Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur				1000 Dokumen	1000 Dokumen	913.380.800,00	913.380.800,00	913.380.800,00	0,00	Kota Balikpapan, Kalimantan Timur, Seluruh Kalimantan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Meningkatkan Efisiensi dan Efektivitas Anggaran yang Berbasis Keunggulan Lokal			DINAS PERENCANAAN KEMAMPUAN KEKAWAHLAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.18.02.01.0036		Perencanaan dan Pelaksanaan Program Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur	Perencanaan dan Pelaksanaan Program Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur				1000 Dokumen	1000 Dokumen	913.380.800,00	913.380.800,00	913.380.800,00	0,00	Kota Balikpapan, Kalimantan Timur, Seluruh Kalimantan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Meningkatkan Efisiensi dan Efektivitas Anggaran yang Berbasis Keunggulan Lokal			DINAS PERENCANAAN KEMAMPUAN KEKAWAHLAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.18.02.01.0037		Perencanaan dan Pelaksanaan Program Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur	Perencanaan dan Pelaksanaan Program Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur				1000 Dokumen	1000 Dokumen	913.380.800,00	913.380.800,00	913.380.800,00	0,00	Kota Balikpapan, Kalimantan Timur, Seluruh Kalimantan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Meningkatkan Efisiensi dan Efektivitas Anggaran yang Berbasis Keunggulan Lokal			DINAS PERENCANAAN KEMAMPUAN KEKAWAHLAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.18.02.01.0038		Perencanaan dan Pelaksanaan Program Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur	Perencanaan dan Pelaksanaan Program Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur				1000 Dokumen	1000 Dokumen	913.380.800,00	913.380.800,00	913.380.800,00	0,00	Kota Balikpapan, Kalimantan Timur, Seluruh Kalimantan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Meningkatkan Efisiensi dan Efektivitas Anggaran yang Berbasis Keunggulan Lokal			DINAS PERENCANAAN KEMAMPUAN KEKAWAHLAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.18.02.01.0039		Perencanaan dan Pelaksanaan Program Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur	Perencanaan dan Pelaksanaan Program Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur				1000 Dokumen	1000 Dokumen	913.380.800,00	913.380.800,00	913.380.800,00	0,00	Kota Balikpapan, Kalimantan Timur, Seluruh Kalimantan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Meningkatkan Efisiensi dan Efektivitas Anggaran yang Berbasis Keunggulan Lokal			DINAS PERENCANAAN KEMAMPUAN KEKAWAHLAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.18.02.01.0040		Perencanaan dan Pelaksanaan Program Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur	Perencanaan dan Pelaksanaan Program Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur				1000 Dokumen	1000 Dokumen	913.380.800,00	913.380.800,00	913.380.800,00	0,00	Kota Balikpapan, Kalimantan Timur, Seluruh Kalimantan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Meningkatkan Efisiensi dan Efektivitas Anggaran yang Berbasis Keunggulan Lokal			DINAS PERENCANAAN KEMAMPUAN KEKAWAHLAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.18.02.01.0041		Perencanaan dan Pelaksanaan Program Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur	Perencanaan dan Pelaksanaan Program Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur				1000 Dokumen	1000 Dokumen	913.380.800,00	913.380.800,00	913.380.800,00	0,00	Kota Balikpapan, Kalimantan Timur, Seluruh Kalimantan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Meningkatkan Efisiensi dan Efektivitas Anggaran yang Berbasis Keunggulan Lokal			DINAS PERENCANAAN KEMAMPUAN KEKAWAHLAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.18																				

[illegible]

RENCANA AKSI KINERJA SASARAN TAHUN 2024

[illegible]



Update

PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
(DPMPTSP)
Jl. Ruhu Rahayu I RT 08 No 09, Sepunggan Baru, Tlp. (0542) 85121311 Fax. (0542) 8702699
Website : inventasi.balikipapan.go.id, E-Mail : dpmptbpp@gmail.com
BALIKPAPAN

Kode Pos : 76115

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA BALIKPAPAN
NOMOR : 188.4-035 / 2022

TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA BALIKPAPAN TAHUN 2021-2026

KEPALA PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
KOTA BALIKPAPAN

- Menimbang : a. bahwa demi terarahnya pencapaian visi dan misi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Balikpapan Tahun 2021-2026 yang termuat dalam Renstra DPMPTSP Kota Balikpapan tahun 2021-2026, maka diperlukan tolak ukur yang jelas dan sistematis untuk mengukur kinerja pembangunan bidang penanaman modal pada setiap tahun perencanaannya dengan menetapkan Indikator Kinerja Utama Rencana Strategis DPMPTSP Kota Balikpapan tahun 2021-2026;
- b. bahwa untuk maksud tersebut diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Balikpapan .
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 1959, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-undang Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
10. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Balikpapan Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Balikpapan Nomor 60);
11. Peraturan Wali Kota Balikpapan Nomor 01 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
Kesatu : Indikator Kinerja Utama (IKU) Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Balikpapan Tahun 2021-2026, dengan sasaran dan indikator sasaran sebagaimana terlampir dalam keputusan ini;
- Kedua : Indikator Kinerja Utama Rencana Strategis (Renstra) DPMPTSP Kota Balikpapan Tahun 2021-2026 adalah bagian dari dokumen perencanaan strategis DPMPTSP Kota Balikpapan yang berisi sasaran strategis dan indikator kinerja utama untuk kurun waktu 2021-2026 yang merupakan penjabaran dari target kinerja Rencana Strategis (RENSTRA) DPMPTSP Kota Balikpapan Tahun 2021-2026;
- Ketiga : DPMPTSP Kota Balikpapan dalam merencanakan program, kegiatan dan indikator kinerjanya wajib mengacu pada Indikator Kinerja Utama Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Balikpapan Tahun 2021-2026 yang diatur dalam Peraturan Walikota Nomor 188.45-14/2017 tanggal 27 Januari 2017;
- Keempat : Segala biaya yang timbul dalam keputusan ini, dibebankan kepada anggaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Balikpapan;
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Balikpapan
Pada tanggal : 11 Februari 2022

**Plt KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU KOTA BALIKPAPAN**



BOEDI LILIONO

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu
Kota Balikpapan
Nomor : 188.4-035/2022
Tanggal : 11 Februari 2022

**Indikator Kinerja Utama (IKU) Rencana Strategis
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kota Balikpapan Tahun 2021-2026**

NO.	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	SUMBER DATA
1	Meningkatnya Capaian Nilai Realisasi Investasi	Persentase Pencapaian nilai realisasi investasi	DPMPTSP
2	Meningkatnya Kualitas Layanan Perizinan	Persentase Peningkatan Indeks Kepuasan Masyarakat	DPMPTSP
3	Meningkatnya Kualitas Penerapan Reformasi Birokrasi pada DPMPTSP Kota Balikpapan	Nilai Reformasi Birokrasi DPMPTSP Kota Balikpapan	DPMPTSP

Plt KEPALA DPMPTSP KOTA BALIKPAPAN


BOEDI LILIONO

Lampiran Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Balikpapan
Nomor : 188.45-035 / 2022
Tanggal : 11 Februari 2022
Tentang: **Indikator Kinerja Utama Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Balikpapan
Tahun 2021-2026**

INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA BALIKPAPAN TAHUN 2021-2026

- | | |
|---------------------|---|
| 1. Perangkat Daerah | : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu |
| 2. Tugas | : Urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan sub urusan pemerintahan bidang pelayanan satu pintu yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah, meliputi sub urusan pengembangan, promosi, pelayanan, pengendalian, data dan sistem informasi penanaman modal serta pelayanan perizinan dan non perizinan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah dan tugas pembantuan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. |
| 3. Fungsi | : <ul style="list-style-type: none">a. Penyusunan Program dan kegiatan Pengembangan penanaman modal dan pelayanan perizinan terpadu;b. Perumusan kebijakan teknis dibidang penanaman modal dan peningkatan pelayanan perizinan terpadu;c. Perumusan kebijakan sistem pelayanan perizinan terpadu;d. Perumusan kebijakan dan pengelolaan system pengaduan masyarakat;e. Penyelenggaraan pembinaan, fasilitasi, pengawasan dan pengendalian penanaman modal;f. Pengembangan sistem informasi penanaman modal dan pelayanan perizinan terpadu;g. Penyelenggaraan pengembangan dan promosi potensi daerah;h. Pengolahan data dan informasi serta evaluasi kegiatan penanaman modal;i. Pelaksanaan sistem pelayanan perizinan terpadu sesuai kewenangan yang didelegasikan;j. Penyelenggaraan koordinasi dan fasilitasi pemrosesan berkas perizinan yang didelegasikan secara terpadu;k. Penandatanganan perizinan sesuai kewenangan yang diberikan;l. Pengelolaan data secara manual dan elektronik dibidang perizinan sesuai kewenangan;m. Penyelenggaraan koordinasi dengan perangkat daerah teknis terkait dalam proses pengawasan dan pengendalian perizinan/ non perizinan yang diterbitkan; |

- n. Pengoordinasian dan penyampaian dokumen salinan perizinan kepada perangkat daerah terkait dalam rangka pelaksanaan pengawasan dan pengendalian teknis;
- o. Penyediaan informasi pelayanan perizinan kepada masyarakat;
- p. Pelaksanaan monitoring, evaluasi , pengendalian dan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi; dan
- q. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan/ atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya

c. Indikator Kinerja Utama :

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI PENGHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Meningkatnya Capaian Nilai Realisasi Investasi	Persentase Pencapaian nilai realisasi investasi	Nilai realisasi investasi di daerah dihitung setiap 3 bulan sekali atau per-triwulan. Nilai relisasi investasi ini dihitung dari jumlah nilai investasi yang telah dilaporkan secara periodik oleh setiap perusahaan yang melakukan usaha di suatu wilayah melalui sistem Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) online.	(Pencapaian nilai realisasi investasi tahun berjalan / Target nilai realisasi investasi tahun berjalan) x 100%	Data dari Press Release Realisasi Investasi DPMPTSP Provinsi Kalimantan Timur	Substansi Penanaman Modal

2	Meningkatnya Kualitas Layanan Perizinan	Persentase peningkatan Indeks Kepuasan Masyarakat	Persentase angka kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Balikpapan untuk seluruh layanan perizinan dan non perizinan yang menjadi kewenangan DPMPTSP dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi no 25 tahun 2004 tentang Pedoman Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik. Adapun unsur kepuasan masyarakat yang dimaksud adalah Persyaratan, Prosedur, Waktu Pelayanan, Biaya/Tarif, Kompetensi dan Pelayanan, Perilaku Pelaksana, Maklumat Pelayanan, Kejelasan Pelayanan, Tanggung Jawab Petugas dan Kecepatan Pelayanan	(nilai SKM tahun n - nilai SKM tahun n-1) / nilai SKM tahun n-1 X100%	Hasil Survei pada aplikasi terpadu satu pintu	Subtansi Pelayanan Terpadu Satu Pintu
3	Meningkatnya Kualitas Penerapan Reformasi Birokrasi pada DPMPTSP Kota Balikpapan	Nilai Reformasi Birokrasi DPMPTSP Kota Balikpapan	Nilai perhitungan mandiri Lembar Kerja Evaluasi offline Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Balikpapan	Berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri PANRB No. 26 Tahun 2020 Tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan RB	Eviden Lembar Kerja Evaluasi RB	Sekretariat

Pt KEPALA DPMPTSP KOTA BALIKPAPAN



BOEDI LILIONO



PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
(DPMPTSP)
Jl. Ruhui Rahayu I RT.08 No.09, Sepunggan Baru, Tlp. (0542) 85121311 Fax. (0542) 8702699
Website: inventasi.balikpapan.go.id, E-Mail: dpmptbpp@gmail.com
BALIKPAPAN

Kode Pos : 76115

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA BALIKPAPAN
NOMOR : 188.4 -106 / 2023

TENTANG

PERUBAHAN

INDIKATOR KINERJA UTAMA RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA BALIKPAPAN TAHUN 2021-2026

KEPALA PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
KOTA BALIKPAPAN

- Menimbang : a. bahwa demi terarahnya pencapaian visi dan misi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Balikpapan Tahun 2021-2026 yang termuat dalam Renstra DPMPTSP Kota Balikpapan tahun 2021-2026, maka diperlukan tolak ukur yang jelas dan sistematis untuk mengukur kinerja pembangunan bidang penanaman modal pada setiap tahun perencanaannya dengan menetapkan Indikator Kinerja Utama Rencana Strategis DPMPTSP Kota Balikpapan tahun 2021-2026;
- b. bahwa untuk maksud tersebut diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Balikpapan .
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 1959, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-undang Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
10. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Balikpapan Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Balikpapan Nomor 60);
11. Peraturan Wali Kota Balikpapan Nomor 01 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah;
12. Surat Edaran Sekretaris Daerah Kota Balikpapan Nomor : 060.4/01799/Org tanggal 22 Desember 2023, Perihal Penyusunan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2023.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
Kesatu : Merubah Indikator Kinerja Utama (IKU) Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Balikpapan Tahun 2021-2026, dengan sasaran dan indikator sasaran sebagaimana terlampir dalam keputusan ini;
- Kedua : Indikator Kinerja Utama Rencana Stategis (Renstra) DPMPTSP Kota Balikpapan Tahun 2021-2026 adalah bagian dari dokumen perencanaan strategis DPMPTSP Kota Balikpapan yang berisi sasaran strategis dan indikator kinerja utama untuk kurun waktu 2021-2026 yang merupakan penjabaran dari target kinerja Rencana Strategis (RENSTRA) DPMPTSP Kota Balikpapan Tahun 2021-2026;
- Ketiga : DPMPTSP Kota Balikpapan dalam merencanakan program, kegiatan dan indikator kinerjanya wajib mengacu pada Indikator Kinerja Utama Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Balikpapan Tahun 2021-2026 yang diatur dalam Peraturan Walikota Nomor 188.45-14/2017 tanggal 27 Januari 2017;
- Keempat : Segala biaya yang timbul dalam keputusan ini, dibebankan kepada anggaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Balikpapan;
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Balikpapan
Pada tanggal : 29 Desember 2023

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU KOTA BALIKPAPAN**



HASBULLAH HELMI

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu
Kota Balikpapan
Nomor : 188.4-106 / 2023
Tanggal : 29 Desember 2023

**Perubahan Indikator Kinerja Utama (IKU)
Rencana Strategis
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kota Balikpapan Tahun 2021-2026**

NO.	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	SUMBER DATA
1	Meningkatnya Capaian Nilai Realisasi Investasi	Persentase Pencapaian nilai realisasi investasi	DPMPTSP
2	Meningkatnya Kualitas Layanan Perizinan	Persentase Peningkatan Indeks Kepuasan Masyarakat	DPMPTSP
3	Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja DPMPTSP Kota Balikpapan	Nilai SAKIP DPMPTSP Kota Balikpapan	DPMPTSP

KEPALA DPMPTSP KOTA BALIKPAPAN


HASBULLAH HELMI

Lampiran Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Balikpapan
Nomor : 188.4-106 / 2023
Tanggal : 29 Desember 2023
Tentang : Perubahan Indikator Kinerja Utama Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu Kota Balikpapan Tahun 2021-2026

INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA BALIKPAPAN TAHUN 2021-2026

1. Perangkat Daerah : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2. Tugas : Urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan sub urusan pemerintahan bidang pelayanan satu pintu yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah, meliputi sub urusan pengembangan, promosi, pelayanan, pengendalian, data dan sistem informasi penanaman modal serta pelayanan perizinan dan non perizinan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah dan tugas pembantuan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Fungsi :
 - a. Penyusunan Program dan kegiatan Pengembangan penanaman modal dan pelayanan perizinan terpadu;
 - b. Perumusan kebijakan teknis dibidang penanaman modal dan peningkatan pelayanan perizinan terpadu;
 - c. Perumusan kebijakan sistem pelayanan perizinan terpadu;
 - d. Perumusan kebijakan dan pengelolaan sistem pengaduan masyarakat;
 - e. Penyelenggaraan pembinaan, fasilitasi, pengawasan dan pengendalian penanaman modal;
 - f. Pengembangan sistem informasi penanaman modal dan pelayanan perizinan terpadu;
 - g. Penyelenggaraan pengembangan dan promosi potensi daerah;
 - h. Pengolahan data dan informasi serta evaluasi kegiatan penanaman modal;
 - i. Pelaksanaan sistem pelayanan perizinan terpadu sesuai kewenangan yang didelegasikan;
 - j. Penyelenggaraan koordinasi dan fasilitasi pemrosesan berkas perizinan yang didelegasikan secara terpadu;
 - k. Penandatanganan perizinan sesuai kewenangan yang diberikan;
 - l. Pengelolaan data secara manual dan elektronik dibidang perizinan sesuai kewenangan;
 - m. Penyelenggaraan koordinasi dengan perangkat daerah teknis terkait dalam proses pengawasan dan pengendalian perizinan/ non perizinan yang diterbitkan;
 - n. Pengoordinasian dan penyampaian dokumen salinan perizinan kepada perangkat daerah terkait dalam rangka pelaksanaan pengawasan dan pengendalian teknis;
 - o. Penyediaan informasi pelayanan perizinan kepada masyarakat;

- p. Pelaksanaan monitoring, evaluasi , pengendalian dan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi;
dan
q. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan/atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya

c. Indikator Kinerja Utama :

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI PENGHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Meningkatnya Capaian Nilai Realisasi Investasi	Persentase Pencapaian nilai realisasi investasi	Nilai realisasi investasi di daerah dihitung setiap 3 bulan sekali atau per-triwulan. Nilai relisasi investasi ini dihitung dari jumlah nilai investasi yang telah dilaporkan secara periodik oleh setiap perusahaan yang melakukan usaha di suatu wilayah melalui sistem Lapaporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) online.	(Pencapaian nilai realisasi investasi tahun berjalan / Target nilai realisasi investasi tahun berjalan) x 100%	Data dari Press Release Realisasi Investasi DPMPTSP Provinsi Kalimantan Timur	Koordinator Penanaman Modal
2	Meningkatnya Kualitas Layanan Perizinan	Persentase Indeks Kepuasan Masyarakat	Persentase angka kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Balikpapan untuk seluruh layanan perizinan dan non perizinan yang menjadi kewenangan DPMPTSP dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi no 25 tahun 2004 tentang Pedoman Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik. Adapun unsur kepuasan masyarakat yang dimaksud adalah Persyaratan, Prosedur, Waktu Pelayanan, Biaya/Tarif, Kompetensi dan Pelayanan, Perilaku Pelaksana, Maklumat Pelayanan, Kejelasan Pelayanan, Tanggung Jawab Petugas dan Kecepatan Pelayanan	(nilai SKM tahun n - nilai SKM tahun n-1) / nilai SKM tahun n-1 X100%	Hasil Survei pada aplikasi terpadu satu pintu	Koordinator PTSP I dan PTSP II

3	Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja DPMPTSP Kota Balikpapan	Nilai SAKIP DPMPTSP	Nilai hasil akhir dari penjumlahan komponen-komponen gambaran tingkat AKIP, yang merupakan rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah	Berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri PANRB No. 88 Tahun 2021 Tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Eviden LHE Evaluasi SAKIP	Sekretariat
---	---	---------------------	--	--	---------------------------	-------------

KEPALA DPMPTSP KOTA BALIKPAPAN



HASBULLAH HELMI



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : HASBULLAH HELMI, A.P, M.Si

Jabatan : KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : AHMAD MUZAKKIR, ST., M.Si.

Jabatan : Pjs. WALI KOTA BALIKPAPAN

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

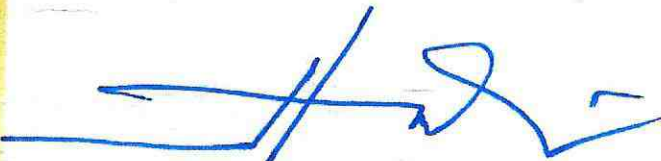
Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Balikpapan, 14 Oktober 2024

PIHAK KEDUA,

PIHAK PERTAMA,


AHMAD MUZAKKIR, ST., M.Si.


HASBULLAH HELMI, A.P, M.Si

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Meningkatnya Capaian Nilai Realisasi Investasi	Persentase Pencapaian Nilai Realisasi Investasi	%	100
2	Meningkatnya Kualitas Layanan Perizinan	Persentase Peningkatan Indeks Kepuasan Masyarakat	%	0,11
3	Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai SAKIP DPMPTSP Kota Balikpapan	poin	75,5

Program	Anggaran	Keterangan
1. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Rp 185.250.000	APBD Kota Balikpapan
2. Program Promosi Penanaman Modal	Rp 693.674.000	APBD Kota Balikpapan
3. Program Pelayanan Penanaman Modal	Rp 918.390.800	APBD Kota Balikpapan
Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Rp 462.913.533	APBD Kota Balikpapan
Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Rp 618.668.000	APBD Kota Balikpapan
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 620.534.000	DAK Non Fisik
6. Jumlah Anggaran	Rp. 17.420.283.497	-

Pjs. WALI KOTA BALIKPAPAN,

AHMAD MUZAKKIR, ST., M.Si.

Balikpapan, 14 Oktober 2024
KEPALA DINAS PENANAMAN
MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU,

HASBULLAH HELMI, A.P., M.Si



PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
(DPMPTSP)

Jl. Ruhui Rahayu I RT.08 No.09, Sepinggian Baru, Tlp. (0542) 85121311 Fax. (0542) 8702699
Website : inventasi.balikpapan.go.id , E-Mail : dpmpt.bpp@gmail.com
BALIKPAPAN

Kode Pos : 76115

PERJANJIAN KINERJA ESELON III TAHUN 2024 - PERUBAHAN
SEKRETARIS
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA BALIKPAPAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Muhammad Noor, S.T.,**
Jabatan : **Sekretaris DPMPTSP Kota Balikpapan**

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : **Hasbullah Helmi, A.P., M.Si.,**
Jabatan : **Kepala DPMPTSP Kota Balikpapan**

Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi

Pihak Kedua

Balikpapan, 30 September 2024

Pihak Pertama

HASBULLAH HELMI, A.P., M.Si.,

MUHAMMAD NOOR, S.T.,

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024 - PERUBAHAN
SEKRETARIS DPMPTSP KOTA BALIKPAPAN

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya Kualitas Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	IKM Internal Perangkat Daerah	80 IKM

Kegiatan	Anggaran	Ket.
1 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp 8.750.157.000	APBD-P
2 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp 1.403.242.588	APBD-P
3 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp 2.616.896.400	APBD-P
4 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp 1.150.557.176	APBD-P
Jumlah	Rp 15.029.830.129	

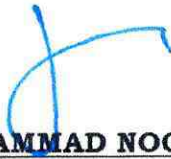
Kepala DPMPTSP Kota Balikpapan



HASBULLAH HELMI, A.P, M.Si.,

Balikpapan, 30 September 2024

Sekretaris DPMPTSP Kota Balikpapan



MUHAMMAD NOOR, S.T.,



PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
(DPMPTSP)

Jl. Ruhui Rahayu I RT.08 No.09, Sepinggan Baru, Tlp. (0542) 85121311 Fax. (0542) 8702699
Website : inventasi.balikpapan.go.id , E-Mail : dpmpt.bpp@gmail.com
BALIKPAPAN

Kode Pos : 76115

PERJANJIAN KINERJA ESELON IV TAHUN 2024 - PERUBAHAN
KEPALA SUB BAGIAN UMUM
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA BALIKPAPAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif,transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Yayuk Puji Lestari, S.STP.**

Jabatan : **Kasubag Umum**

Selanjutnya disebut **pihak pertama**

Nama : **Muhammad Noor, S.T.,**

Jabatan : **Sekretaris DPMPTSP kota Balikpapan**

Selaku atasan pihak pertama , selanjutnya disebut **pihak kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi

Balikpapan, 30 September 2024

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

MUHAMMAD NOOR, S.T.,

YAYUK PUJI LESTARI, S.STP

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024 - PERUBAHAN
KEPALA SUB BAGIAN UMUM
DPMPTSP KOTA BALIKPAPAN

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
Meningkatnya Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	79 IKM
	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	60 Orang/ Bulan
Meningkatnya Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	78.5 IKM
	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket
	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket
	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket
	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket
	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	65 Laporan
Meningkatnya Pemenuhan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	IKM Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	80 IKM
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	3 Laporan
Meningkatnya Pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	IKM Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	79 IKM
	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	24 Unit
	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	146 Unit
	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit

	Sub Kegiatan		Anggaran	Ket.
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp	8.750.157.000	APBD-P
2	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rp	43.973.100	APBD
3	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp	49.681.000	APBD-P
4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rp	588.844.400	APBD-P
5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Rp	74.999.000	APBD
6	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Rp	33.500.000	APBD-P
7	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp	612.245.088	APBD-P
8	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Rp	10.000.000	APBD
9	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp	575.454.900	APBD-P
10	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp	2.031.441.500	APBD-P
11	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Rp	676.501.564	APBD
12	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp	274.163.612	APBD-P
13	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Rp	199.892.000	APBD-P
	Jumlah		Rp 13.920.853.164	

Balikpapan, 30 September 2024

Sekretaris DPMPTSP Kota Balikpapan

Kasubag Umum

MUHAMMAD NOOR, S.T.,

YAYUK PUJI LESTARI, S.STP

MONEV CAPAIAN KINERJA TAHUN 2024
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA BALIKPAPAN

TRIWULAN : I - IV

No	Indikator Kinerja	Formulasi Perjanjian Kinerja Tahun 2024	Satuan	CAPAIAN KINERJA PER TRIWULAN												TOTAL	Capaian Kinerja 2024		Rasio Capaian Kinerja	Ket							
				TW 1			TW 2			TW 3			TW 4														
				T	R	7	T	R	8	T	R	9	T	R	10		T	R			11	T	R	12	T	R	13
1	2	3	4																					15	16	17	18
SASARAN I : Meningkatkan Capaian Nilai Realisasi Investasi																											
1	Persentase Pencapaian nilai realisasi investasi	Jumlah nilai realisasi investasi yang tercapai	%																								
		Jumlah nilai realisasi investasi yang ditargetkan																									
SASARAN II : Meningkatkan Kualitas Layanan Perizinan																											
3	Persentase Peningkatan Indeks Kepuasan Masyarakat	nilai SKM tahun n - nilai SKM tahun (n-1) / nilai SKM tahun n-1 x 100%	%																								
SASARAN III : Meningkatkan Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah																											
2	Nilai SAKIP DPMP/SP Kota Balikpapan	Nilai SAKIP	Nilai																								
SASARAN IV : Meningkatkan Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah																											
2	Nilai SAKIP DPMP/SP Kota Balikpapan	Nilai SAKIP	Nilai																								
SASARAN V : Meningkatkan Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah																											
2	Nilai SAKIP DPMP/SP Kota Balikpapan	Nilai SAKIP	Nilai																								
SASARAN VI : Meningkatkan Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah																											
2	Nilai SAKIP DPMP/SP Kota Balikpapan	Nilai SAKIP	Nilai																								
SASARAN VII : Meningkatkan Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah																											
2	Nilai SAKIP DPMP/SP Kota Balikpapan	Nilai SAKIP	Nilai																								
SASARAN VIII : Meningkatkan Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah																											
2	Nilai SAKIP DPMP/SP Kota Balikpapan	Nilai SAKIP	Nilai																								
SASARAN IX : Meningkatkan Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah																											
2	Nilai SAKIP DPMP/SP Kota Balikpapan	Nilai SAKIP	Nilai																								
SASARAN X : Meningkatkan Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah																											
2	Nilai SAKIP DPMP/SP Kota Balikpapan	Nilai SAKIP	Nilai																								
SASARAN XI : Meningkatkan Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah																											
2	Nilai SAKIP DPMP/SP Kota Balikpapan	Nilai SAKIP	Nilai																								
SASARAN XII : Meningkatkan Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah																											
2	Nilai SAKIP DPMP/SP Kota Balikpapan	Nilai SAKIP	Nilai																								
SASARAN XIII : Meningkatkan Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah																											
2	Nilai SAKIP DPMP/SP Kota Balikpapan	Nilai SAKIP	Nilai																								
SASARAN XIV : Meningkatkan Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah																											
2	Nilai SAKIP DPMP/SP Kota Balikpapan	Nilai SAKIP	Nilai																								
SASARAN XV : Meningkatkan Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah																											
2	Nilai SAKIP DPMP/SP Kota Balikpapan	Nilai SAKIP	Nilai																								
SASARAN XVI : Meningkatkan Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah																											
2	Nilai SAKIP DPMP/SP Kota Balikpapan	Nilai SAKIP	Nilai																								
SASARAN XVII : Meningkatkan Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah																											
2	Nilai SAKIP DPMP/SP Kota Balikpapan	Nilai SAKIP	Nilai																								
SASARAN XVIII : Meningkatkan Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah																											
2	Nilai SAKIP DPMP/SP Kota Balikpapan	Nilai SAKIP	Nilai																								
SASARAN XIX : Meningkatkan Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah																											
2	Nilai SAKIP DPMP/SP Kota Balikpapan	Nilai SAKIP	Nilai																								
SASARAN XX : Meningkatkan Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah																											
2	Nilai SAKIP DPMP/SP Kota Balikpapan	Nilai SAKIP	Nilai																								
SASARAN XXI : Meningkatkan Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah																											
2	Nilai SAKIP DPMP/SP Kota Balikpapan	Nilai SAKIP	Nilai																								
SASARAN XXII : Meningkatkan Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah																											
2	Nilai SAKIP DPMP/SP Kota Balikpapan	Nilai SAKIP	Nilai																								
SASARAN XXIII : Meningkatkan Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah																											
2	Nilai SAKIP DPMP/SP Kota Balikpapan	Nilai SAKIP	Nilai																								
SASARAN XXIV : Meningkatkan Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah																											
2	Nilai SAKIP DPMP/SP Kota Balikpapan	Nilai SAKIP	Nilai																								
SASARAN XXV : Meningkatkan Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah																											
2	Nilai SAKIP DPMP/SP Kota Balikpapan	Nilai SAKIP	Nilai																								
SASARAN XXVI : Meningkatkan Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah																											
2	Nilai SAKIP DPMP/SP Kota Balikpapan	Nilai SAKIP	Nilai																								
SASARAN XXVII : Meningkatkan Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah																											
2	Nilai SAKIP DPMP/SP Kota Balikpapan	Nilai SAKIP	Nilai																								
SASARAN XXVIII : Meningkatkan Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah																											
2	Nilai SAKIP DPMP/SP Kota Balikpapan	Nilai SAKIP	Nilai																								
SASARAN XXIX : Meningkatkan Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah																											
2	Nilai SAKIP DPMP/SP Kota Balikpapan	Nilai SAKIP	Nilai																								
SASARAN XXX : Meningkatkan Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah																											
2	Nilai SAKIP DPMP/SP Kota Balikpapan	Nilai SAKIP	Nilai																								
SASARAN XXXI : Meningkatkan Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah																											
2	Nilai SAKIP DPMP/SP Kota Balikpapan	Nilai SAKIP	Nilai																								
SASARAN XXXII : Meningkatkan Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah																											
2	Nilai SAKIP DPMP/SP Kota Balikpapan	Nilai SAKIP	Nilai																								
SASARAN XXXIII : Meningkatkan Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah																											
2	Nilai SAKIP DPMP/SP Kota Balikpapan	Nilai SAKIP	Nilai																								
SASARAN XXXIV : Meningkatkan Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah																											
2	Nilai SAKIP DPMP/SP Kota Balikpapan	Nilai SAKIP	Nilai																								
SASARAN XXXV : Meningkatkan Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah																											
2	Nilai SAKIP DPMP/SP Kota Balikpapan	Nilai SAKIP	Nilai																								
SASARAN XXXVI : Meningkatkan Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah																											
2	Nilai SAKIP DPMP/SP Kota Balikpapan	Nilai SAKIP	Nilai																								
SASARAN XXXVII : Meningkatkan Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah																											
2	Nilai SAKIP DPMP/SP Kota Balikpapan	Nilai SAKIP	Nilai																								
SASARAN XXXVIII : Meningkatkan Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah																											
2	Nilai SAKIP DPMP/SP Kota Balikpapan	Nilai SAKIP	Nilai																								
SASARAN XXXIX : Meningkatkan Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah																											
2	Nilai SAKIP DPMP/SP Kota Balikpapan	Nilai SAKIP	Nilai																								
SASARAN XL : Meningkatkan Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah																											
2	Nilai SAKIP DPMP/SP Kota Balikpapan	Nilai SAKIP	Nilai																								
SASARAN XLI : Meningkatkan Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah																											
2	Nilai SAKIP DPMP/SP Kota Balikpapan	Nilai SAKIP	Nilai																								
SASARAN XLII : Meningkatkan Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah																											
2	Nilai SAKIP DPMP/SP Kota Balikpapan	Nilai SAKIP	Nilai																								
SASARAN XLIII : Meningkatkan Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah																											
2	Nilai SAKIP DPMP/SP Kota Balikpapan	Nilai SAKIP	Nilai																								
SASARAN XLIV : Meningkatkan Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah																											
2	Nilai SAKIP DPMP/SP Kota Balikpapan	Nilai SAKIP	Nilai																								
SASARAN XLV : Meningkatkan Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah																											
2	Nilai SAKIP DPMP/SP Kota Balikpapan	Nilai SAKIP	Nilai																								
SASARAN XLVI : Meningkatkan Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah																											
2	Nilai SAKIP DPMP/SP Kota Balikpapan	Nilai SAKIP	Nilai																								
SASARAN XLVII : Meningkatkan Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah																											
2	Nilai SAKIP DPMP/SP Kota Balikpapan	Nilai SAKIP	Nilai																								
SASARAN XLVIII : Meningkatkan Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah																											
2	Nilai SAKIP DPMP/SP Kota Balikpapan	Nilai SAKIP	Nilai																								
SASARAN XLIX : Meningkatkan Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah																											
2	Nilai SAKIP DPMP/SP Kota Balikpapan	Nilai SAKIP	Nilai																								
SASARAN L : Meningkatkan Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah																											
2	Nilai SAKIP DPMP/SP Kota Balikpapan	Nilai SAKIP	Nilai																								
SASARAN LI : Meningkatkan Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah																											
2	Nilai SAKIP DPMP/SP Kota Balikpapan	Nilai SAKIP	Nilai																								
SASARAN LII : Meningkatkan Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah																											
2	Nilai SAKIP DPMP/SP Kota Balikpapan	Nilai SAKIP	Nilai																								
SASARAN LIII : Meningkatkan Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah																											
2	Nilai SAKIP DPMP/SP Kota Balikpapan	Nilai SAKIP	Nilai																								
SASARAN LIV : Meningkatkan Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah																											
2	Nilai SAKIP DPMP/SP Kota Balikpapan	Nilai SAKIP	Nilai																								
SASARAN LV : Meningkatkan Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah																											
2	Nilai SAKIP DPMP/SP Kota Balikpapan	Nilai SAKIP	Nilai																								
SASARAN LVI : Meningkatkan Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah																											
2	Nilai SAKIP DPMP/SP Kota Balikpapan	Nilai SAKIP	Nilai																								
SASARAN LVII : Meningkatkan Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah																											
2	Nilai SAKIP DPMP/SP Kota Balikpapan	Nilai SAKIP	Nilai																								
SASARAN LVIII : Meningkatkan Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah																											
2	Nilai SAKIP DPMP/SP Kota Balikpapan	Nilai SAKIP	Nilai																								
SASARAN LIX : Meningkatkan Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah																											
2	Nilai SAKIP DPMP/SP Kota Balikpapan	Nilai SAKIP	Nilai																								
SASARAN LX : Meningkatkan Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah																											
2	Nilai SAKIP DPMP/SP Kota Balikpapan	Nilai SAKIP	Nilai																								
SASARAN LXI : Meningkatkan Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah																											
2	Nilai SAKIP DPMP/SP Kota Balikpapan	Nilai SAKIP	Nilai																								
SASARAN LXII : Meningkatkan Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah																											
2	Nilai SAKIP DPMP/SP Kota Balikpapan	Nilai SAKIP	Nilai																								
SASARAN LXIII : Meningkatkan Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah																											
2	Nilai SAKIP DPMP/SP Kota Balikpapan	Nilai SAKIP	Nilai																								
SASARAN LXIV : Meningkatkan Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah																											
2	Nilai SAKIP DPMP/SP Kota Balikpapan	Nilai SAKIP	Nilai																								
SASARAN LXV : Meningkatkan Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah																											
2	Nilai SAKIP DPMP/SP Kota Balikpapan	Nilai SAKIP	Nilai																								
SASARAN LXVI : Meningkatkan Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah																											
2	Nilai SAKIP DPMP/SP Kota Balikpapan	Nilai SAKIP	Nilai																								
SASARAN LXVII : Meningkatkan Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah																											
2	Nilai SAKIP DPMP/SP Kota Balikpapan	Nilai SAKIP	Nilai																								
SASARAN LXVIII : Meningkatkan Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah																											
2	Nilai SAKIP DPMP/SP Kota Balikpapan	Nilai SAKIP	Nilai																								
SASARAN LXIX : Meningkatkan Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah																											
2	Nilai SAKIP DPMP/SP Kota Balikpapan	Nilai SAKIP	Nilai																								
SASARAN LXX : Meningkatkan Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah																											
2	Nilai SAKIP DPMP/SP Kota Balikpapan	Nilai SAKIP	Nilai																								
SASARAN LXXI : Meningkatkan Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah																											
2	Nilai SAKIP DPMP/SP Kota Balikpapan	Nilai SAKIP	Nilai																								
SASARAN LXXII : Meningkatkan Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah																											
2	Nilai SAKIP DPMP/SP Kota Balikpapan	Nilai SAKIP	Nilai																								
SASARAN LXXIII : Meningkatkan Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah																											
2	Nilai SAKIP DPMP/SP Kota Balikpapan	Nilai SAKIP	Nilai																								
SASARAN LXXIV : Meningkatkan Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah																											
2	Nilai SAKIP DPMP/SP Kota Balikpapan	Nilai SAKIP	Nilai																								
SASARAN LXXV : Meningkatkan Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah																											
2	Nilai SAKIP DPMP/SP Kota Balikpapan	Nilai SAKIP	Nilai																								
SASARAN LXXVI : Meningkatkan Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah																											
2	Nilai SAKIP DPMP/SP Kota Balikpapan	Nilai SAKIP	Nilai																								
SASARAN LXXVII : Meningkatkan Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah																											
2	Nilai SAKIP DPMP/SP Kota Balikpapan	Nilai SAKIP	Nilai																								
SASARAN LXXVIII : Meningkatkan Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah																											
2	Nilai SAKIP DPMP/SP Kota Balikpapan	Nilai SAKIP	Nilai																								
SASARAN LXXIX : Meningkatkan Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah																											
2	Nilai SAKIP DPMP/SP Kota Balikpapan	Nilai SAKIP	Nilai																								
SASARAN LXXX : Meningkatkan Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah																											
2	Nilai SAKIP DPMP/SP Kota Balikpapan	Nilai SAKIP	Nilai																								
SASARAN LXXXI : Meningkatkan Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah																											
2	Nilai SAKIP DPMP/SP Kota Balikpapan	Nilai SAKIP	Nilai																								
SASARAN LXXXII : Meningkatkan Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah																											
2	Nilai SAKIP DPMP/SP Kota Balikpapan	Nilai SAKIP	Nilai																								
SASARAN LXXXIII : Meningkatkan Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah																											
2	Nilai SAKIP DPMP/SP Kota Balikpapan	Nilai SAKIP	Nilai																								
SASARAN LXXXIV : Meningkatkan Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah																											
2	Nilai SAKIP DPMP/SP Kota Balikpapan	Nilai SAKIP	Nilai																								
SASARAN LXXXV : Meningkatkan Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah																											
2	Nilai SAKIP DPMP/SP Kota Balikpapan	Nilai SAKIP	Nilai																								
SASARAN LXXXVI : Meningkatkan Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah																											
2	Nilai SAKIP DPMP/SP Kota Balikpapan	Nilai SAKIP	Nilai																								
SASARAN LXXXVII : Meningkatkan Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah																											
2	Nilai SAKIP DPMP/SP Kota Balikpapan	Nilai SAKIP	Nilai																								
SASARAN LXXXVIII : Meningkatkan Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah																											
2	Nilai SAKIP DPMP/SP Kota Balikpapan	Nilai SAKIP	Nilai																								
SASARAN LXXXIX : Meningkatkan Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah																											
2	Nilai SAKIP DPMP/SP Kota Balikpapan	Nilai SAKIP	Nilai																								
SASARAN LXXXX : Meningkatkan Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah																											
2	Nilai SAKIP DPMP/SP Kota Balikpapan	Nilai SAKIP	Nilai																								
SASARAN LXXXXI : Meningkatkan Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah																											
2	Nilai SAKIP DPMP/SP Kota Balikpapan	Nilai SAKIP	Nilai																								
SASARAN LXXXXII : Meningkatkan Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah																											
2	Nilai SAKIP DPMP/SP Kota Balikpapan	Nilai SAKIP	Nilai																								
SASARAN LXXXXIII : Meningkatkan Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah																											
2	Nilai SAKIP DPMP/SP Kota Balikpapan	Nilai SAKIP	Nilai																								
SASARAN LXXXXIV : Meningkatkan Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah																											
2	Nilai SAKIP DPMP/SP Kota Balikpapan	Nilai SAKIP	Nilai																								
SASARAN LXXXXV : Meningkatkan Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah																											
2	Nilai SAKIP DPMP/SP Kota Balikpapan	Nilai SAKIP	Nilai																								
SASARAN LXXXXVI : Meningkatkan Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah																											
2	Nilai SAKIP DPMP/SP Kota Balikpapan	Nilai SAKIP	Nilai																								
SASARAN LXXXXVII : Meningkatkan Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah																											
2	Nilai SAKIP DPMP/SP Kota Balikpapan	Nilai SAKIP	Nilai																								
SASARAN LXXXXVIII : Meningkatkan Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah																											
2	Nilai SAKIP DPMP/SP Kota Balikpapan	Nilai SAKIP	Nilai																								
SASARAN LXXXXIX : Meningkatkan Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah																											
2	Nilai SAKIP DPMP/SP Kota Balikpapan	Nilai SAKIP	Nilai																								
SASARAN LXXXXX : Meningkatkan Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah																											
2	Nilai SAKIP DPMP/SP Kota Balikpapan	Nilai SAKIP	Nilai																								
SASARAN LXXXXXI : Meningkatkan Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah																											
2	Nilai SAKIP DPMP/SP Kota Balikpapan	Nilai SAKIP	Nilai																								
SASARAN LXXXXXII : Meningkatkan Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah																											
2	Nilai SAKIP DPMP/SP Kota Balikpapan	Nilai SAKIP	Nilai																								
SASARAN LXXXXXIII : Meningkatkan Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah																											
2	Nilai SAKIP DPMP/SP Kota Balikpapan	Nilai SAKIP	Nilai																								
SASARAN LXXXXXIV : Meningkatkan Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah																											
2	Nilai SAKIP DPMP/SP Kota Balikpapan	Nilai SAKIP	Nilai																								
SASARAN LXXXXXV : Meningkatkan Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah																											
2	Nilai SAKIP DPMP/SP Kota Balikpapan	Nilai SAKIP	Nilai																								
SASARAN LXXXXXVI : Meningkatkan Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah																											
2	Nilai SAKIP DPMP/SP Kota Balikpapan	Nilai SAKIP	Nilai																								
SASARAN LXXXXXVII : Meningkatkan Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah																											
2	Nilai SAKIP DPMP/SP Kota Balikpapan	Nilai SAKIP	Nilai																								
SASARAN LXXXXXVIII : Meningkatkan Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah																											
2	Nilai SAKIP DPMP/SP Kota Balikpapan	Nilai SAKIP	Nilai																								
SASARAN LXXXXXIX : Meningkatkan Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah																											
2	Nilai SAKIP DPMP/SP Kota Balikpapan	Nilai SAKIP	Nilai																								
SASARAN LXXXXXX : Meningkatkan Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah																											
2	Nilai SAKIP DPMP/SP Kota Balikpapan	Nilai SAKIP	Nilai																								
SASARAN LXXXXXXI : Meningkatkan Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah																											
2	Nilai SAKIP DPMP/SP Kota Balikpapan	Nilai SAKIP	Nilai																								
SASARAN LXXXXXXII : Meningkatkan Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah																											
2	Nilai SAKIP DPMP/SP Kota Balikpapan	Nilai SAKIP	Nilai																								
SASARAN LXXXXXXIII : Meningkatkan Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah																											
2	Nilai SAKIP DPMP/SP Kota Balikpapan	Nilai SAKIP	Nilai																								
SASARAN LXXXXXXIV : Meningkatkan Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah																											
2	Nilai SAKIP DPMP/SP Kota Balikpapan	Nilai SAKIP	Nilai																								
SASARAN LXXXXXXV : Meningkatkan Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah																											
2	Nilai SAKIP DPMP/SP Kota Balikpapan	Nilai SAKIP	Nilai																								
SASARAN LXXXXXXVI : Meningkatkan Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah																											
2	Nilai SAKIP DPMP/SP Kota Balikpapan	Nilai SAKIP	Nilai																								
SASARAN LXXXXXXVII : Meningkatkan Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah																											
2	Nilai SAKIP DPMP/SP Kota Balikpapan	Nilai SAKIP	Nilai																								
SASARAN LXXXXXXVIII : Meningkatkan Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah																											
2	Nilai SAKIP DPMP/SP Kota Balikpapan	Nilai SAKIP	Nilai																								
SASARAN LXXXXXXIX : Meningkatkan Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah																											
2	Nilai SAKIP DPMP/SP Kota Balikpapan	Nilai SAKIP	Nilai																								
SASARAN LXXXXXXX : Meningkatkan Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah																											

Program	Sumber Anggaran
1. Program Promosi Penanaman Modal	APBD KOTA BALIKPAPAN
2. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	APBD KOTA BALIKPAPAN
3. Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	APBD KOTA BALIKPAPAN
4. Program Pelayanan Penanaman Modal	APBD KOTA BALIKPAPAN
5. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	APBD KOTA BALIKPAPAN DAK NON FISIK
6. Program Penunjang Urutan Pemerintahan Daerah	APBD KOTA BALIKPAPAN



CAPAIAN PRESTASI DPMPTSP TAHUN 2024



1. Peringkat 1 Realisasi Investasi 2023 Tingkat Provinsi Kalimantan Timur (diterima 2024)



2. Peringkat 1 OPD terinovatif 2024 dari BAPEDA LITBANG Kota Balikpapan



3. DPMPTSP Kota Balikpapan dengan judul inovasi Simpananku kopi sebagai Terbaik pertama kategori perangkat daerah kab/kota pada PEPES IKAN PEDAS 2024



4. Peringkat ke III Penilaian Arsip 2023 (diterima 2024)



5. Penilaian Kinerja PTSP dan Kinerja Percepatan Pelaksanaan Berusaha Pemda Tahun 2024 oleh BKPM RI



6. Stand Terbaik Bidang Investasi pada Pameran Produk Unggulan Perdagangan, Pariwisata dan Investasi 2024 di Yogyakarta

7. MPP Pelayanan prima kategori penyelenggaraan MPP prima 2024 oleh KEMENPANRB

8. Penetapan MPP Kota Balikpapan (qualified) dalam menjalankan MPP Digital

9. ARINDAMA Pembangunan Investasi Daerah 2024 (diterima 2025)



INSPEKTORAT KOTA BALIKPAPAN

LAPORAN HASIL EVALUASI SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU KOTA BALIKPAPAN

NOMOR : 700/140/TIM-III/ITKOT
TANGGAL : 29 MEI 2024
TIM AUDIT : TIM III
**OBRIK : DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN TERPADU
SATU PINTU KOTA BALIKPAPAN**



INSPEKTORAT KOTA BALIKPAPAN

**LAPORAN HASIL EVALUASI
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN
TERPADU SATU PINTU KOTA BALIKPAPAN**

**NOMOR : 700/140/TIM-III/ITKOT
TANGGAL : 29 MEI 2024
TIM AUDIT : TIM III
OBRIK : DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN TERPADU
SATU PINTU KOTA BALIKPAPAN**



INSPEKTORAT KOTA BALIKPAPAN

Balikpapan
Hyaman

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmoni Loyal Adaptif Kolaboratif

EVALUASI AKIP

DPMPT Kota Balikpapan

Perencanaan Kinerja

23,99 dari nilai
maksimal 30



Pengukuran Kinerja

22,66 dari nilai
maksimal 30



Pelaporan Kinerja

10,43 dari nilai
maksimal 15



Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

18,25 dari nilai
maksimal 25



Predikat

Nilai Total 75,32 Predikat BB (Sangat Baik)

Memiliki sistem manajemen kinerja yang andal

Saran/Rekomendasi :

- Dalam menentukan Target yang ditetapkan dalam perencanaan kinerja hendaknya dapat dicapai (achievable), menantang dan realistis;
- Agar Setiap Dokumen Perencanaan Kinerja menggambarkan hubungan yang berkesinambungan, penyalarsan (cascading) dan kinerja bidang lain crosscutting
- Agar Rencana aksi kinerja dapat berjalan dinamis maka perlu pemantauan secara berkala;
- Setiap Pegawai perlu untuk terus meningkatkan pemahaman dan peduli serta berkomitmen dalam mencapai kinerja yang telah direncanakan;
- Agar Pengukuran Kinerja yang dijadikan dasar pemberian reward dan punishment dapat diimplementasikan
- Agar Informasi dalam laporan kinerja selalu menjadi perhatian utama pimpinan dan menjadi kepedulian seluruh pegawai;
- Agar Informasi dalam laporan kinerja digunakan dalam penyesuaian perencanaan kinerja yang akan dihadapi berikutnya serta dapat mempengaruhi perubahan budaya kerja organisasi





PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN INSPEKTORAT

Jl. RUHUI RAHAYU I Telp./Fax. (0542) 7218734 KOTAK POS 1111
BALIKPAPAN 76115
Email : inskot.balikpapan@yahoo.co.id

IKHTISAR EKSEKUTIF

Dalam rangka mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil serta untuk menilai tingkat akuntabilitas kinerja perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan, maka kami telah melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kota Balikpapan Tahun 2023.

Evaluasi dilaksanakan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Wali Kota Balikpapan Nomor 2 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah..

Hasil evaluasi akuntabilitas kinerja Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kota Balikpapan Tahun 2023 menunjukkan nilai sebesar **75,32 dengan Predikat BB (Sangat Baik)**. Hal ini menunjukkan implementasi SAKIP sangat baik, ditandai dengan mulai terwujudnya efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja dan memiliki sistem manajemen kinerja yang andal.

Rincian hasil evaluasi tersebut adalah sebagai berikut :

	KOMPONEN YANG DINILAI	BOBOT	NILAI
1	Perencanaan Kinerja	30	23,99
2	Pengukuran Kinerja	30	22,66
3	Pelaporan Kinerja	15	10,43
4	Evaluasi Akuntabilitas	25	18,25

Berdasarkan Peraturan Menteri PANRB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Hasil evaluasi tahun 2023 dapat diperbandingkan dengan hasil evaluasi tahun sebelumnya Pemerintah terhadap bobot komponen, sub komponen dan kriteria penilaiannya.



PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN INSPEKTORAT

Jl. RUHUI RAHAYU I Telp./Fax. (0542) 7218734 KOTAK POS 1111
BALIKPAPAN 76115
Email : inskot.balikpapan@yahoo.co.id

BAB I PENDAHULUAN

Penguatan akuntabilitas kinerja merupakan salah satu strategi yang dilaksanakan dalam rangka mempercepat pelaksanaan Reformasi Birokrasi untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel, pemerintah yang kapabel dan meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat. Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014, bahwa Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan rangkaian sistematis dari berbagai aktifitas, alat, dan prosedur yang dirancang dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

Untuk mengetahui sejauh mana implementasi SAKIP dilaksanakan serta untuk mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil maka dilakukan evaluasi AKIP oleh Inspektorat Kota Balikpapan.

Telah dilakukan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) pada Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kota Balikpapan tahun 2023 guna mengetahui sejauh mana AKIP dilaksanakan dalam mendorong peningkatan kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil (*result oriented government*).

1. Dasar Hukum Evaluasi

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006, tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
- b. Peraturan Pemerintah RI Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
- c. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

- d. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 19 Tahun 2023 tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2024;
- e. Keputusan Wali Kota Balikpapan Nomor 188.45-492/2023, tanggal 28 Desember 2023, tentang Program Kerja Pengawasan Tahunan Berbasis Risiko Inspektorat Kota Balikpapan Tahun 2024;
- f. Surat Tugas Inspektur Kota Balikpapan Nomor: 090.1/042/Audit/M/ITKOT, tanggal 5 April 2024.

2. Latar Belakang Evaluasi

Konsistensi terhadap Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) akan terus dilakukan sebagai upaya untuk meningkatkan kinerja instansi pemerintah melalui monitoring terhadap sistem yang ada pada perangkat daerah dengan melakukan evaluasi terhadap Renstra, Perjanjian Kinerja, IKU, IKI, Rencana Kerja Tahunan, Rencana Aksi, LKjIP, Pemantauan Kinerja pada Perangkat Daerah.

3. Tujuan Evaluasi

- a. Memperoleh informasi mengenai implementasi SAKIP;
- b. Menilai tingkat implementasi SAKIP;
- c. Menilai tingkat akuntabilitas kinerja;
- d. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan AKIP; dan
- e. Memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.

4. Ruang Lingkup Evaluasi

Ruang lingkup evaluasi meliputi penilaian kualitas perencanaan kinerja, penilaian pengukuran kinerja berjenjang dan berkelanjutan, penilaian pelaporan kinerja, penilaian evaluasi akuntabilitas kinerja internal.

5. Metodologi Evaluasi

Metodologi yang digunakan adalah kombinasi metodologi kualitatif dan kuantitatif dengan mempertimbangkan kepraktisan dan kemanfaatan yang disesuaikan dengan tujuan evaluasi serta mempertimbangkan kendala yang

ada. Langkah praktis diambil agar lebih cepat memberikan petunjuk untuk perbaikan implementasi SAKIP sehingga dapat menghasilkan rekomendasi untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja.

6. Tindak lanjut hasil evaluasi tahun sebelumnya

Berdasarkan informasi yang disampaikan, bahwa Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kota Balikpapan telah menindaklanjuti rekomendasi hasil evaluasi AKIP tahun sebelumnya dan melakukan berbagai upaya perbaikan sebagai berikut:

No	Rekomendasi Inspektorat	Langkah Perbaikan	Keterangan
1	- Guna memahami serta berkomitmen dalam mencapai kinerja maka dalam perencanaan agar menyusun pohon kinerja yang sesuai dengan prinsip-prinsip penyusunan pohon kinerja, sehingga dapat dimanfaatkan dalam perencanaan kinerja, serta untuk memetakan adanya crosscutting antar bidang atau bahkan antar Perangkat Daerah; - Target Kinerja perlu peninjauan kembali terkait tujuan dan sasaran Nilai Realisasi Investasi Daerah yang berhubungan dengan Proyek Strategis Nasional (PSN) dan Nilai Target Kualitas Layanan Perizinan perlu ditinjau kembali mengingat DPMPTSP telah menggunakan aplikasi dalam pengukurannya; - Dalam Pengukuran capaian kinerja agar memanfaatkan Teknologi Informasi (Aplikasi).	Telah ditindaklanjuti	Dokumen Pohon Kinerja Aplikasi Reaksi
2	Perencanaan Kinerja: - Dokumen Renstra telah memuat sasaran, namun perlu perbaikan dalam menetapkan indikator kinerja sasaran (outcome dan output) agar memenuhi kriteria indikator kinerja yang baik; - Dalam menentukan Target Kinerja perlu peninjauan kembali dan di sesuaikan dengan capaian target; - Perlu dilakukan reviu Renstra agar terjadi upaya perbaikan yang signifikan; - Pegawai perlu memahami dan peduli dalam mencapai kinerja yang telah direncanakan	Telah ditindaklanjuti	Dokumen
3	Pengukuran Kinerja: - Pengukuran kinerja agar dilakukan secara	Telah ditindaklanjuti	Dituangkan LKJIP, Laporan

No	Rekomendasi Inspektorat	Langkah Perbaikan	Keterangan
	berjenjang mulai dari eselon II sampai ke individu staf operasional serta didukung eviden tindak lanjut terhadap rekomendasi yang diberikan; - Pengukuran capaian kinerja secara berjenjang agar menggunakan bantuan teknologi informasi, sehingga capaian atau progres kinerja dapat diidentifikasi secara lebih tepat dan cepat; - Pegawai perlu memahami dan peduli atas hasil pengukuran kinerja.		perbandingan , Monev IKU Triwulan
4	Pelaporan Kinerja: - Laporan kinerja telah menyajikan informasi pencapaian sasaran dan disarankan agar informasi pencapaian sasaran tersebut dapat seluruhnya berorientasi outcome.	Telah ditindaklanjuti	Dituangkan Laporan Monitoring dan Evaluasi
5	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal: - Hasil evaluasi telah disampaikan atau dibahas dengan pihak yang dievaluasi (yang berkepentingan), namun perlu dilengkapi dengan kesepakatan mengenai tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi yang secara formal menjelaskan siapa dan kapan batas waktu rekomendasi akan ditindaklanjuti.	Telah ditindaklanjuti	LKJIP I

Sumber: Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2022 pada Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kota Balikpapan Nomor: 700/100/Tim-III/Itkot, tanggal 5 Juli 2023.

BAB II
HASIL EVALUASI

Hasil Evaluasi atas AKIP Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kota Balikpapan Tahun 2022 menunjukkan nilai sebesar **75,32 dengan Predikat BB (Sangat Baik)**. Hal ini menunjukkan implementasi SAKIP sangat baik, ditandai dengan mulai terwujudnya efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja dan memiliki sistem manajemen kinerja yang andal.

Rincian hasil evaluasi tersebut adalah sebagai berikut:

No	Komponen yang dinilai	Tahun 2022		Tahun 2023	
		Bobot	Hasil Evaluasi	Bobot	Hasil Evaluasi
1	Perencanaan Kinerja	30	23.71	30	23,99
2	Pengukuran Kinerja	30	18.99	30	22,66
3	Pelaporan Kinerja	15	10.09	15	10,43
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	21.13	25	18.25
	Nilai Akuntabilitas Kinerja		73,91		75,32
	Tingkat Akuntabilitas Kinerja		BB		BB

Penjelasan lebih lanjut atas hasil evaluasi AKIP adalah sebagai berikut:

a. Evaluasi atas Perencanaan Kinerja:

Dari penilaian atas komponen perencanaan kinerja diperoleh nilai 23,99 dari nilai maksimal sebesar 30,00 dengan hasil evaluasi per sub komponen sebagai berikut:

No	Sub Komponen	Nilai Diperoleh	Nilai Maksimal	Hasil Evaluasi
1	Dokumen perencanaan kinerja	6,00	6,00	- Telah terdapat dokumen perencanaan kinerja jangka menengah, dokumen perencanaan kinerja jangka pendek, dokumen perencanaan aktivitas yang mendukung kinerja sesuai dengan mandat ; - Telah terdapat dokumen

No	Sub Komponen	Nilai Diperoleh	Nilai Maksimal	Hasil Evaluasi
				perencanaan anggaran yang mendukung kinerja;
2	Dokumen perencanaan kinerja telah memenuhi standar yang baik, yaitu untuk mencapai hasil, dengan ukuran kinerja yang SMART, menggunakan penyelarasan (<i>cascading</i>) disetiap level secara logis, serta memperhatikan kinerja bidang lain (<i>crosscutting</i>)	7,96	9,00	- Dokumen perencanaan kinerja telah diformalkan dan dipublikasikan tepat waktu; - Isu strategis telah tertuang dalam dokumen perencanaan kinerja - Sebagian Indikator kinerja telah memenuhi kriteria SMART; - Kualitas Rumusan Hasil Renstra dan Perjanjian Kinerja (Tujuan / Sasaran) telah jelas. - Untuk Target Kinerja belum sepenuhnya realistis, perlu adanya perbaikan dan penyesuaian.
3	Perencanaan kinerja telah dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan	10,03	15,00	- Sebagian besar anggaran yang ditetapkan dan aktivitas yang dilaksanakan telah mendukung pada kinerja yang ingin dicapai; - Sebagian besar target yang ditetapkan dalam Perencanaan Kinerja telah dicapai dengan baik; - Perencanaan Kinerja telah dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan; - Sebagian Pegawai telah memahami dan peduli dalam mencapai kinerja yang telah direncanakan.

b. Pengukuran Kinerja:

Dari penilaian atas komponen pengukuran kinerja diperoleh nilai 22,66 dari nilai maksimal sebesar 30,00 dengan hasil evaluasi per sub komponen sebagai berikut:

No	Sub Komponen	Nilai Diperoleh	Nilai Maksimal	Hasil Evaluasi
1	Pengukuran kinerja telah dilakukan	4,50	6	- Pengukuran Kinerja telah dilakukan tertuang Definisi Operasional beserta formulasi perhitungan dalam

No	Sub Komponen	Nilai Diperoleh	Nilai Maksimal	Hasil Evaluasi
				IKU
				- Terdapat SOP tentang pengumpulan Data Kinerja
2	Pengukuran kinerja telah menjadi kebutuhan dalam mewujudkan kinerja secara efektif, efisien dan telah dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan	7,51	9	- Pengukuran kinerja telah dilakukan secara berjenjang mulai dari eselon III sampai dengan eselon IV dan sebagian besar setiap level melakukan pemantauan atas pengukuran capaian Kinerja unit bawahannya; - Pengukuran kinerja telah dilakukan secara berkala setiap triwulan dengan memberikan laporan monev IKI; - Dalam Pengukuran Kinerja telah memanfaatkan Teknologi Informasi (Aplikasi).
3	Pengukuran kinerja telah dijadikan dasar dalam pemberian <i>reward and punishment</i> , serta penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien	10,65	15,00	- Pimpinan terlibat sebagai pengambil keputusan dalam mengukur capaian kinerja. - Hasil pengukuran (capaian) kinerja mulai dari setingkat eselon IV ke atas telah dibuat per semester. Hasil pengukuran capaian kinerja terkait <i>reward and punishment</i> belum terdapat perbedaan (dapat diidentifikasi) tingkat <i>reward and punishment</i>-nya, antara lain: pejabat/pegawai yang berkinerja dengan yang tidak berkinerja, yang mencapai target dan tidak mencapai target, yang selesai tepat waktu dan yang tidak tepat waktu, capaian diatas standar dengan yang standar. (sudah buat, tapi belum dapat diidentifikasi tingkat <i>reward and punishment</i>nya)

No	Sub Komponen	Nilai Diperoleh	Nilai Maksimal	Hasil Evaluasi
				- Setiap pegawai belum memahami dan peduli atas hasil pengukuran kinerja

c. Pelaporan Kinerja:

Dari penilaian atas komponen pelaporan kinerja diperoleh nilai 10,43 dari nilai maksimal sebesar 15,00 dengan hasil evaluasi per sub komponen sebagai berikut:

No	Sub Komponen	Nilai Diperoleh	Nilai Maksimal	Hasil Evaluasi
1	Terdapat dokumen laporan yang menggambarkan kinerja	3,00	3,00	- Laporan kinerja telah disusun dan disampaikan tepat waktu dan telah dipublikasikan.
2	Dokumen laporan kinerja telah memenuhi standar menggambarkan kualitas atas pencapaian kinerja, informasi keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/penyempumaannya	3,05	4,50	- Laporan kinerja belum seluruhnya menyajikan informasi pencapaian sasaran yang berorientasi <i>outcome</i> - Informasi Kegagalan dan hambatan kinerja belum sepenuhnya dituangkan dalam dokumen laporan kinerja
3	Pelaporan kinerja telah memberikan dampak yang besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya	4,38	7,50	- Informasi kinerja yang disajikan telah digunakan dalam perbaikan perencanaan, namun hanya bersifat sebagian. - Informasi dalam laporan kinerja telah digunakan untuk perbaikan capaian kinerja, namun belum bersifat ekstensif dan menyeluruh karena masih ada capaian kinerja tahun berjalan yang lebih rendah dari capaian kinerja tahun sebelumnya;

d. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal:

Dari penilaian atas komponen evaluasi akuntabilitas kinerja internal diperoleh nilai 18.25 dari nilai maksimal sebesar 25,00 dengan hasil evaluasi per sub komponen sebagai berikut:

No	Sub Komponen	Nilai Diperoleh	Nilai Maksimal	Hasil Evaluasi
1	Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi	4,69	7,00	- Pemantauan rencana aksi telah dilakukan secara periodik (triwulan); - Hasil evaluasi telah disampaikan atau dibahas dengan pihak yang dievaluasi (yang berkepentingan), perlu dilengkapi dengan kesepakatan mengenai tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi yang secara formal.
2	Capaian outcome	13,56	18,00	- Evaluasi program dalam rangka menilai keberhasilan program telah dilaksanakan. - Pemantauan rencana aksi dalam rangka mengendalikan kinerja telah dilaksanakan. - Sebagian besar indikator kinerja mengalami kenaikan capaian kinerja.

BAB III

SARAN REKOMENDASI

Dalam rangka lebih mengefektifkan penerapan AKIP, kami merekomendasikan beberapa hal sebagai berikut:

a. Perencanaan Kinerja:

- Dalam menentukan Target yang ditetapkan dalam perencanaan kinerja hendaknya dapat dicapai (achievable), menantang dan realistis;
- Agar Setiap Dokumen Perencanaan Kinerja menggambarkan hubungan yang berkesinambungan, penyelarasan (cascading) dan kinerja bidang lain crosscutting;

b. Pengukuran Kinerja:

- Agar Rencana aksi kinerja dapat berjalan dinamis maka perlu pemantauan secara berkala;
- Setiap Pegawai perlu untuk terus meningkatkan pemahaman dan peduli serta berkomitmen dalam mencapai kinerja yang telah direncanakan;
- Agar Pengukuran Kinerja yang dijadikan dasar pemberian reward dan punishment dapat diimplementasikan

c. Pelaporan Kinerja:

- Agar Informasi dalam laporan kinerja selalu menjadi perhatian utama pimpinan dan menjadi kepedulian seluruh pegawai;
- Agar Informasi dalam laporan kinerja digunakan dalam penyesuaian perencanaan kinerja yang akan dihadapi berikutnya serta dapat mempengaruhi perubahan budaya kerja organisasi.

d. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal:

- Hasil evaluasi telah disampaikan atau dibahas dengan pihak yang dievaluasi (yang berkepentingan), perlu dilengkapi dengan kesepakatan mengenai tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi yang secara formal.

Demikian hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagai penerapan manajemen kinerja Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kota Balikpapan, kami mengharapkan Kepala Perangkat Daerah beserta seluruh jajaran meningkatkan implementasi AKIP dan menindaklanjuti rekomendasi yang telah disampaikan.

Inspektur Kota Balikpapan,



Sylvia Rahmadina

No	Komponen/Sub Komponen/Kriteria	Bobot	Unit/Satke Jaw aba n	Nilai	Penjelasan	%	Pilihan Jawaban	Jawaba n	Nilai
1	PERENCANAAN KINERJA	30.00		23.99					
1.a	Dokumen Perencanaan	6.00	AA	6.00		100.00%			1.00
Kriteria:									
1	Terdapat dokumen perencanaan kinerja jangka menengah.				a. apabila seluruh komponen dokumen perencanaan jangka menengah sesuai mandat; b. apabila sebagian komponen dokumen perencanaan jangka menengah sesuai mandat; c. apabila komponen dokumen perencanaan jangka menengah tidak sesuai mandat; d. belum terdapat dokumen perencanaan jangka menengah.		A/B/C/D	A	1.00
2	Terdapat dokumen perencanaan kinerja jangka pendek.				a. apabila seluruh komponen dokumen perencanaan jangka pendek sesuai mandat; b. apabila sebagian komponen dokumen perencanaan jangka pendek sesuai mandat; c. apabila komponen dokumen perencanaan jangka pendek tidak sesuai mandat; d. belum terdapat dokumen perencanaan jangka pendek.		A/B/C/D	A	1.00
3	Terdapat dokumen perencanaan aktivitas yang mendukung kinerja.				a. apabila seluruh dokumen perencanaan aktivitas sesuai mandat; b. apabila sebagian dokumen perencanaan aktivitas sesuai mandat; c. apabila dokumen perencanaan aktivitas tidak sesuai mandat/belum terdapat dokumen perencanaan aktivitas.		A/B/C	A	1.00
4	Terdapat dokumen perencanaan anggaran yang mendukung kinerja.				Ya, apabila terdapat dokumen perencanaan anggaran		Ya/Tidak	Ya	1.00
1.b	Dokumen Perencanaan kinerja telah memenuhi standar yang baik, yaitu untuk mencapai hasil, dengan ukuran kinerja yang SMART, menggunakan penyelarasan (cascading) disetiap level secara logis, serta memperhatikan kinerja bidang lain (crosscutting)	9.00	BB	7.96		88.40%			0.88
Kriteria:									
1	Dokumen Perencanaan Kinerja telah diformalkan.								1.00
	Renstra				Ya, jika dokumen renstra diformalkan		Ya/Tidak	Ya	0.33
	Renja OPD				Ya, jika Renja diformalkan		Ya/Tidak	Ya	0.33
	Perjanjian Kinerja				Ya, jika Perjanjian Kinerja diformalkan		Ya/Tidak	Ya	0.33
2	Dokumen Perencanaan Kinerja telah dipublikasikan								1.00
	Renstra				Ya, jika renstra dipublikasikan tepat waktu		Ya/Tidak	Ya	0.33
	Renja OPD						Ya/Tidak	Ya	0.33
	Perjanjian Kinerja				Ya, jika perjanjian kinerja dipublikasikan tepat waktu		Ya/Tidak	Ya	0.33

3	Dokumen Perencanaan Kinerja telah menggambarkan Kebutuhan atas Kinerja sebenarnya yang perlu dicapai.	a. apabila seluruh (100%) isu strategis tertuang dalam Renstra; b. apabila sebagian besar (>75%-99%) isu strategis tertuang dalam Renstra c. apabila sebagian kecil (>30%-75%) isu strategis tertuang dalam Renstra d. apabila tidak ada (<30%) isu strategis tertuang dalam Renstra		A/B/C/D	A	1.00
4	Kualitas Rumusan Hasil (Tujuan/Sasaran) telah jelas menggambarkan kondisi kinerja yang akan dicapai.					1.00
	Renstra	a. apabila seluruh (100%) tujuan/sasaran tertuang dalam Renstra; b. apabila sebagian besar (>75%-99%) tujuan/sasaran tertuang dalam Renstra; c. apabila sebagian kecil (>30%-<75%) tujuan/sasaran tertuang dalam Renstra; d. apabila tidak ada (<30%) tujuan/sasaran tertuang dalam Renstra.		A/B/C/D	A	0.50
	Perjanjian Kinerja	a. apabila seluruh (100%) tujuan/sasaran tertuang dalam PK; b. apabila sebagian besar (>75%-99%) tujuan/sasaran tertuang dalam PK c. apabila sebagian kecil (>30%-<75%) tujuan/sasaran tertuang dalam PK d. apabila tidak ada (<30%) tujuan/sasaran tertuang dalam PK		A/B/C/D	A	0.50
5	Ukuran Keberhasilan (Indikator Kinerja) telah memenuhi kriteria SMART.					1.00
	Renstra	a. apabila seluruh (100%) indikator kinerja memenuhi kriteria SMART b. apabila sebagian besar (>75%-99%) indikator kinerja memenuhi kriteria SMART c. apabila sebagian kecil (>30%-<75%) indikator kinerja memenuhi kriteria SMART d. apabila tidak ada (<30%) indikator kinerja memenuhi kriteria SMART				0.50
	Perjanjian Kinerja	a. apabila seluruh (100%) indikator kinerja memenuhi kriteria SMART b. apabila sebagian besar (>75%-99%) indikator kinerja memenuhi kriteria SMART c. apabila sebagian kecil (>30%-<75%) indikator kinerja memenuhi kriteria SMART d. apabila tidak ada (<30%) indikator kinerja memenuhi kriteria SMART				0.50
6	Indikator Kinerja Utama (IKU) telah menggambarkan kondisi Kinerja Utama yang harus dicapai, tertuang secara berkelanjutan (sustainable tidak sering diganti dalam 1 periode Perencanaan Strategis).	a. apabila seluruh (100%) IKU menggambarkan Kinerja utama, dan tertuang di dalam dokumen perencanaan b. apabila seluruh (100%) IKU menggambarkan Kinerja utama, namun tidak tertuang di dalam dokumen perencanaan c. apabila sebagian besar (>75%-99%) indikator kinerja memenuhi kriteria SMART d. apabila sebagian kecil (>30%-<75%) indikator kinerja memenuhi kriteria SMART e. apabila tidak ada (<30%) indikator kinerja memenuhi kriteria SMART				1.00
7	Target yang ditetapkan dalam Perencanaan Kinerja dapat dicapai (achievable), menantang, dan realistis.					1.00
	Renstra	a. apabila seluruh (100%) target sesuai dengan kriteria b. apabila sebagian besar (>75%-99%) target sesuai dengan kriteria c. apabila sebagian kecil (>30%-<75%) target sesuai dengan kriteria d. apabila tidak ada (<30%) target sesuai dengan kriteria				1.00
	Perjanjian Kinerja	a. apabila seluruh (100%) target sesuai dengan kriteria b. apabila sebagian besar (>75%-99%) target sesuai dengan kriteria c. apabila sebagian kecil (>30%-<75%) target sesuai dengan kriteria d. apabila tidak ada (<30%) target sesuai dengan kriteria				1.00

8	Setiap Dokumen Perencanaan Kinerja menggambarkan hubungan yang berkesinambungan, serta selaras antara Kondisi/Hasil yang akan dicapai di setiap level jabatan (Cascading).				a. apabila pohon kinerja telah mengacu pohon kinerja instansi sesuai dengan prinsip-prinsip penyusunan pohon kinerja dan telah dimanfaatkan dalam perencanaan kinerja instansi; b. apabila pohon kinerja telah mengacu pohon kinerja instansi dan sesuai dengan prinsip-prinsip penyusunan pohon kinerja, namun belum dimanfaatkan dalam perencanaan kinerja instansi; c. apabila pohon kinerja belum mengacu pohon kinerja instansi dan belum memenuhi prinsip-prinsip penyusunan pohon kinerja; d. Belum menyusun pohon kinerja.	A/B/C/D	B	0.67
9	Perencanaan kinerja dapat memberikan informasi tentang hubungan kinerja, strategi, kebijakan, bahkan aktivitas antar bidang/dengan tugas dan fungsi lain yang berkaitan (Crosscutting).				a. apabila pohon kinerja telah mengidentifikasi kinerja urusan/sektor lain dan melibatkan instansi pengampu dalam perencanaan kinerja b. apabila pohon kinerja telah mengidentifikasi kinerja urusan/sektor lain, namun belum melibatkan instansi pengampu dalam perencanaan kinerja c. Belum ada crosscutting	A/B/C	B	0.50
10	Setiap pegawai merumuskan dan menetapkan Perencanaan Kinerja.				a. apabila seluruh (100%) pegawai merumuskan dan menetapkan perencanaan kinerja yang selaras dengan kinerja instansi b. apabila sebagian besar (<75-99%) pegawai merumuskan dan menetapkan perencanaan kinerja yang selaras dengan kinerja instansi c. apabila sebagian kecil (30-75%) pegawai merumuskan dan menetapkan perencanaan kinerja yang selaras dengan kinerja instansi d. apabila tidak ada (<30%) pegawai merumuskan dan menetapkan perencanaan kinerja yang selaras dengan kinerja instansi	A/B/C/D	B	0.67
1.c	Perencanaan Kinerja telah dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan	15.00	B	10.03		66.89%		0.67
Kriteria:								
1	Anggaran yang ditetapkan telah mengacu pada Kinerja yang ingin dicapai.				a. apabila seluruh (100%) anggaran telah mengacu pada kinerja yang ingin dicapai b. apabila sebagian besar (<75-99%) anggaran telah mengacu pada kinerja yang ingin dicapai c. apabila sebagian kecil (30-75%) anggaran telah mengacu pada kinerja yang ingin dicapai d. apabila tidak ada (<30%) anggaran yang mengacu pada kinerja yang ingin dicapai.	A/B/C/D	B	0.67
2	Aktivitas yang dilaksanakan telah mendukung Kinerja yang ingin dicapai.				a. apabila seluruh (100%) aktivitas yang dilaksanakan telah mendukung kinerja yang ingin dicapai b. apabila sebagian besar (<75-99%) aktivitas yang dilaksanakan telah mendukung kinerja yang ingin dicapai c. apabila sebagian kecil (30-75%) aktivitas yang dilaksanakan telah mendukung kinerja yang ingin dicapai d. apabila tidak ada (<30%) aktivitas yang dilaksanakan telah mendukung kinerja yang ingin dicapai	A/B/C/D	B	0.67
3	Target yang ditetapkan dalam Perencanaan Kinerja telah dicapai dengan baik, atau setidaknya masih on Renstra							0.63
					a. apabila seluruh (100%) target kinerja tercapai dengan baik/on the right track b. apabila sebagian besar (<75-99%) target kinerja tercapai dengan baik/on the right track c. apabila sebagian kecil (30-75%) target kinerja tercapai dengan baik/on the right track d. apabila tidak ada (<30%) target kinerja tercapai dengan baik/on the right track	A/B/C/D	B	0.55
	Perjanjian Kinerja				a. apabila seluruh (100%) target kinerja tercapai dengan baik/on the right track b. apabila sebagian besar (<75-99%) target kinerja tercapai dengan baik/on the right track c. apabila sebagian kecil (30-75%) target kinerja tercapai dengan baik/on the right track d. apabila tidak ada (<30%) target kinerja tercapai dengan baik/on the right track			0.40
4	Rencana aksi kinerja dapat berjalan dinamis karena capaian kinerja selalu dipantau secara berkala.				a. apabila monitoring dan evaluasi menghasilkan RATL, dan seluruhnya telah ditindaklanjuti b. apabila hasil monitoring dan evaluasi menghasilkan RATL, dan sebagian besar (<75-99%) telah ditindaklanjuti c. apabila monitoring dan evaluasi menghasilkan RATL, dan sebagian kecil (30-75%) telah ditindaklanjuti d. apabila tidak dilakukan monitoring dan evaluasi kinerja/RATL tidak ditindaklanjuti	A/B/C/D	B	0.67

5	Terdapat perbaikan/penyempurnaan Dokumen Perencanaan Kinerja yang ditetapkan dari hasil analisis perbaikan kinerja sebelumnya.				a. apabila seluruh (100%) hasil perbaikan/penyempurnaan telah ditindaklanjuti dalam perencanaan kinerja b. apabila sebagian besar (>75%-99%) hasil perbaikan/penyempurnaan telah ditindaklanjuti dalam perencanaan kinerja c. apabila sebagian kecil (30%-75%) hasil perbaikan/penyempurnaan telah ditindaklanjuti dalam perencanaan kinerja d. apabila tidak ada (<30%) hasil perbaikan/penyempurnaan telah ditindaklanjuti dalam perencanaan kinerja		A/B/C/D	B	0.67
6	Setiap Pegawai memahami dan peduli, serta berkomitmen dalam mencapai kinerja yang telah direncanakan.				a. apabila seluruh (100%) pegawai memahami dan peduli, serta berkomitmen dalam mencapai kinerja yang direncanakan b. apabila sebagian besar (>75%-99%) pegawai memahami dan peduli, serta berkomitmen dalam mencapai kinerja yang direncanakan c. apabila sebagian kecil (30%-75%) pegawai memahami dan peduli, serta berkomitmen dalam mencapai kinerja yang direncanakan d. apabila tidak ada (<30%) pegawai memahami dan peduli, serta berkomitmen dalam mencapai kinerja yang direncanakan		A/B/C/D/E	C	0.50
2	PENGUKURAN KINERJA	30.00		22.66					
2.a	Pengukuran Kinerja telah dilakukan	6.00	BB	4.5		75.00%			0.75
1	Terdapat Definisi Operasional yang jelas atas kinerja dan cara mengukur indikator kinerja.				a. apabila seluruh definisi operasional jelas; b. apabila sebagian definisi operasional jelas; c. belum ada definisi operasional.		A/B/C	A	1.00
2	Terdapat mekanisme yang jelas terhadap pengumpulan data kinerja yang dapat diandalkan.				a. apabila mekanisme pengumpulan data kinerja memenuhi seluruh kriteria yang ditetapkan; b. apabila mekanisme pengumpulan data kinerja memenuhi sebagian kriteria yang ditetapkan; c. belum ada mekanisme pengumpulan data kinerja		A/B/C	B	0.50
2.b	Pengukuran Kinerja telah menjadi kebutuhan dalam mewujudkan Kinerja secara Efektif dan Efisien dan telah dilakukan secara berjenjang dan	9.00	BB	7.51		0.834			0.83
1	Data kinerja yang dikumpulkan telah relevan untuk mengukur capaian kinerja yang diharapkan.				a. apabila seluruh (100%) data kinerja relevan b. apabila sebagian besar (>75%-99%) data kinerja relevan c. apabila sebagian kecil (>30%-<75%) data kinerja relevan d. apabila tidak ada (<30%) data kinerja yang relevan		A/B/C/D	B	0.67
2	Data kinerja yang dikumpulkan telah mendukung capaian kinerja yang diharapkan.				a. apabila seluruh (100%) data kinerja andal b. apabila sebagian besar (>75%-99%) data kinerja andal c. apabila sebagian kecil (>30%-<75%) data kinerja andal d. apabila tidak ada (<30%) data kinerja yang andal				1.00
3	Pengukuran kinerja telah dilakukan secara berkala.				a. apabila pengukuran kinerja dilakukan per triwulan (3 Bulan); b. apabila pengukuran kinerja dilakukan per semester (6 bulan); c. apabila pengukuran kinerja dilakukan 1 tahun sekali d. tidak dilakukan pengukuran kinerja secara berkala		A/B/C/D	A	1.00
4	Setiap level organisasi melakukan pemantauan atas pengukuran capaian kinerja unit dibawahnya secara berjenjang.				a. Apabila dilakukan pemantauan hingga unit terkecil dan diberikan feedback b. Apabila dilakukan pemantauan hingga unit terkecil namun tidak diberikan feedback c. Pemantauan belum dilakukan sampai unit terkecil		A/B/C	B	0.50
5	Pengukuran capaian kinerja telah memanfaatkan Teknologi Informasi (Aplikasi).				Ya, Jika pengukuran capaian kinerja telah memanfaatkan teknologi informasi		Ya/Tidak	Ya	1.00
2.c	Pengukuran Kinerja telah dijadikan dasar dalam pemberian Reward dan Punishment, serta penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien	15.00	B	10.65		71.00%			0.71

1	Pimpinan selalu terlibat sebagai pengambil keputusan (Decision Maker) dalam mengukur capaian kinerja.	a. apabila seluruh pimpinan terlibat dalam pengambilan keputusan strategis setelah pengukuran kinerja b. apabila sebagian pimpinan terlibat dalam pengambilan keputusan strategis setelah pengukuran kinerja c. apabila pimpinan tidak terlibat dalam pengambilan keputusan strategis setelah pengukuran kinerja				A/B/C	B	0.50
2	Pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian Strategi, Kebijakan, Aktivitas, Anggaran dalam mencapai kinerja.	Ya, Apabila pengukuran Kinerja telah mempengaruhi penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja				Ya/Tidak	Ya	1.00
3	Terdapat efisiensi atas penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja.	a. efisiensi terjadi didapat dari perbaikan kegiatan/aktivitas yang tidak berdampak terhadap kinerja (outcome/impact) b. Jika besaran efisiensi di dapat dari pengurangan rincian aktivitas/blaya yang tidak terkait terhadap output kegiatan c. sudah terdapat proses identifikasi aktivitas/kegiatan yang tidak terkait terhadap kinerja, namun belum dilaksanakan d. Jika tidak ada upaya efisiensi				A/B/C/D	B	0.67
4	Setiap pegawai memahami dan peduli atas hasil pengukuran kinerja.	a. apabila seluruh (100%) pegawai memahami dan peduli atas hasil pengukuran kinerja b. apabila sebagian besar (>75%-99%) pegawai memahami dan peduli atas hasil pengukuran kinerja c. apabila sebagian kecil (30%-75%) pegawai memahami dan peduli atas hasil pengukuran kinerja d. apabila tidak ada (<30%) pegawai memahami dan peduli atas hasil pengukuran kinerja				A/B/C/D	B	0.67
3	PELAPORAN KINERJA		15.00		10.43			
3.a	Terdapat Dokumen Laporan yang menggambarkan Kinerja	3.00	AA	3.00	100.00%			1.00
1	Dokumen Laporan Kinerja telah disusun.	Ya, jika laporan kinerja disusun				Ya/Tidak	Ya	1.00
2	Dokumen Laporan Kinerja telah disusun secara berkala.	a. apabila laporan kinerja dilakukan per triwulan (3 Bulan); b. apabila laporan kinerja dilakukan per semester (6 bulan); c. apabila laporan kinerja dilakukan 1 tahun sekali d. tidak dilakukan pelaporan kinerja				A/B/C/D	A	1.00
3	Dokumen Laporan Kinerja telah dipublikasikan.	a. apabila laporan kinerja dipublikasikan secara luas (dapat diakses masyarakat luas); b. apabila laporan kinerja dipublikasikan secara terbatas (internal pemerintah); c. apabila laporan kinerja belum dipublikasikan				A/B/C	A	1.00
4	Dokumen Laporan Kinerja telah disampaikan tepat waktu.	Ya, jika laporan kinerja telah disampaikan tepat waktu				Ya/Tidak	Ya	1.00
3.b	Dokumen Laporan Kinerja telah memenuhi Standar menggambarkan Kualitas atas Pencapaian Kinerja, informasi keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/penyempurnaan nya	4.50	B	3.05	67.81%			0.68
1	Dokumen Laporan Kinerja telah diformalkan.	Ya, jika laporan kinerja telah diformalkan				Ya/Tidak	Ya	1.00
2	Dokumen Laporan Kinerja telah mengungkap seluruh informasi tentang pencapaian kinerja.	a. apabila laporan kinerja telah mengungkapkan seluruh (100%) informasi pencapaian kinerja b. apabila laporan kinerja telah mengungkapkan sebagian besar (>75-99%) informasi pencapaian kinerja c. apabila laporan kinerja telah mengungkapkan sebagian kecil (30-75%) informasi pencapaian kinerja d. apabila laporan kinerja belum (<30%) mengungkapkan informasi pencapaian kinerja						0.75

3	Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan perbandingan realisasi kinerja dengan target tahunan.	a. apabila laporan kinerja telah mengungkapkan seluruh (100%) informasi analisis dan evaluasi realisasi kinerja sesuai dengan target tahunan b. apabila laporan kinerja telah mengungkapkan sebagian besar (>75-99%) informasi analisis dan evaluasi realisasi kinerja sesuai dengan target tahunan c. apabila laporan kinerja telah mengungkapkan sebagian kecil (30-75%) informasi analisis dan evaluasi realisasi kinerja sesuai dengan target tahunan d. apabila laporan kinerja belum (<30%) mengungkapkan informasi analisis dan evaluasi realisasi kinerja sesuai dengan target tahunan				1.00
4	Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah.	a. apabila laporan kinerja telah mengungkapkan seluruh (100%) informasi analisis dan evaluasi realisasi kinerja dengan target jangka menengah b. apabila laporan kinerja telah mengungkapkan sebagian besar (>75-99%) informasi analisis dan evaluasi realisasi kinerja dengan target jangka menengah c. apabila laporan kinerja telah mengungkapkan sebagian kecil (30-75%) informasi analisis dan evaluasi realisasi kinerja dengan target jangka menengah d. apabila laporan kinerja belum (<30%) mengungkapkan informasi analisis dan evaluasi realisasi kinerja dengan target jangka menengah	A/B/C/D	B		0.67
5	Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja tahun-tahun sebelumnya.	a. apabila laporan kinerja telah mengungkapkan seluruh (100%) informasi analisis dan evaluasi realisasi kinerja dengan realisasi kinerja tahun-tahun sebelumnya b. apabila laporan kinerja telah mengungkapkan sebagian besar (>75-99%) informasi analisis dan evaluasi realisasi kinerja dengan realisasi kinerja tahun-tahun sebelumnya c. apabila laporan kinerja telah mengungkapkan sebagian kecil (30-75%) informasi analisis dan evaluasi realisasi kinerja dengan realisasi kinerja tahun-tahun sebelumnya d. apabila laporan kinerja belum (<30%)				0.00
6	Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja di level nasional/internasional (Benchmark Kinerja).	a. apabila laporan kinerja telah mengungkapkan seluruh (100%) informasi analisis dan evaluasi realisasi kinerja dengan realisasi kinerja di level Nasional b. apabila laporan kinerja telah mengungkapkan sebagian besar (>75-99%) informasi analisis dan evaluasi realisasi kinerja dengan realisasi kinerja di level Nasional c. apabila laporan kinerja telah mengungkapkan sebagian kecil (30-75%) informasi analisis dan evaluasi realisasi kinerja dengan realisasi kinerja di level Nasional d. apabila laporan kinerja belum (<30%) mengungkapkan informasi analisis dan evaluasi realisasi kinerja dengan realisasi kinerja di level Nasional	A/B/C/D	B		0.67
7	Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan kualitas atas capaian kinerja beserta upaya nyata dan/atau hambatannya.	a. apabila laporan kinerja telah mengungkapkan seluruh (100%) informasi terkait analisis keberhasilan/kegagalan mencapai target kinerja b. apabila laporan kinerja telah mengungkapkan sebagian besar (>75-99%) informasi terkait analisis keberhasilan/kegagalan mencapai target kinerja c. apabila laporan kinerja telah mengungkapkan sebagian kecil (30-75%) informasi terkait analisis keberhasilan/kegagalan mencapai target kinerja d. apabila laporan kinerja belum (<30%) mengungkapkan informasi terkait analisis keberhasilan/kegagalan mencapai target kinerja	A/B/C/D	B		0.67
8	Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja.	a. apabila laporan kinerja telah mengungkapkan seluruh (100%) informasi terkait efisiensi yang mempertimbangkan efektivitas dengan capaian kinerja b. apabila laporan kinerja telah mengungkapkan sebagian besar (>75-99%) informasi terkait efisiensi yang mempertimbangkan efektivitas dengan capaian kinerja c. apabila laporan kinerja telah mengungkapkan sebagian kecil (30-75%) informasi terkait efisiensi yang mempertimbangkan efektivitas dengan capaian kinerja d. apabila laporan kinerja belum (<30%) mengungkapkan informasi terkait efisiensi yang mempertimbangkan efektivitas dengan capaian kinerja	A/B/C/D	B		0.67

9	Dokumen Laporan Kinerja telah menginformasikan upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (Rekomendasi perbaikan kinerja).				a. apabila laporan kinerja telah mengungkapkan seluruh (100%) informasi terkait upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan b. apabila laporan kinerja telah mengungkapkan sebagian besar (>75-99%) informasi terkait upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan c. apabila laporan kinerja telah mengungkapkan sebagian kecil (30-75%) informasi terkait upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan d. apabila laporan kinerja belum (<30%) mengungkapkan informasi terkait upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan		A/B/C/D	B	0.67
3.c	Pelaporan Kinerja telah memberikan dampak yang besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya	7.50	CC	4.38		58.33%			0.58
1	Informasi dalam laporan kinerja selalu menjadi perhatian utama pimpinan (Bertanggung Jawab).				a. apabila seluruh Informasi dalam laporan kinerja selalu menjadi perhatian utama pimpinan; b. apabila sebagian Informasi dalam laporan kinerja selalu menjadi perhatian utama pimpinan; c. apabila Informasi dalam laporan kinerja tidak menjadi perhatian utama pimpinan.		A/B/C	B	0.50
2	Penyajian informasi dalam laporan kinerja menjadi kepedulian seluruh pegawai.				a. apabila lebih dari 95% pegawai peduli terhadap informasi dalam laporan kinerja; b. apabila 80% < pegawai peduli terhadap informasi dalam laporan kinerja < 95%; c. apabila 40% < pegawai peduli terhadap informasi dalam laporan kinerja < 80%; d. apabila 20% < pegawai peduli terhadap informasi dalam laporan kinerja < 40% e. apabila pegawai peduli terhadap informasi dalam laporan kinerja < 20%.		A/B/C/D/E	B	0.75
3	Informasi dalam laporan kinerja berkala telah digunakan dalam penyesuaian aktivitas, penyesuaian penggunaan anggaran, evaluasi dan penyesuaian perencanaan kinerja untuk mencapai kinerja.				a. apabila seluruh Informasi dalam laporan kinerja berkala telah digunakan dalam penyesuaian aktivitas untuk mencapai kinerja; b. apabila sebagian Informasi dalam laporan kinerja berkala telah digunakan dalam penyesuaian aktivitas untuk mencapai kinerja; c. apabila Informasi dalam laporan kinerja berkala tidak digunakan dalam penyesuaian aktivitas untuk mencapai kinerja		A/B/C	B	0.50
4	EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INTERNAL	25.00		18.25					
4.a	Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi	7.00	B	4.69		67.00%			0.67
1	Seluruh rekomendasi atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal telah ditindaklanjuti.				a. Jika seluruh rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal telah ditindaklanjuti, b. Jika sebagian besar rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal telah ditindaklanjuti c. Jika sebagian kecil rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal telah ditindaklanjuti d. Jika tidak ada rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal yang ditindaklanjuti		A/B/C/D	B	0.67
4.b	Capaian Outcome	18.00	BB	13.56		76.33%			0.75
1	Telah terjadi perbaikan dan peningkatan kinerja (Outcome) dengan memanfaatkan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal.				a. Jika seluruh indikator kinerja mengalami kenaikan capaian kinerja, b. Jika sebagian besar indikator kinerja mengalami kenaikan capaian kinerja c. Jika sebagian kecil indikator kinerja mengalami kenaikan capaian kinerja d. Jika tidak ada indikator kinerja yang mengalami kenaikan capaian kinerja				0.75
DPMPT: TOTAL SKOR		75.32	BB	SANGAT BAIK					

INSPEKTORAT KOTA BALIKPAPAN

JALAN RUHUI RAHAYU I

TELP./FAX : (0542) 7218734 KOTAK POS 1111 BALIKPAPAN 76115

2024



INSPEKTORAT KOTA BALIKPAPAN

JALAN RUHUI RAHAYU I

TELP / FAX : (0542) 7218734 KOTAK POS 1111 BALIKPAPAN 76115

EMAIL : inskot.balikpapan@yahoo.co.id



INSPEKTORAT KOTA BALIKPAPAN

JALAN RUHUI RAHAYU I

TELP / FAX : (0542) 7218734 KOTAK POS 1111 BALIKPAPAN 76115

EMAIL : inskot.balikpapan@yahoo.co.id

2024